

SKRIPSI

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA
PT PLN (PERSERO) TAHUN 2017-2021**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NAMA : TALIA SAFIRA AZRA
NIM : 1815644059**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2022**

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA PT PLN (PERSERO) TAHUN 2017-2021

Talia Safira Azra
1815644059

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Kinerja keuangan merupakan salah satu faktor penting didalam perusahaan. Kinerja keuangan yang baik dapat dinilai dari hasil analisis yang memperoleh presentase sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hasil dari analisis tersebut dapat membantu perusahaan dalam membuat perencanaan dan kebijakan yang tepat dalam mencapai visi dan misi perusahaan saat ini maupun di masa yang akan datang.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat pergerakan kinerja keuangan dan tingkat kesehatan BUMN berdasarkan rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas dan rasio rentabilitas selama tahun 2017-2021 sesuai dengan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-100/MBU/2002. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio likuiditas yang diukur menggunakan *cash ratio* memperoleh hasil cukup sehat dan *current ratio* memperoleh hasil yang kurang sehat karena nilai dari utang lancar tidak dapat diseimbangkan dengan baik oleh aset lancar. Rasio solvabilitas yang diukur menggunakan rasio total modal sendiri terhadap total aset mengalami peningkatan namun dalam kondisi kurang sehat, dimana total modal sendiri dan total aset yang dimiliki tidak seimbang. Rasio aktivitas yang diukur dengan *collection periods* dan perputaran persediaan memperoleh hasil sehat, namun pada perputaran total aset memperoleh hasil kurang sehat. Rasio rentabilitas diukur menggunakan *return on equity* dan *return on investment* mengalami kenaikan namun memperoleh hasil kurang sehat karena disebabkan oleh faktor pendapatan usaha yang kurang maksimal yang diperoleh perusahaan.

Kata kunci: likuiditas, solvabilitas, aktivitas, rentabilitas

**ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE
AT PT PLN (PERSERO) PERIOD 2017-2021**

**Talia Safira Azra
1815644059**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

Financial performance is one of the critical factors in the company. Good financial performance can be assessed from the results of the analysis that obtain a percentage in accordance with the standards that have been set. The results of the analysis can assist the company in making the right plans and policies to achieve the company's current and future vision and mission.

The purpose of this research is to analyze the level of movement of financial performance and the soundness of SOEs based on liquidity ratios, solvency ratios, activity ratios, and profitability ratios during 2017-2021 in accordance with the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises (SOE) Number KEP-100/MBU/2002. This research uses a qualitative approach.

The results of this research indicate that the liquidity ratio measured using the cash ratio obtains fairly healthy results, and the current ratio obtains unhealthy results because current assets cannot properly balance the current debt value. As measured by the ratio of own total capital to total assets, the solvency ratio has increased but is in an unhealthy condition, where the total equity and total assets owned are not balanced. As measured by collection periods and inventory turnover, the activity ratio obtained healthy results, but the total asset turnover obtained less healthy results. The profitability ratio is measured using return on equity (ROE), and return on investment (ROI) has increased but obtained less healthy results because it is caused by factors that are less than optimal operating income received by the company.

Keywords: *liquidity, solvability, activity, profitability*

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA
PT PLN (PERSERO) TAHUN 2017-2021**

SKRIPSI

**Dibuat Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Terapan Akuntansi pada Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi
Manajerial Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali**

**NAMA : TALIA SAFIRA AZRA
NIM : 1815644059**

**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2022**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Talia Safira Azra
Nim : 1815644059
Program Studi : Akuntansi Manajerial

Menyatakan bahwa sesungguhnya Skripsi:

Judul : Analisis Kinerja Keuangan Pada PT PLN (Persero) Tahun
2017-2021
Pembimbing : 1. Dra. Ni Nyoman Yintayani, M.Si
2. Ir. I Gede Made Karma, MT
Tanggal Uji : 9 Agustus 2022

Skripsi yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagian dari syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, 9 Agustus 2022



Talia Safira Azra

SKRIPSI

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA
PT PLN (PERSERO) TAHUN 2017-2021**

DIAJUKAN OLEH:

**NAMA : TALIA SAFIRA AZRA
NIM : 1815644059**

Telah Disetujui dan Diterima dengan Baik oleh:

DOSEN PEMBIMBING I



**Dra. Ni Nyoman Yintayani, M.Si
NIP. 196110161990032001**

DOSEN PEMBIMBING II



**Ir. I Gede Made Karma, MT
NIP. 196207191990031002**

POLITEKNIK NEGERI BALI

**JURUSAN AKUNTANSI
KETUA**



**I Made Sudana, SE., M.Si
NIP.196112281990031001**

SKRIPSI

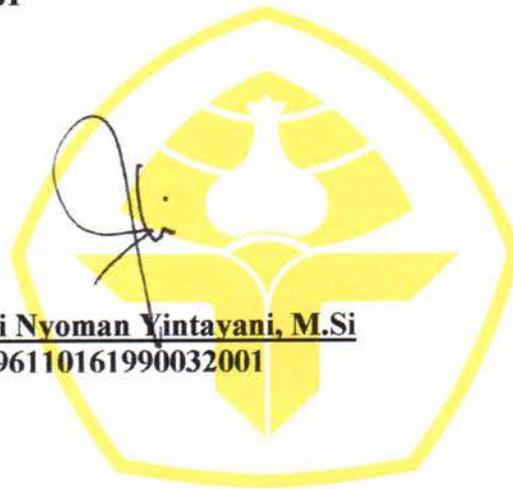
**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA
PT PLN (PERSERO) TAHUN 2017-2021**

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Ujian pada:

Tanggal 9 Agustus 2022

PANITIA PENGUJI

KETUA:



Dra. Ni Nyoman Yintayani, M.Si
NIP. 196110161990032001

ANGGOTA:

**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI**

1. Dra. Ni Ketut Masih, MM
NIP. 196411291993032001

A black handwritten signature is written below the name of the first member of the examination committee.

2. Anak Agung Putri Suardani, SE.,MM
NIP. 196310261988032001

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial pada Politeknik Negeri Bali. Saya menyadari, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada:

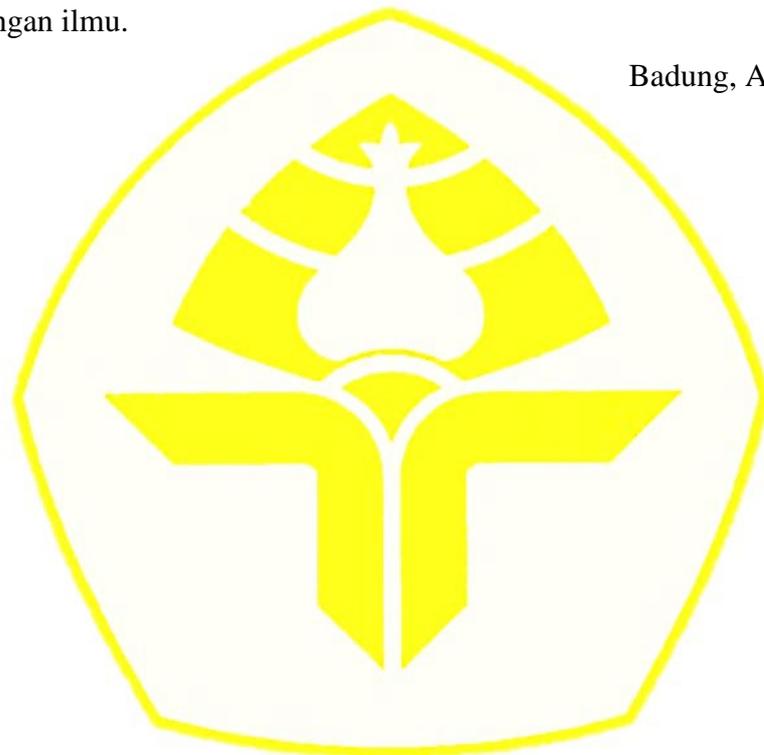
1. Bapak I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom, selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan menuntut pendidikan di Politeknik Negeri Bali.
2. Bapak I Made Sudana, S.E., M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Bali
3. Bapak Cening Ardina, S.E., M.Agb, selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi sebagai syarat kelulusan studi di Politeknik Negeri Bali.
4. Ibu Dra. Ni Nyoman Yintayani, M.Si, selaku dosen pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini.
5. Bapak Ir. I Gede Made Karma, MT, selaku Dosen Pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini.
6. Pihak perusahaan yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan.
7. Bapak Hery Purnomo, Ibu Ni Ketut Krisnaningrum, dan keluarga besar saya yang telah memberikan bantuan serta dukungan material dan moral kepada saya selama penyusunan skripsi.

8. Yoasobi, BTS, *Stray Kids*, dan ITZY yang telah memberikan semangat melalui karya-karyanya dalam penyusunan skripsi ini.
9. Teman-teman yang telah banyak membantu saya dan memberikan dukungan material dan moral dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Badung, Agustus 2022

Penulis



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Abstrak.....	ii
<i>Abstract</i>	iii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan	iv
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Penetapan Kelulusan.....	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel.....	xi
Daftar Gambar	xii
Daftar Lampiran	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Batasan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Kajian Teori.....	9
B. Kajian Penelitian yang Relevan.....	24
C. Kerangka Pikir.....	26
D. Pertanyaan Penelitian	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Jenis Penelitian	30
B. Lokasi/Tempat dan Waktu Penelitian.....	30
C. Sumber Data	30
D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	31
E. Keabsahan Data	31
F. Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	34
A. Deskripsi Hasil Penelitian	34
B. Pembahasan dan Temuan	60
C. Keterbatasan Penelitian	64
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	65
A. Simpulan.....	65
B. Implikasi	66
C. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Data Laporan Posisi Keuangan PT PLN (Persero).....	4
Tabel 1. 2	Data Piutang, Pendapatan Usaha, dan Laba Bersih PT PLN (Persero)	5
Tabel 2. 1	Skor Penilaian Rasio Kas.....	12
Tabel 2. 2	Skor Penilaian Rasio Lancar.....	13
Tabel 2. 3	Skor Penilaian Rasio Total Modal Sendiri Terhadap Total Aset.....	14
Tabel 2. 4	Skor Penilaian <i>Collection Periods</i>	15
Tabel 2. 5	Skor Penilaian Perputaran Persediaan.....	16
Tabel 2. 6	Skor Penilaian Perputaran Total Aset.....	17
Tabel 2. 7	Skor Penilaian Imbalan Kepada Pemegang Saham (ROE).....	18
Tabel 2. 8	Skor Penilaian Imbalan Investasi (ROI).....	19
Tabel 2. 9	Indikator Rasio dan Bobot Aspek Keuangan.....	23
Tabel 2. 10	Kategori Tingkat Kesehatan Kinerja.....	24
Tabel 4. 1	Hasil Perhitungan Rasio Kas.....	35
Tabel 4. 2	Hasil Perhitungan Rasio Lancar.....	37
Tabel 4. 3	Hasil Perhitungan Rasio Total Modal Sendiri Terhadap Total Aset.....	40
Tabel 4. 4	Hasil Perhitungan <i>Collection Periods</i>	43
Tabel 4. 5	Hasil Perhitungan Perputaran Persediaan.....	45
Tabel 4. 6	Hasil Perhitungan Perputaran Total Aset.....	48
Tabel 4. 7	Hasil Perhitungan <i>Return on Equity</i> (ROE).....	50
Tabel 4. 8	Hasil Perhitungan <i>Return on Investment</i> (ROI).....	53
Tabel 4. 9	Predikat Kesehatan Kinerja Keuangan Tahun 2017.....	55
Tabel 4. 10	Predikat Kesehatan Kinerja Keuangan Tahun 2018.....	56
Tabel 4. 11	Predikat Kesehatan Kinerja Keuangan Tahun 2019.....	57
Tabel 4. 12	Predikat Kesehatan Kinerja Keuangan Tahun 2020.....	58
Tabel 4. 13	Predikat Kesehatan Kinerja Keuangan Tahun 2021.....	59

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir..... 27



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Laporan Posisi Keuangan Tahun 2017, 2018, dan 2019
- Lampiran 2 : Laporan Posisi Keuangan Tahun 2020 dan 2021
- Lampiran 3 : Laporan Laba Rugi Tahun 2017, 2018, dan 2019
- Lampiran 4 : Laporan Laba Rugi Tahun 2020 dan 2021
- Lampiran 5 : Kebijakan Akuntansi PT PLN (Persero)
- Lampiran 6 : Perhitungan Rasio Kas
- Lampiran 7 : Perhitungan Rasio Lancar
- Lampiran 8 : Perhitungan Rasio Total Modal Sendiri Terhadap Total Aset
- Lampiran 9 : Perhitungan *Collection Periods*
- Lampiran 10 : Perhitungan Perputaran Persediaan
- Lampiran 11 : Perhitungan Perputaran Total Aset
- Lampiran 12 : Perhitungan *Return on Equity* (ROE)
- Lampiran 13 : Perhitungan *Return on Investment* (ROI)
- Lampiran 14 : Perhitungan Kesehatan Kinerja Keuangan Tahun 2017
- Lampiran 15 : Perhitungan Kesehatan Kinerja Keuangan Tahun 2018
- Lampiran 16 : Perhitungan Kesehatan Kinerja Keuangan Tahun 2019
- Lampiran 17 : Perhitungan Kesehatan Kinerja Keuangan Tahun 2020
- Lampiran 18 : Perhitungan Kesehatan Kinerja Keuangan Tahun 2021
- Lampiran 19 : Daftar dan Hasil Wawancara serta Dokumentasi
- Lampiran 20 : Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-100/MBU/2002

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003, beberapa tujuan BUMN adalah menyumbangkan penerimaan negara bagi perkembangan perekonomian nasional, mengejar keuntungan, serta menyediakan barang maupun jasa yang memadai. Dalam mencapai tujuan tersebut, perusahaan selalu membutuhkan dana atau modal yang berguna untuk menghasilkan keuntungan untuk dapat dioperasikan dengan lebih efektif. Namun, dengan keadaan seperti saat ini yaitu pandemi Covid-19, secara tidak langsung dapat membuat perubahan modal, penurunan produksi dan pendapatan yang akan mempengaruhi laporan keuangan perusahaan. Pandemi Covid-19, selain menjadi masalah kesehatan global, juga berimplikasi terhadap perekonomian di Indonesia (Susilawati et al., 2020). Sehingga, hal ini akan berdampak bagi berbagai bidang sektor pada suatu negara.

Cara untuk terhindar dari dampak ekonomi yang ditimbulkan pandemi Covid-19 diperlukan kondisi kinerja keuangan yang sehat. Sebab, dengan cara tersebut dapat dilihat apakah usaha yang dijalankan dapat bertahan atau tidak pada saat pandemi Covid-19 ini (Aldira, 2021). Alat

yang dapat digunakan untuk melihat kondisi keuangan adalah analisis rasio keuangan. Hasil dari analisis rasio dapat menjelaskan suatu perimbangan atau hubungan yang terjadi antara hasil suatu rasio dengan yang lain untuk mengetahui kinerja keuangan secara menyeluruh dari waktu ke waktu menggunakan alat analisa berupa rasio (Gavinanda et al., 2017).

Dalam menentukan kebijakan keuangan, laporan keuangan berperan penting bagi suatu entitas karena laporan keuangan dapat menggambarkan keadaan keuangan dari suatu entitas untuk saat ini (untuk neraca) dan dalam suatu periode (untuk laba rugi) (Kasmir, 2019). Sebagaimana PT PLN (Persero) yang merupakan perusahaan BUMN yang bergerak dibidang energi dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1972, Perusahaan Listrik Negara (PLN) ditetapkan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dengan hak dan wewenang khusus serta tanggung jawab dalam hal pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 0076.P/DIR/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN (Persero), Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN selaku kuasa pemegang saham PT PLN (Persero) dan manajemen perusahaan perlu bersinergi dalam membuat keputusan manajemen keuangan dalam usaha pemenuhan tenaga listrik maupun jasa lain terkait kelistrikan yang memadai, menyumbangkan penerimaan negara bagi perkembangan perekonomian nasional, serta mengejar keuntungan sesuai dengan peran BUMN. Oleh sebab itu, laporan

keuangan perlu dianalisis lebih lanjut dengan alat analisa keuangan yang ada untuk mendapatkan informasi yang lebih berguna dan lebih spesifik dalam menjelaskan posisi dan kinerja keuangan perusahaan (Wardayani, 2016).

Teknik yang dapat digunakan dalam melakukan analisis kinerja keuangan adalah analisis rasio keuangan dengan rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas dan rasio rentabilitas. Mengetahui tingkat rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, dan rasio rentabilitas, maka dapat diketahui kinerja keuangan perusahaan BUMN untuk mengetahui kemampuan perusahaan mengelola asetnya, menjamin utang-utangnya, dan kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Penilaian kinerja keuangan perusahaan, khususnya BUMN dapat diukur dengan membandingkan hasil perhitungan rasio keuangan yang telah ditetapkan sesuai dengan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara.

Berikut merupakan gambaran data keuangan PT PLN (Persero) tahun 2017-2021 untuk menganalisis laporan keuangan.

Tabel 1. 1
Data Laporan Posisi Keuangan PT PLN (Persero)
Periode Tahun 2017-2021
(Rp 000.000)

Tahun	Aset Lancar	Aset Tidak Lancar	Liabilitas Jangka Pendek	Liabilitas Jangka Panjang	Ekuitas
2017	93.797.251	1.241.160.406	139.074.658	326.466.395	869.416.604
2018	113.415.251	1.379.072.494	157.895.954	407.177.934	927.413.857
2019	151.366.673	1.433.688.340	159.298.153	496.376.447	929.380.413
2020	97.153.318	1.491.906.463	149.659.239	499.587.950	939.812.592
2021	85.911.375	1.527.305.081	146.538.480	485.070.853	981.607.123

Sumber: Laporan Keuangan PT PLN (Persero) 2017-2021

Tabel 1.1 menunjukkan aset lancar, aset tidak lancar, liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan ekuitas pada PT PLN (Persero) tahun 2017-2021. Pada aset lancar, terjadi kenaikan dari tahun 2017 hingga tahun 2019 dan menurun di tahun 2020 hingga tahun 2021, sedangkan pada aset tidak lancar terjadi kenaikan setiap tahunnya. Liabilitas jangka pendek mengalami kondisi yang serupa dengan aset lancar yang mengalami kenaikan dan penurunan. Namun aset lancar yang dimiliki PT PLN (Persero) di tahun 2021 lebih kecil dibandingkan tahun 2017 dengan kondisi liabilitas jangka pendek 2017 memiliki jumlah lebih kecil daripada tahun 2021 yang mengindikasikan terjadi permasalahan pada rasio likuiditas. Pada ekuitas PT PLN (Persero) terjadi peningkatan setiap tahunnya, yang dimana hal ini dapat diindikasikan bahwa rasio modal sendiri terhadap total aset cukup baik karena total aset yang dimiliki juga meningkat setiap tahunnya. Namun hal ini perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk mengetahui

predikat kinerja keuangan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri BUMN KEP-100/MBU/2002 dan menganalisis pengaruhnya terhadap rasio yang lain.

Berikut ini data piutang, pendapatan usaha, dan laba bersih untuk menganalisis laporan keuangan yang berkaitan dengan rasio aktivitas dan rasio rentabilitas.

Tabel 1. 2
Data Piutang, Pendapatan Usaha, dan Laba Bersih PT PLN (Persero)
Periode Tahun 2017-2021
(Rp 000.000)

Tahun	Piutang Usaha	Pendapatan Usaha	Laba Bersih
2017	22.466.843	301.033.458	4.428.117
2018	23.802.663	344.172.960	11.575.756
2019	25.130.538	359.605.880	4.322.130
2020	21.278.416	345.415.637	5.993.428
2021	23.802.386	368.174.270	13.174.877

Sumber: Laporan Keuangan PT PLN (Persero) 2017-2021

Tabel 1.2 menunjukkan piutang usaha, perolehan pendapatan usaha, dan laba bersih pada PT PLN (Persero) tahun 2017-2021. Piutang usaha menunjukkan peningkatan dari tahun 2017 hingga tahun 2019 dan terjadi penurunan di tahun 2020 setelah itu kembali meningkat di tahun 2021. Pada pendapatan usaha juga memiliki kondisi yang serupa dengan piutang usaha yang dimana terjadi kenaikan dan penurunan. Hal ini mengindikasikan terdapat permasalahan dalam rasio aktivitas perusahaan dalam *collection periods*. Pada laba bersih yang diperoleh PT PLN (Persero) mengalami kondisi yang berbeda dengan piutang usaha dan pendapatan usaha, yang

dimana laba bersih mengalami kenaikan di tahun 2018 dan penurunan di tahun 2019 dan kemudian mengalami peningkatan hingga tahun 2021. Hal ini mengindikasikan terdapat permasalahan pada rasio rentabilitas. Oleh sebab itu, perlu dilakukan analisis kinerja keuangan pada PT PLN (Persero) untuk mengetahui kondisi keuangan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja keuangan.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengukuran kinerja keuangan perusahaan BUMN menggunakan teknik analisis rasio keuangan, dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Pada PT PLN (Persero) Tahun 2017-2021”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana analisis kinerja keuangan pada PT PLN (Persero) tahun 2017-2021?
2. Bagaimana meningkatkan kinerja keuangan pada PT PLN (Persero) tahun 2017-2021?

C. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian dapat lebih terarah, maka penelitian ini dibatasi pada analisis kinerja keuangan PT PLN (Persero) menggunakan penilaian aspek keuangan berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara. Data laporan neraca dan laba rugi tahun 2017-

2021 PT PLN (Persero) akan diolah dan dianalisis menggunakan analisis rasio. Analisis rasio keuangan yang digunakan yaitu: 1) rasio likuiditas, yang terdiri dari *cash ratio* dan *current ratio*; 2) rasio solvabilitas berupa rasio modal sendiri terhadap total aset; 3) rasio aktivitas, yang terdiri dari *collection periods*, perputaran persediaan dan *total assets turn over*; dan 4) rasio rentabilitas yang terdiri dari *return on investment* dan *return on equity*.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan batasan masalah penelitian maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Untuk menganalisis kinerja keuangan pada PT PLN (Persero) tahun 2017-2021.
- b. Untuk meningkatkan kinerja keuangan pada PT PLN (Persero).

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Mahasiswa

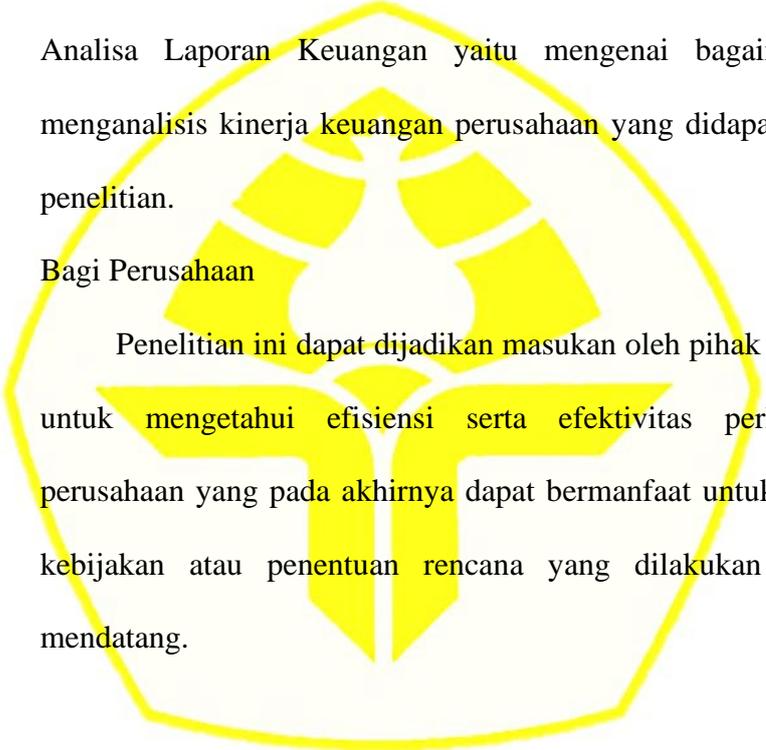
Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai cara menganalisis kinerja keuangan perusahaan berdasarkan Keputusan Menteri BUMN dengan laporan keuangan berdasarkan hasil rasio yang didapat dari penelitian.

b. Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini dapat digunakan sebagai tolak ukur atau upaya mengetahui sampai sejauh mana mahasiswa dapat menyerap serta mengimplementasikan teori-teori yang telah diberikan selama mengikuti kegiatan perkuliahan, khususnya dalam mata kuliah Analisa Laporan Keuangan yaitu mengenai bagaimana cara menganalisis kinerja keuangan perusahaan yang didapat dari hasil penelitian.

c. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat dijadikan masukan oleh pihak perusahaan untuk mengetahui efisiensi serta efektivitas perkembangan perusahaan yang pada akhirnya dapat bermanfaat untuk perbaikan kebijakan atau penentuan rencana yang dilakukan di waktu mendatang.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan periodik yang menginformasikan perkembangan perusahaan dari segi pendapatan dan pengeluaran serta posisi keuangan perusahaan ke pihak-pihak yang berkepentingan (Rahmayuni, 2017). Laporan keuangan juga merupakan produk akhir yang dihasilkan dari akuntansi keuangan yang memberi informasi kredibel untuk mengetahui posisi keuangan, menilai keefektifan kinerja manajemen, dan hasil yang diraih perusahaan (Szydelko & Biadacz, 2016). Tujuan laporan keuangan dari umum ke spesifik dijabarkan Hanafi & Halim (2016) yaitu:

- a. Memberikan informasi masa ini atau yang akan datang bagi pengguna laporan keuangan untuk membuat keputusan rasional.
- b. Bagi pihak eksternal di masa ini atau di masa mendatang, laporan keuangan memberikan informasi mengenai perkiraan jumlah, waktu (*timing*), dan ketidakpastian (resiko) kas yang diterima dari deviden atau bunga, utang pinjaman, penjualan, atau pelunasan surat berharga.

- c. Memberikan informasi perkiraan aliran kas perusahaan, sumber daya ekonomi, posisi keuangan, modal saham, dan pendapatan perusahaan bagi pihak internal.

Laporan keuangan menurut Munawir (2014) umumnya terdiri atas:

- a. Laporan posisi keuangan yang menggambarkan posisi keuangan seperti jumlah aset, liabilitas, serta ekuitas dari perusahaan.
- b. Laporan rugi laba yang menyajikan hasil yang dicapai perusahaan yang terdiri dari pendapatan yang diterima dan biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu.
- c. Laporan perubahan modal yang terdiri dari sumber, penggunaan, dan penyebab perubahan modal.
- d. Laporan arus kas yang membantu memperoleh penjelasan lebih lanjut mengenai sumber dan penggunaan kas atau memperlihatkan arus kas masuk dan keluar yang digolongkan menjadi arus kas pendanaan, arus kas investasi, dan arus kas operasi.
- e. Catatan atas laporan keuangan yang menyajikan penjelasan dan kebijakan yang signifikan mengenai laporan keuangan.
- f. Laporan lainnya sesuai ketentuan perusahaan seperti laporan perubahan modal kerja, laporan biaya produksi, dan laporan penyebab perubahan laba kotor.

2. Analisis Rasio Keuangan

Rasio keuangan merupakan perhitungan rasio dengan menggunakan laporan keuangan yang dapat berfungsi sebagai alat ukur dalam menilai kinerja perusahaan (Wardiyah, 2017). Rasio keuangan terdiri dari empat kelompok yaitu rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio rentabilitas, dan rasio solvabilitas (Munawir, 2014)

Analisis rasio bermanfaat sebagai alat menilai kinerja dan prestasi perusahaan, sebagai rujukan untuk pembuatan perencanaan, sebagai alat untuk mengevaluasi kondisi suatu perusahaan dari perspektif keuangan, bagi para kreditor analisis rasio dapat digunakan untuk memperkirakan potensi risiko yang akan dihadapi dikaitkan dengan adanya jaminan kelangsungan pembayaran bunga dan pengembalian pokok pinjaman, serta sebagai penilaian bagi pihak *stakeholder* organisasi (Fahmi, 2017).

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor KEP-100/MBU/2002 dapat dijadikan pedoman dalam menentukan rasio keuangan yang digunakan dalam menganalisis kinerja keuangan serta menentukan tingkat kesehatan kinerja keuangan PT PLN (Persero) melalui hasil perhitungan serta analisis yang dilakukan. Penilaian tingkat kesehatan BUMN non jasa keuangan dibedakan menjadi BUMN Infrastruktur (Infra) dan BUMN Non Infrastruktur (Non Infra). Adapun jenis-jenis rasio yang terdapat dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara

Republik Indonesia Nomor KEP-100/MBU/2002 dan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas berfungsi untuk melihat kapasitas perusahaan membayar kewajiban lancarnya (Wahyuningsih et al., 2018). Artinya, rasio ini berguna agar tidak terjadinya kasus perusahaan yang tidak mampu dalam membayar liabilitas jangka pendeknya yang jatuh tempo.

1) Rasio kas (*cash ratio*) dapat mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan (Kasmir, 2019). Adapun skor penilaian rasio kas yang dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, nomor KEP-100/MBU/2002 yaitu:

JURUSAN AKUNTANSI
Tabel 2.1

Skor Penilaian Rasio Kas

Rasio kas = x (%)	Skor	
	Infra	Non Infra
$x \geq 35$	3	5
$25 \leq x < 35$	2,5	4
$15 \leq x < 25$	2	3
$10 \leq x < 15$	1,5	2
$5 \leq x < 10$	1	1
$0 \leq x < 5$	0	0

Sumber: Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002

2) Rasio lancar (*current ratio*) dapat mengukur kapasitas aset lancar yang dimiliki perusahaan dalam membayar utang (Rantau, 2016). Adapun skor penilaian rasio lancar yang dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, nomor KEP-100/MBU/2002 yaitu:

Tabel 2. 2

Skor Penilaian Rasio Lancar

Rasio lancar = x (%)	Skor	
	Infra	Non Infra
$125 \leq x$	3	5
$110 \leq x < 125$	2,5	4
$100 \leq x < 110$	2	3
$95 \leq x < 100$	1,5	2
$90 \leq x < 95$	1	1
$x < 90$	0	0

Sumber: Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002

b. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya atau kewajiban-kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi. Rasio ini dapat dihitung dari pos – pos yang sifatnya jangka panjang seperti aktiva tetap dan utang jangka panjang (Harahap, 2016). Rasio solvabilitas yang digunakan adalah rasio total modal sendiri terhadap total aset. Rasio total modal sendiri terhadap total aset, merupakan rasio yang menunjukkan pentingnya

dari sumber modal pinjaman (*relative importance of borrowed fund*) dan tingkat keamanan (*margin of protection*) yang dimiliki oleh kreditur (Munawir, 2014). Rasio ini merupakan perbandingan antara total modal sendiri terhadap total aset yang dimiliki perusahaan. Adapun skor penilaian rasio modal sendiri terhadap total aset yang dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, nomor KEP-100/MBU/2002 yaitu:

Tabel 2.3
Skor Penilaian Rasio Total Modal Sendiri
Terhadap Total Aset

Total Modal Sendiri Terhadap Total Aset (%) = x	Skor	
	Infra	Non Infra
$x < 0$	0	0
$0 \leq x < 10$	2	4
$10 \leq x < 20$	3	6
$20 \leq x < 30$	4	7,25
$30 \leq x < 40$	6	10
$40 \leq x < 50$	5,5	9
$50 \leq x < 60$	5	8,5
$60 \leq x < 70$	4,5	8
$70 \leq x < 80$	4,25	7,5
$80 \leq x < 90$	4	7
$90 \leq x < 100$	3,5	6,5

Sumber: Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002

c. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya (Kasmir, 2019).

- 1) *Collection periods* mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode (Kasmir, 2019). Adapun skor penilaian *collection periods* yang dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, nomor KEP-100/MBU/2002 yaitu:

Tabel 2. 4

Skor Penilaian *Collection Periods*

<i>Collection Periods = x</i> (%)	Perbaikan = x (%)	Skor	
		Infra	Non Infra
$x \leq 60$	$35 < x$	4	5
$60 < x \leq 90$	$30 < x \leq 35$	3,5	4,5
$90 < x \leq 120$	$25 < x \leq 30$	3	4
$120 < x \leq 150$	$20 < x \leq 25$	2,5	3,5
$150 < x \leq 180$	$15 < x \leq 20$	2	3
$180 < x \leq 210$	$10 < x \leq 15$	1,6	2,4
$210 < x \leq 240$	$6 < x \leq 10$	1,2	1,8
$240 < x \leq 270$	$3 < x \leq 6$	0,8	1,2
$270 < x \leq 300$	$1 < x \leq 3$	0,4	0,6
$300 < x$	$0 < x \leq 1$	0	0

Sumber: Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002

2) Perputaran persediaan (*inventory turnover*) mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam sediaan (*inventory*) ini berputar dalam suatu periode (Kasmir, 2019). Adapun skor penilaian perputaran persediaan yang dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, nomor KEP-100/MBU/2002 yaitu:

Tabel 2. 5
Skor Penilaian Perputaran Persediaan

Perputaran Persediaan = x (%)	Perbaikan = x (%)	Skor	
		Infra	Non Infra
$x \leq 60$	$35 < x$	4	5
$60 < x \leq 90$	$30 < x \leq 35$	3,5	4,5
$90 < x \leq 120$	$25 < x \leq 30$	3	4
$120 < x \leq 150$	$20 < x \leq 25$	2,5	3,5
$150 < x \leq 180$	$15 < x \leq 20$	2	3
$180 < x \leq 210$	$10 < x \leq 15$	1,6	2,4
$210 < x \leq 240$	$6 < x \leq 10$	1,2	1,8
$240 < x \leq 270$	$3 < x \leq 6$	0,8	1,2
$270 < x \leq 300$	$1 < x \leq 3$	0,4	0,6
$300 < x$	$0 < x \leq 1$	0	0

Sumber: Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002

3) Perputaran total aset (*total asset turnover-TATO*) menunjukkan perbandingan antara penjualan dan total aktiva suatu perusahaan, yang menggambarkan kecepatan perputaran total aktiva dalam satu periode tertentu (Wardiyah, 2017). Adapun skor penilaian perputaran total

aset yang dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, nomor KEP-100/MBU/2002 yaitu:

Tabel 2. 6
Skor Penilaian Perputaran Total Aset

Perputaran Total Aset = x (%)	Perbaikan = x (%)	Skor	
		Infra	Non Infra
$120 < x$	$20 < x$	4	5
$105 < x \leq 120$	$15 < x \leq 120$	3,5	4,5
$90 < x \leq 105$	$10 < x \leq 105$	3	4
$75 < x \leq 90$	$5 < x \leq 90$	2,5	3,5
$60 < x \leq 75$	$0 < x \leq 75$	2	3
$40 < x \leq 60$	$0 < x \leq 0$	1,5	2,5
$20 < x \leq 40$	$20 < x \leq 0$	1	2
$x \leq 20$	$20 < x \leq 0$	0,5	1,5

Sumber: Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002

c. Rasio Rentabilitas

Rasio rentabilitas dapat berguna dalam mengukur seberapa besar daya tampung perusahaan dalam meraih keuntungan. Keuntungan yang diperoleh akan berguna untuk menjalankan kegiatan perusahaan (Yudiartini & Dharmadiaksa, 2016).

- 1) Imbalan kepada pemegang saham (*return on equity* atau ROE) dapat mengukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba bagi para pemegang saham. ROE dianggap sebagai representasi dari kekayaan pemegang

saham atau nilai perusahaan (Hery, 2015). Adapun skor penilaian ROE yang dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, nomor KEP-100/MBU/2002 yaitu:

Tabel 2. 7
Skor Penilaian Imbalan Kepada Pemegang Saham (ROE)

ROE%	Skor	
	Infra	Non Infra
15 < ROE	15	20
13 < ROE ≤ 15	13,5	18
11 < ROE ≤ 13	12	16
9 < ROE ≤ 11	10,5	14
7,9 < ROE ≤ 9	9	12
6,6 < ROE ≤ 7,9	7,5	10
5,3 < ROE ≤ 6,6	6	8,5
4 < ROE ≤ 5,3	5	7
2,5 < ROE ≤ 4	4	5,5
1 < ROE ≤ 2,5	3	4
0 < ROE ≤ 1	1,5	2
ROE < 0	1	0

Sumber: Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002

2) Imbalan investasi (*return on investment* atau ROI) dapat menunjukkan hasil atau return atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan (Kasmir, 2019). Adapun skor penilaian ROI yang dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha

Milik Negara Republik Indonesia, nomor KEP-100/MBU/2002 yaitu:

Tabel 2. 8
Skor Penilaian Imbalan Investasi (ROI)

ROI%	Skor	
	Infra	Non Infra
$18,0 < ROI$	15	20
$15,0 < ROI \leq 18$	13,5	18
$13,0 < ROI \leq 15$	12	16
$12,0 < ROI \leq 13$	10,5	14
$10,5 < ROI \leq 12$	9	12
$9,0 < ROI \leq 10,5$	7,5	10
$7,0 < ROI \leq 9$	6	8,5
$5,0 < ROI \leq 7$	5	7
$3,0 < ROI \leq 5$	4	5,5
$1,0 < ROI \leq 3$	3	4
$0,0 < ROI \leq 1$	1,5	2
$ROI < 0$	1	0

Sumber: Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002

3. Badan Usaha Milik Negara

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2003, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Pendirian BUMN dimaksudkan untuk:

- a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya.

- b. Mengejar keuntungan.
 - c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.
 - d. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.
 - e. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.
- Memperhatikan sifat usaha BUMN, dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2003 dijelaskan bawah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terdiri dari dua jenis yaitu:

- a. Perusahaan Perseroan (Persero), merupakan BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

- b. Perusahaan Umum (Perum), merupakan BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Pada tahun 1994 melalui Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1994 perusahaan umum (Perum) listrik negara di alihkan bentuknya

menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Maka dapat dikatakan bahwa PT PLN (Persero) termasuk kedalam perusahaan perseroan.

4. Kinerja Keuangan Badan Usaha Milik Negara

Kinerja keuangan merupakan bayangan atas keadaan keuangan perusahaan serta sebagai alat analisis keuangan guna mengetahui keadaan perusahaan pada suatu periode tertentu (Faisal et al., 2018). Penilaian kinerja keuangan perusahaan BUMN berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. KEP-100/MBU/2002 bertujuan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan analisis kinerja khususnya aspek keuangan pada BUMN yang mendapatkan hasil pemeriksaan dari akuntan terhadap perhitungan keuangan tahunan perusahaan yang dinyatakan dengan opini wajar tanpa pengecualian atau wajar dengan pengecualian dari akuntan publik atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

Terdapat tiga aspek penilaian pada penilaian tingkat kesehatan BUMN menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. KEP/100MBU/2002 yaitu penilaian pada aspek keuangan, aspek operasional, dan aspek administrasi. Pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan analisis kinerja aspek keuangan. Pada penilaian aspek keuangan, terdapat bobot nilai pada setiap indikator rasio penilaian yang dimana bobot setiap indikator dikelompokkan menjadi BUMN Infrastruktur (Infra), dan BUMN Non Infrastruktur (Non Infra). BUMN Infrastruktur merupakan BUMN yang menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan masyarakat

luas, dengan bidang usahanya meliputi; 1) pembangkitan, transmisi atau pendistribusian tenaga listrik; 2) pengadaan serta pengoperasian sarana pendukung pelayanan angkutan barang atau penumpang baik laut, udara atau kereta api; 3) jalan dan jembatan tol, dermaga, pelabuhan laut atau sungai atau danau, lapangan terbang dan bandara; 4) bendungan dan irigrasi. BUMN Non Infrastruktur merupakan BUMN yang menjalankan bidang usaha diluar BUMN Infrastruktur seperti 1) sektor industri dan perdagangan; 2) sektor kawasan industri jasa konstruksi dan konsultan konstruksi, 3) sektor telekomunikasi dan pariwisata; 4) sektor pertanian, perkebunan kehutanan perdagangan; dan 5) sektor pelayanan umum.

PT PLN (Persero) termasuk kedalam BUMN Infrastruktur (BUMN Infa) karena PT PLN (Persero) menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik dengan menjalankan pembangkitan, transmisi, dan pendistribusian tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai, serta melaksanakan penugasan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan dalam rangka menunjang pembangunan.

Adapun bobot penilaian pada masing-masing indikator rasio pada Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. KEP/100MBU/2002.

Tabel 2. 9
Indikator Rasio dan Bobot Aspek Keuangan

Indikator	Bobot	
	Infra	Non Infra
1. Rasio kas (<i>cash ratio</i>)	3	5
2. Rasio lancar (<i>current ratio</i>)	4	5
3. Rasio total modal sendiri terhadap total aktiva	6	10
4. <i>Collection periods</i>	4	5
5. Perputaran persediaan	4	5
6. Perputaran total aset	4	5
7. Imbalan kepada pemegang saham (ROE)	15	20
8. Imbalan investasi (ROI)	10	15
Total Bobot	50	70

Sumber: Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002

Agar dapat diperoleh hasil akhir tingkat kesehatan kinerja keuangan BUMN, penilaian pada aspek operasional dan aspek administrasi diabaikan maka aspek keuangan dibuat ekuivalennya. Cara membuat aspek keuangan agar ekuivalen adalah dengan membagi hasil akhir bobot penilaian dari delapan indikator rasio dengan 50% untuk BUMN infrastuktur dan 70% untuk BUMN non infrastuktur (Sutrisno, 2017). Adapun tingkat kesehatan BUMN sebagai berikut.

Tabel 2. 10
Kategori Tingkat Kesehatan Kinerja

Kategori	Predikat	Nilai (Skor)
Sehat	AAA	> 95
	AA	$80 < TS \leq 95$
	A	$65 < TS \leq 80$
Kurang Sehat	BBB	$50 < TS \leq 65$
	BB	$40 < TS \leq 50$
	B	$30 < TS \leq 40$
Tidak Sehat	CCC	$20 < TS \leq 30$
	CC	$10 < TS \leq 20$
	C	$TS \leq 10$

Sumber: Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002

B. Kajian Penelitian yang Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Purba (2021) menunjukkan bahwa kinerja keuangan pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Periode 2013-2017 dalam keadaan sehat dengan predikat AA secara berturut-turut. Penelitian ini menggunakan rasio rentabilitas, rasio likuiditas, rasio aktivitas, dan rasio solvabilitas. Rasio profitabilitas yang dinilai dengan *Return On Equity* (ROE) dan *Return On Investment* (ROI) mendapatkan hasil bahwa kinerja keuangan dalam kondisi baik. Tingkat rasio likuiditas yang dinilai dengan *cash ratio* dan *current ratio* pada kondisi baik. Tingkat rasio aktivitas yang dinilai dengan *Collection Periods*, Perputaran Persediaan (PP), dan *Total Asset Turn Over* (TATO) dalam kondisi kurang baik. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan kurang optimal dalam memanfaatkan dan mengelola aktiva yang dimiliki dalam menghasilkan

pendapatan. Tingkat rasio solvabilitas yang dinilai dengan Total Modal Sendiri Terhadap Total Aset dalam kondisi baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurafni (2021) menggunakan rasio aktivitas, rasio solvabilitas, rasio rentabilitas, dan rasio aktivitas. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa kinerja keuangan PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagut Sektor Pembangkitan Pekanbaru tahun 2014-2017 dalam keadaan kurang sehat. Pada rasio likuiditas PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagut Sektor Pembangkitan Pekanbaru tahun 2014-2018 berada pada kondisi yang kurang sehat. Berdasarkan analisis rasio solvabilitas, kinerja keuangan perusahaan berada pada kondisi sehat. Analisis rasio rentabilitas kinerja keuangan perusahaan berada pada kondisi yang kurang sehat dan berdasarkan analisis rasio aktivitas kinerja keuangan perusahaan berada pada kondisi yang sehat.

Penelitian yang dilakukan oleh Adelia (2020) menggunakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan analisis rasio berupa rasio rentabilitas, rasio likuiditas, rasio aktivitas dan rasio solvabilitas. Penelitian ini menunjukkan kinerja keuangan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan dari tahun 2014-2018 selalu mendapatkan kategori sehat dengan predikat AA. Tahun 2014 memperoleh total skor sebesar 43, sebesar 42,5 pada tahun 2015, sebesar 42 pada tahun 2016, sebesar 41,5 pada tahun 2017, dan skor sebesar 40,5 pada tahun 2018.

Penelitian yang dilakukan oleh Lafera (2020) dilakukan dengan metode deskriptif kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah

analisis rasio yang terdiri dari rasio likuiditas berupa *current ratio*, rasio solvabilitas dengan total modal sendiri terhadap total aktiva, dan rasio profitabilitas berupa ROE. Penelitian ini menunjukkan kinerja keuangan PT PLN (Persero) cukup efektif namun tidak efisien. Dengan tingkat rasio likuiditas PT PLN selama tahun 2017 sampai 2018 menunjukkan rata-rata kenaikan selama 2 tahun sebesar 73,86%, penurunan tingkat rasio profitabilitas sebesar 0,31%, kenaikan tingkat rasio aktivitas sebesar 20,35%, dan kenaikan tingkat rasio solvabilitas sebesar 64,36%.

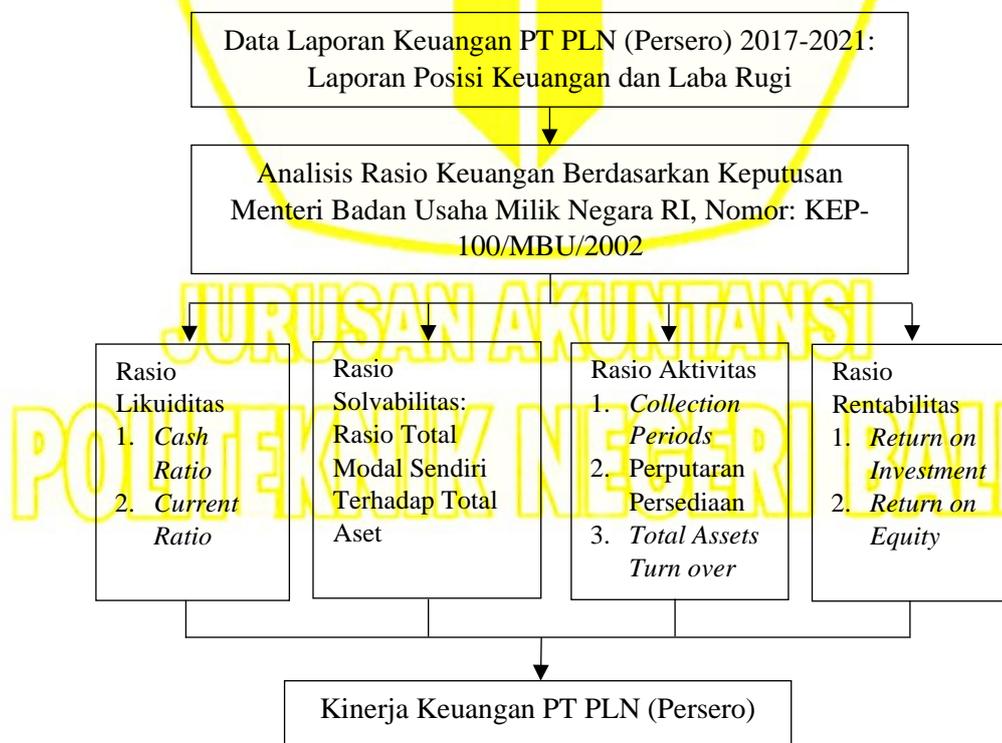
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Suraya (2019) menunjukkan kinerja keuangan PT Gas Negara Tbk tahun 2013 – 2017 dalam keadaan sehat dengan predikat AA secara berturut-turut. Rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio likuiditas, rasio rentabilitas, rasio aktivitas, dan rasio solvabilitas. Rasio likuiditas dalam keadaan sehat dengan hasil *current ratio* memiliki rata-rata 255% dan *cash ratio* sebesar 171%. Rata-rata rentabilitas perusahaan dengan indikator ROE 25%, dan ROI 346% maka rasio profitabilitas perusahaan dikatakan sehat. Rata-rata aktivitas perusahaan pada *collection periods* 26 hari, perputaran persediaan 34 hari, dan TATO 166% dan rasio aktivitas perusahaan dalam keadaan sehat. Rasio solvabilitas perusahaan dalam keadaan sehat dengan rata-rata total modal sendiri terhadap total aset atau yaitu 162%.

C. Kerangka Pikir

Data laporan keuangan yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan posisi keuangan dan laba rugi yang akan di analisis untuk tahun

2017-2021. Data akan diolah dan dianalisis menggunakan analisis rasio berdasarkan Keputusan Menteri BUMN, No. KEP-100/MBU/2002. Analisis rasio keuangan yang digunakan yaitu: 1) rasio likuiditas, yang terdiri dari *cash ratio* dan *current ratio*; 2) rasio solvabilitas berupa rasio modal sendiri terhadap total aset; 3) rasio aktivitas, yang terdiri dari *collection periods*, perputaran persediaan, dan *total assets turn over* dan; 4) rasio rentabilitas yang terdiri dari *return on investment* dan *return on equity*. Setelah dianalisis, di dapatkan hasil kinerja keuangan PT PLN (Persero) tahun 2017-2021.

Berikut merupakan kerangka pikir dalam menganalisis kinerja keuangan PT PLN (Persero).



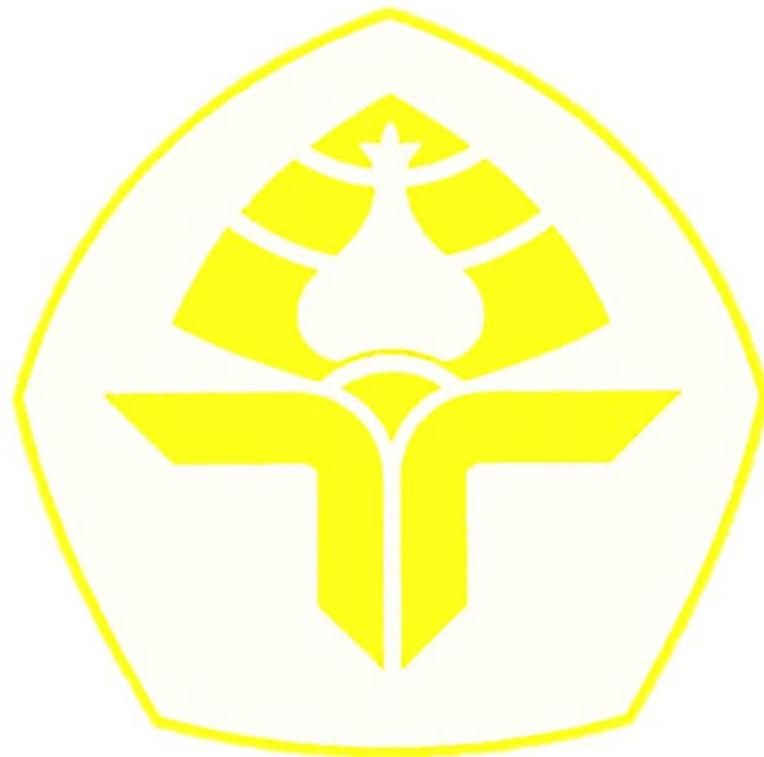
Gambar 2. 1 Kerangka Pikir

D. Pertanyaan Penelitian

PT PLN (Persero) berperan sebagai salah satu penopang perekonomian Indonesia secara langsung maupun tidak langsung. Perkembangan dunia usaha dalam situasi perekonomian yang semakin terbuka perlu dilandasi dengan sarana dan sistem penilaian kerja yang dapat mendorong peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja. Salah satu aspek penilaian pada tingkat kesehatan BUMN adalah penilaian pada aspek keuangan dengan menganalisis laporan keuangan menggunakan analisis rasio keuangan. Hal ini berlaku pada PT PLN (Persero), untuk mengetahui apakah kinerja keuangannya dapat dikatakan sehat atau tidak sehat, maka perlu dianalisis menggunakan rasio keuangan.

Berdasarkan kajian teori, kajian penelitian yang relevan, dan kerangka pikir dalam penelitian ini maka dapat dijelaskan bahwa laporan keuangan berkaitan dengan kinerja keuangan. Oleh sebab itu, menganalisis laporan keuangan menggunakan analisis rasio keuangan yang benar dapat berguna untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan serta memperbaiki kondisi perusahaan dimasa mendatang. Berdasarkan hal tersebut, pada penelitian ini yang akan dibahas mengenai perhitungan analisis rasio keuangan pada PT PLN (Persero). Laporan keuangan yang digunakan berupa laporan posisi keuangan dan laba rugi. Analisis rasio keuangan yang digunakan yaitu rasio likuiditas yang terdiri dari *cash ratio* dan *current ratio*, rasio solvabilitas berupa total modal sendiri terhadap total aset, rasio aktivitas yang terdiri dari *collection periods*, perputaran persediaan, dan *total assets turn over*

ratio, serta akan digunakan rasio rentabilitas berupa *return on equity* dan *return on investment*. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas kinerja keuangan PT PLN (Persero) yang dapat diketahui setelah memperoleh hasil perhitungan analisis rasio keuangan.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif yang tujuan utamanya mencoba mendapatkan informasi yang lebih terinci serta pemahaman yang bersifat holistik atau menyeluruh, berdasarkan kondisi yang alamiah dari fenomena yang akan diteliti (Yusanto, 2020). Penelitian kualitatif dapat memperkaya hasil penelitian kuantitatif melalui penggalian pemahaman dan pemaknaan mendalam hasil analisis.

B. Lokasi/Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di PT PLN (Persero) kantor pusat yang berlokasi di Jalan Trunojoyo Blok M – I No 135 Kebayoran Baru, Jakarta. Waktu yang digunakan untuk penelitian ini adalah 3 bulan.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Data primer didapatkan secara langsung dengan melaksanakan wawancara tidak terstruktur dengan karyawan bagian akuntansi dan keuangan PT PLN (Persero). Dalam penelitian ini data primer yang dimaksud adalah informasi mengenai komponen laporan posisi keuangan dan laba rugi yang berkaitan dengan penelitian.

2. Data sekunder yang didapatkan dalam bentuk sudah jadi, sudah didapatkan dan diolah oleh pihak lain. Adapun data sekunder pada penelitian ini berupa laporan keuangan yang meliputi laporan posisi keuangan dan laba rugi.

D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Data-data pada penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Wawancara dengan karyawan akuntansi PT PT PLN (Persero) bertujuan untuk memperoleh informasi dari objek penelitian melalui responden yang dituju.
- b. Dokumentasi yang dilakukan dengan mengambil data dari PT PT PLN (Persero). Dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan bukti tertulis dari tempat penelitian.

2. Instrumen Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilapangan melalui wawancara tidak terstruktur dalam penelitian ini dibantu dengan pedoman wawancara dan alat bantu dokumentasi berupa catatan dan alat perekam. Hal ini dilakukan agar memudahkan dalam pengumpulan data.

E. Keabsahan Data

Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi yaitu pemeriksaan keabsahan dengan dilakukannya perbandingan terhadap data di luar data itu sendiri. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber yang memeriksa

data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber seperti memeriksa data laporan keuangan perusahaan dari situs resmi PT PLN (Persero), situs Bursa Efek Indonesia, dan melalui wawancara tidak terstruktur.

F. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif yaitu menganalisis kinerja keuangan pada perusahaan dibawah naungan Kementerian BUMN menggunakan rasio keuangan yang berpedoman pada Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-100/MBU/2002. Adapun rasio keuangan yang digunakan yaitu:

1. Rasio Likuiditas

- a. Rasio kas (*cash ratio*), dihitung dengan cara membagi kas dan setara kas dengan utang lancar.

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Kas dan setara kas}}{\text{Utang Lancar}} \times 100\%$$

- b. Rasio lancar (*current ratio*), dihitung dengan cara membagi aset lancar dengan utang lancar.

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Utang Lancar}} \times 100\%$$

2. Rasio Solvabilitas

- a. Total modal sendiri terhadap total aset, dihitung dengan membagi total modal sendiri dibagi dengan total aset.

$$\text{TMS terhadap TA} = \frac{\text{Total Modal Sendiri}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

3. Rasio Aktivitas

- a. *Collection Periods*, dihitung dengan cara membagi total piutang dengan total pendapatan usaha dikalikan dengan 365 hari.

$$\text{Collection Periods} = \frac{\text{Total Piutang Usaha}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 365 \text{ hari}$$

- b. Perputaran persediaan, dihitung dengan cara membagi total persediaan dengan total pendapatan dikalikan dengan 365 hari.

$$\text{Perputaran Persediaan} = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 365 \text{ hari}$$

- c. Perputaran Total Aset (*total asset turn over* – TATO), dihitung dengan cara membagi total pendapatan dengan *capital employed* atau total aset.

$$\text{Total Asset Turn Over} = \frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

3. Rasio Rentabilitas

- a. Imbalan kepada pemegang saham (*return on equity* – ROE), dihitung dengan membagi laba setelah pajak dengan modal sendiri.

$$\text{Return on Equity} = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Modal sendiri}} \times 100\%$$

- b. Imbalan investasi (*return on investment* – ROI), dihitung dengan membagi laba sebelum bunga dan pajak ditambah penyusutan dengan *capital employed* atau total aset.

$$\text{Return on Investment} = \frac{\text{EBIT} + \text{Penyusutan}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

Kinerja keuangan PT PLN (Persero) dianalisis menggunakan data laporan keuangan yaitu laporan posisi keuangan dan laba rugi selama lima tahun terakhir, yaitu tahun 2017-2021. Data dianalisis menggunakan rasio keuangan berdasarkan KEP-100/MBU/2002 yang terdiri dari rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio rentabilitas. Dalam penilaian kinerja keuangan PT PLN (Persero) digunakan pedoman penilaian tingkat kesehatan kinerja aspek keuangan pada Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia nomor KEP-100/MBU/2002. Adapun hasil penelitian yang diperoleh sebagai berikut.

1. Rasio Likuiditas
 - a. Rasio Kas (*Cash Ratio*)

Rasio kas (*cash ratio*) berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-100/MBU/2002 dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{Rasio kas} = \frac{\text{Kas dan Setara Kas}}{\text{Utang Lancar}} \times 100\%$$

Adapun hasil perhitungan rasio kas yang didapatkan melalui data laporan posisi keuangan PT PLN (Persero) sebagai berikut.

Tabel 4. 1
Hasil Perhitungan Rasio Kas
(Rp 000.000)

Tahun	Kas dan Setara Kas	Utang Lancar	Rasio Kas	Naik/turun
2017	42.291.959	139.074.658	30,41%	
2018	33.294.560	157.895.954	21,09%	-9,32%
2019	46.598.783	159.298.153	29,25%	8,17%
2020	54.735.434	149.659.239	36,57%	7,32%
2021	37.968.399	146.538.480	25,91%	-10,66%

Sumber: Lampiran 6

Tabel diatas dapat menunjukkan kondisi kinerja keuangan berdasarkan rasio kas (*cash ratio*) pada PT PLN (Persero) dengan uraian sebagai berikut.

Tahun 2017 PT PLN (Persero) memperoleh rasio kas sebesar 30,41%. Dari hasil rasio ini, menunjukkan bahwa utang lancar sebesar Rp 1,00 dijamin kas dan setara kas sebesar Rp 0,3041. Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 hasil rasio tersebut termasuk dalam kriteria cukup sehat.

Rasio kas di tahun 2018 menurun sebesar 9,32% sehingga hasil rasionya menjadi 21,09%. Hal ini disebabkan karena kas dan setara kas yang dimiliki perusahaan menurun, namun utang lancar meningkat. Dari hasil rasio ini, dapat ditunjukkan bahwa utang lancar sebesar Rp 1,00 dijamin kas dan setara kas sebesar Rp 0,2109. Walaupun *cash ratio* di tahun 2018 mengalami penurunan, namun berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No.

KEP-100/MBU/2002 hasil rasio tersebut termasuk dalam kriteria cukup sehat.

Tahun 2019 *cash ratio* PT PLN (Persero) naik sebesar 8,17% dari tahun sebelumnya, sehingga hasil rasionya menjadi 29,25%. Hal tersebut disebabkan karena kas dan setara kas meningkat. Dari hasil rasio ini, dapat ditunjukkan bahwa utang lancar sebesar Rp 1,00 dijamin kas dan setara kas sebesar Rp 0,2925. *Cash ratio* di tahun 2019 mengalami kenaikan dan hasil rasio tersebut termasuk dalam kriteria cukup sehat.

Tahun 2020 *cash ratio* kembali mengalami kenaikan, yakni sebesar 7,53% dari tahun sebelumnya, sehingga hasil rasionya menjadi 36,57%. Hal ini disebabkan karena kas dan setara kas meningkat dan utang lancar menurun. Dari hasil rasio ini, dapat ditunjukkan bahwa utang lancar sebesar Rp 1,00 dijamin kas dan setara kas sebesar Rp 0,3657. *Cash ratio* di tahun 2020 mengalami kenaikan kembali dan hasil rasio tersebut termasuk dalam kriteria sehat.

Tahun 2021 *cash ratio* mengalami penurunan, yakni sebesar 10,66% dari tahun sebelumnya, sehingga hasil rasionya menjadi 25,91%. Hal tersebut disebabkan karena kas dan setara kas menurun. Dari hasil rasio ini, dapat ditunjukkan bahwa utang lancar sebesar Rp 1,00 dijamin kas dan setara kas sebesar Rp 0,2591. Walaupun *cash ratio* di tahun 2021 mengalami

penurunan, namun berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 hasil rasio tersebut termasuk dalam kriteria cukup sehat.

b. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio lancar (*current ratio*) berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-100/MBU/2002 dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{Rasio kas} = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Utang Lancar}} \times 100\%$$

Adapun hasil perhitungan rasio lancar yang didapatkan melalui data laporan posisi keuangan PT PLN (Persero) sebagai berikut.

Tabel 4. 2
Hasil Perhitungan Rasio Lancar
(Rp 000.000)

Tahun	Aset Lancar	Utang Lancar	Current Ratio	Naik/turun
2017	93.797.251	139.074.658	67,44%	
2018	113.415.251	157.895.954	71,83%	4,4%
2019	151.366.673	159.298.153	95,02%	23,2%
2020	97.153.318	149.659.239	64,92%	-30,1%
2021	85.911.375	146.538.480	58,63%	-6,3%

Sumber: Lampiran 7

Tabel diatas dapat menunjukkan kondisi kinerja keuangan berdasarkan rasio keuangan PT PLN (Persero) khususnya rasio lancar (*current ratio*) yaitu sebagai berikut.

Tahun 2017 PT PLN (Persero) memperoleh rasio lancar sebesar 67,44%. Dari hasil rasio ini, menunjukkan bahwa utang lancar sebesar Rp 1,00 dijamin aset lancar sebesar Rp 0,6744. Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 hasil rasio tersebut termasuk dalam kriteria kurang sehat.

Tahun 2018 *current ratio* naik sebesar 4,4% dari tahun sebelumnya, sehingga hasil rasionya menjadi 71,83%. Hal tersebut disebabkan karena aset lancar meningkat dan utang lancar meningkat. Dari hasil rasio ini, dapat ditunjukkan bahwa utang lancar sebesar Rp 1,00 dijamin aset lancar sebesar Rp 0,7183. Walaupun *current ratio* di tahun 2018 mengalami kenaikan, namun hasil rasio tersebut termasuk dalam kriteria kurang sehat.

Current ratio di tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 23,2% dari tahun sebelumnya, sehingga hasil rasionya menjadi 95,02. Hal ini disebabkan karena aset lancar meningkat dan utang lancar meningkat. Dari hasil rasio ini, dapat ditunjukkan bahwa utang lancar sebesar Rp 1,00 dijamin aset lancar sebesar Rp 0,9502. Walaupun *current ratio* di tahun 2019 mengalami kenaikan, namun hasil rasio tersebut termasuk dalam kriteria kurang sehat.

Tahun 2020 *current ratio* mengalami penurunan sebesar 30,1% dari tahun sebelumnya, sehingga hasil rasionya menjadi 64,92%. Hal ini disebabkan karena aset lancar menurun dan utang lancar menurun. Dari hasil rasio ini, dapat ditunjukkan bahwa utang lancar sebesar Rp 1,00 dijamin aset lancar sebesar Rp 0,6492. Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 hasil rasio tersebut termasuk dalam kriteria kurang sehat.

Tahun 2021 *current ratio* mengalami penurunan kembali sebesar 6,3% dari tahun sebelumnya, sehingga hasil rasionya menjadi 58,63%. Hal ini disebabkan karena aset lancar menurun. Dari hasil rasio ini, dapat ditunjukkan bahwa utang lancar sebesar Rp 1,00 dijamin aset lancar sebesar Rp 0,5863. Dari rasio tersebut, berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 *current ratio* PT PLN (Persero) tahun 2021 termasuk dalam kriteria kurang sehat.

2. Rasio Solvabilitas

a. Rasio modal sendiri terhadap total aset

Rasio modal sendiri terhadap total aset berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-100/MBU/2002 dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{Rasio modal sendiri terhadap total aset} = \frac{\text{Total Modal Sendiri}}{\text{Total Aset}} \times$$

100%

Adapun hasil perhitungan rasio modal sendiri terhadap total aset yang didapatkan melalui data laporan posisi keuangan dan laba rugi PT PLN (Persero) sebagai berikut.

Tabel 4.3
Hasil Perhitungan Rasio Total Modal Sendiri Terhadap Total Aset
(Rp 000.000)

Tahun	Total Modal Sendiri	Total Aset	TMS	
			terhadap TA	Naik/turun
2017	869.416.604	1.334.957.657	65,13%	
2018	927.413.857	1.492.487.745	62,14%	-2,99%
2019	929.380.413	1.585.055.013	58,63%	-3,50%
2020	939.812.592	1.589.059.781	59,14%	0,51%
2021	981.607.123	1.613.216.456	60,85%	1,71%

Sumber: Lampiran 8

Tabel diatas dapat menunjukkan kondisi kinerja keuangan berdasarkan rasio solvabilitas PT PLN (Persero) khususnya total modal sendiri terhadap total aset yaitu sebagai berikut.

Tahun 2017 PT PLN (Persero) memperoleh rasio total modal sendiri terhadap total aset sebesar 65,13%. Dari hasil rasio ini, dapat ditunjukkan bahwa setia Rp 1,00 modal sendiri dijamin dengan Rp 0,6513 aset yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi total modal sendiri terhadap total aset yang didapatkan maka semakin kecil jumlah jaminan yang digunakan perusahaan untuk membiayai aset perusahaan. Berdasarkan Keputusan Menteri

BUMN No. KEP-100/MBU/2002 hasil rasio tersebut termasuk dalam kriteria kurang sehat.

Rasio total modal sendiri terhadap total aset tahun 2018 PT PLN (Persero) mengalami penurunan sebesar 2,99% dengan hasil sebesar 62,14%. Hal ini disebabkan karena total modal sendiri meningkat. Dari hasil rasio ini, dapat ditunjukkan bahwa setiap Rp 1,00 modal sendiri dijamin dengan Rp 0,6214 aset yang dimiliki perusahaan. Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 hasil rasio tersebut termasuk dalam kriteria kurang sehat.

Rasio total modal sendiri terhadap total aset tahun 2019 PT PLN (Persero) mengalami penurunan kembali sebesar 3,50% dengan hasil sebesar 58,63%. Hal ini disebabkan karena total modal sendiri meningkat. Dari hasil rasio ini, dapat ditunjukkan bahwa setiap Rp 1,00 modal sendiri dijamin dengan Rp 0,5863 aset yang dimiliki perusahaan. Hasil rasio menunjukkan total modal sendiri terhadap total aset termasuk dalam kriteria sehat.

Rasio total modal sendiri terhadap total aset tahun 2020 PT PLN (Persero) mengalami peningkatan sebesar 0,51% dengan hasil sebesar 58,63%. Hal ini disebabkan karena total modal sendiri dan total aset meningkat. Dari hasil rasio ini, dapat ditunjukkan bahwa setiap Rp 1,00 modal sendiri dijamin dengan Rp 0,5863 aset yang dimiliki perusahaan. Dari hasil rasio tersebut

menunjukkan total modal sendiri terhadap total aset termasuk dalam kriteria sehat.

Rasio total modal sendiri terhadap total aset mengalami peningkatan kembali ditahun 2021 sebesar 1,71%. Dari hasil rasio ini, dapat ditunjukkan bahwa setiap Rp 1,00 modal sendiri dijamin dengan Rp 0,6085 aset yang dimiliki perusahaan. Walaupun total modal sendiri terhadap total aset di tahun 2020 mengalami kenaikan, namun hasil rasio tersebut termasuk dalam kriteria kurang sehat.

3. Rasio Aktivitas

a. *Collection periods*

Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-100/MBU/2002, *collection periods* dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$\textit{Collection periods} = \frac{\textit{Piutang Usaha}}{\textit{Pendapatan Usaha}} \times 365 \textit{ hari}$$

Adapun hasil *collection periods* yang didapatkan melalui data laporan posisi keuangan dan laba rugi PT PLN (Persero) sebagai berikut.

Tabel 4. 4
Hasil Perhitungan Collection Periods
(Rp 000.000)

Tahun	Piutang Usaha	Pendapatan Usaha	Collection Periods	Naik/turun
2017	22.466.843	255.295.243	32,12 hari	
2018	23.802.663	272.897.742	31,84 hari	0,3 hari
2019	25.130.538	285.640.589	32,11 hari	-0,3 hari
2020	21.278.416	345.415.637	22,48 hari	9,6 hari
2021	23.802.386	368.174.270	23,60 hari	-1,1 hari

Sumber: Lampiran 9

Tabel diatas dapat menunjukakn kondisi kinerja keuangan berdasarkan rasio aktivitas pada PT PLN (Persero) khususnya *collection periods* adalah sebagai berikut.

Tahun 2017 *collection periods* PT PLN (Persero) adalah sebesar 32,12 hari. Dari hasil rasio ini, dapat ditunjukkan bahwa perusahaan membutuhkan waktu 32,12 hari untuk mengumpulkan piutang usaha. Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 hasil rasio tersebut termasuk dalam kriteria sehat.

Tahun 2018 *collection periods* PT PLN (Persero) mengalami peningkatan sebesar 0,3 hari dengan hasil sebesar 31,84 hari. Hal ini disebabkan karena piutang usaha dan pendapatan usaha meningkat. Dari hasil rasio ini, dapat ditunjukkan bahwa perusahaan membutuhkan waktu 31,84 hari untuk mengumpulkan piutang usaha. Berdasarkan Keputusan

Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 hasil rasio tersebut termasuk dalam kriteria sehat.

Tahun 2019 *collection periods* PT PLN (Persero) mengalami penurunan sebesar 0,3 hari dengan hasil sebesar 32,11 hari. Hal ini disebabkan karena piutang usaha meningkat dan pendapatan usaha meningkat. Dari hasil rasio ini, dapat ditunjukkan bahwa perusahaan membutuhkan waktu 32,11 hari untuk mengumpulkan piutang usaha. Walaupun *collection period* di tahun 2019 mengalami penurunan, namun berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 hasil rasio tersebut termasuk dalam kriteria sehat.

Tahun 2020 *collection periods* PT PLN (Persero) mengalami kenaikan sebesar 9,6 hari dengan hasil sebesar 22,48 hari. Dari hasil rasio ini, dapat ditunjukkan bahwa perusahaan membutuhkan waktu 22,48 hari untuk mengumpulkan piutang usaha dan berdasarkan rasio ini menunjukkan bahwa *collection periods* termasuk dalam kriteria sehat.

Tahun 2021 kinerja keuangan PT PLN (Persero) melalui *collection periods* mengalami penurunan sebesar 1,1 hari dengan hasil sebesar 23,60 hari. Dari hasil rasio ini, dapat ditunjukkan bahwa perusahaan membutuhkan waktu 23,60 hari untuk mengumpulkan piutang usaha. Walaupun *collection periods* di tahun 2021 mengalami penurunan, namun berdasarkan

Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 hasil rasio tersebut termasuk dalam kriteria sehat.

b. Perputaran persediaan

Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-100/MBU/2002, perputaran persediaan dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{Perputaran persediaan} = \frac{\text{Persediaan}}{\text{Pendapatan Usaha}} \times 365 \text{ hari}$$

Adapun hasil perputaran persediaan yang didapatkan melalui data laporan posisi keuangan dan laba rugi PT PLN (Persero) sebagai berikut.

Tabel 4. 5
Hasil Perhitungan Perputaran Persediaan
(Rp 000.000)

Tahun	Persediaan	Pendapatan Usaha	Perputaran Persediaan	Naik/turun
2017	12.828.118	255.295.243	18,34 hari	
2018	15.506.567	272.897.742	20,74 hari	-2,40 hari
2019	12.934.233	285.640.589	16,53 hari	4,21 hari
2020	10.277.289	345.415.637	10,86 hari	5,67 hari
2021	10.393.419	368.174.270	10,30 hari	0,56 hari

Sumber: Lampiran 10

Tabel diatas menunjukkkn kondisi kinerja keuangan berdasarkan rasio aktivitas pada PT PLN (Persero) khususnya perputaran persediaan yaitu sebagai berikut.

Tahun 2017 PT PLN (Persero) memperoleh perputaran persediaan sebesar 18,34 hari. Dari hasil rasio ini, dapat

menunjukkan bahwa dana yang ditanam dalam persediaan selama 18,34 hari sebelum diputar kembali menjadi pendapatan. Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 hasil rasio tersebut termasuk dalam kriteria sehat.

Perputaran persediaan PT PLN (Persero) tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 2,40 hari dengan hasil sebesar 20,74 hari. Hal ini disebabkan karena persediaan meningkat dan pendapatan usaha meningkat. Dari hasil rasio ini, dapat ditunjukkan bahwa dana yang ditanam dalam persediaan selama 20,74 hari sebelum diputar kembali menjadi pendapatan. Walaupun perputaran persediaan di tahun 2018 mengalami penurunan, namun berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 hasil rasio tersebut termasuk dalam kriteria sehat.

Perputaran persediaan tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 4,21 hari dengan hasil sebesar 16,53 hari. Hal ini disebabkan karena persediaan menurun dan pendapatan usaha meningkat. Dari hasil rasio ini, dapat ditunjukkan bahwa dana yang ditanam dalam persediaan selama 16,53 hari sebelum diputar kembali menjadi pendapatan. Dari hasil rasio ini menunjukkan rasio tersebut termasuk dalam kriteria sehat.

Perputaran persediaan PT PLN (Persero) tahun 2020 mengalami peningkatan kembali, dengan peningkatan sebesar

5,67 hari dengan hasil sebesar 10,86 hari. Hal ini disebabkan karena persediaan menurun dan pendapatan usaha meningkat. Dari hasil rasio ini, menunjukkan bahwa dana yang ditanam dalam persediaan selama 10,86 hari sebelum diputar kembali menjadi pendapatan. Hasil rasio tersebut termasuk dalam kriteria sehat.

Perputaran persediaan PT PLN (Persero) tahun 2021 mengalami peningkatan kembali sebesar 0,56 hari dengan hasil sebesar 10,3 hari. Hal ini disebabkan karena persediaan menurun dan pendapatan usaha meningkat. Dari hasil rasio ini, dapat ditunjukkan bahwa dana yang ditanam dalam persediaan selama 10,3 hari sebelum diputar kembali menjadi pendapatan. Dari hasil rasio ini menunjukkan rasio tersebut termasuk dalam kriteria sehat.

c. Perputaran Total Aset

Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-100/MBU/2002, perputaran total aset dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{Perputaran total aset} = \frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Adapun hasil perputaran total aset yang didapatkan melalui data laporan posisi keuangan dan laba rugi PT PLN (Persero) sebagai berikut.

Tabel 4. 6
Hasil Perhitungan Perputaran Total Aset
(Rp 000.000)

Tahun	Total Pendapatan	Total Aset	Perputaran Total Aset	Naik/turun
2017	259.289.542	1.334.957.657	19,42%	
2018	284.123.096	1.492.487.745	19,04%	-0,39%
2019	288.801.935	1.585.055.013	18,22%	-0,82%
2020	350.117.731	1.589.059.781	22,03%	3,81%
2021	373.167.858	1.613.216.456	23,13%	1,10%

Sumber: Lampiran 11

Tabel diatas dapat menunjukakn kondisi kinerja keuangan berdasarkan rasio aktivitas pada PT PLN (Persero) khususnya perputaran total aset sebagai berikut.

Tahun 2017 PT PLN (Persero) memperoleh rasio perputaran total aset sebesar 19,42%. Dari hasil rasio ini, dapat ditunjukkan bahwa setiap Rp 1,00 aset dapat menghasilkan pendapatan sebesar Rp 0,1942. Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 hasil rasio tersebut termasuk dalam kriteria kurang sehat.

Perpuataran total aset tahun 2018 PT PLN (Persero) mengalami penurunan sebesar 0,39 sebesar 19,04%. Hal ini disebabkan karena total pendapatan dan total aset meningkat. Dari hasil rasio ini, dapat ditunjukkan bahwa setiap Rp 1,00 aset dapat menghasilkan pendapatan sebesar Rp 0,1904. Perputaran total aset di tahun 2018 mengalami penurunan dan hasil rasio tersebut termasuk dalam kriteria kurang sehat.

Perputaran total aset tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,82% dengan hasil sebesar 18,22%. Hal ini disebabkan karena total pendapatan dan total aset meningkat. Dari hasil rasio ini, dapat ditunjukkan bahwa setiap Rp 1,00 aset dapat menghasilkan pendapatan sebesar Rp 0,1822. Perputaran total aset di tahun 2019 mengalami penurunan kembali dan hasil rasio tersebut termasuk dalam kriteria kurang sehat.

Perputaran total aset tahun 2020 PT PLN (Persero) mengalami kenaikan sebesar 3,81% dengan hasil sebesar 22,03%. Hal ini disebabkan karena total pendapatan dan total aset meningkat. Dari hasil rasio ini, dapat ditunjukkan bahwa setiap Rp 1,00 aset dapat menghasilkan pendapatan sebesar Rp 0,2203. Walaupun perputaran total aset di tahun 2020 mengalami kenaikan, namun berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 hasil rasio tersebut termasuk dalam kriteria kurang sehat.

Perputaran total aset tahun 2021 PT PLN (Persero) mengalami peningkatan kembali sebesar 1,10 dengan hasil sebesar 23,13%. Hal ini disebabkan karena total pendapatan dan total aset meningkat. Dari hasil rasio ini, dapat ditunjukkan bahwa setiap Rp 1,00 aset dapat menghasilkan pendapatan sebesar Rp 0,2313. Walaupun perputaran total aset di tahun 2020 mengalami kenaikan kembali, namun berdasarkan Keputusan Menteri

BUMN No. KEP-100/MBU/2002 hasil rasio tersebut termasuk dalam kriteria kurang sehat.

4. Rasio Rentabilitas

a. *Return On Equity*

Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-100/MBU/2002, *return on equity* dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{Return on equity} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

Adapun hasil *return on equity* yang didapatkan melalui data laporan posisi keuangan dan laba rugi PT PLN (Persero) sebagai berikut.

Tabel 4. 7
Hasil Perhitungan *Return on Equity* (ROE)
(Rp 000.000)

Tahun	Laba setelah pajak	Modal Sendiri	ROE	Naik/turun
2017	4.428.117	869.416.604	0,51%	
2018	11.575.756	927.413.857	1,25%	0,74%
2019	4.322.130	929.380.413	0,47%	-0,78%
2020	5.993.428	939.812.592	0,64%	0,17%
2021	13.174.877	981.607.123	1,34%	0,70%

Sumber: Lampiran 12

Tabel diatas menunjukkan kondisi kinerja keuangan berdasarkan rasio rentabilitas pada PT PLN (Persero) khususnya *return on equity* yaitu sebagai berikut:

Tahun 2017 PT PLN (Persero) memperoleh *return on equity* sebesar 0,51%. Dari hasil rasio ini, dapat ditunjukkan bahwa setiap Rp 1,00 modal sendiri dapat menghasilkan laba setelah pajak sebesar Rp 0,0051. Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 hasil rasio tersebut termasuk dalam kriteria kurang sehat.

Return on equity PT PLN (Persero) tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 0,74 dengan hasil sebesar 1,25%. Hal ini disebabkan karena laba setelah pajak meningkat. Dari hasil rasio ini, dapat ditunjukkan bahwa setiap Rp 1,00 modal sendiri dapat menghasilkan laba setelah pajak sebesar Rp 0,0125. Walaupun *return on equity* di tahun 2018 mengalami kenaikan, namun berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 hasil rasio tersebut termasuk dalam kriteria kurang sehat.

Return on equity PT PLN (Persero) tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,78 dengan hasil sebesar 0,47%. Hal ini disebabkan karena laba setelah pajak menurun. Dari hasil rasio ini, dapat ditunjukkan bahwa setiap Rp 1,00 modal sendiri dapat menghasilkan laba setelah pajak sebesar Rp 0,0047. *Return on equity* di tahun 2019 mengalami penurunan dan hasil rasio tersebut termasuk dalam kriteria kurang sehat.

Di tahun 2020, *return on equity* PT PLN (Persero) mengalami kenaikan sebesar 0,17% dengan hasil sebesar 0,64%. Hal ini disebabkan karena laba setelah pajak meningkat. Dari hasil rasio ini, dapat ditunjukkan bahwa setiap Rp 1,00 modal sendiri dapat menghasilkan laba setelah pajak sebesar Rp 0,0064. Walaupun *return on equity* di tahun 2020 mengalami kenaikan, namun berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 hasil rasio tersebut termasuk dalam kriteria kurang sehat.

Return on equity PT PLN (Persero) tahun 2021 mengalami kenaikan kembali sebesar 0,70% dengan hasil sebesar 1,34%. Hal ini disebabkan karena laba setelah pajak meningkat. Dari hasil rasio ini, dapat ditunjukkan bahwa setiap Rp 1,00 modal sendiri dapat menghasilkan laba setelah pajak sebesar Rp 0,0134. Walaupun *return on equity* di tahun 2021 mengalami kenaikan kembali, namun berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 hasil rasio tersebut termasuk dalam kriteria

kurang sehat.

b. *Return on Investment*

Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-100/MBU/2002, *return on investment* dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{Return on investment} = \frac{\text{EBIT} + \text{Penyusutan}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Adapun hasil *return on investment* yang didapatkan melalui data laporan posisi keuangan dan laba rugi PT PLN (Persero) sebagai berikut.

Tabel 4. 8
Hasil Perhitungan Return on Investment
(Rp 000.000)

Tahun	EBIT	Penyusutan	Total Aset	ROI	Naik/ Turun
2017	8.544.072	29.160.597	1.334.957.657	2,82%	
2018	19.900.838	30.744.712	1.492.487.745	3,39%	0,57%
2019	26.119.210	35.318.071	1.585.055.013	3,88%	0,48%
2020	12.291.919	39.578.293	1.589.059.781	3,26%	-0,61%
2021	23.221.084	42.226.789	1.613.216.456	4,06%	0,79%

Sumber: Lampiran 13

Tabel diatas dapat menunjukkan kondisi kinerja keuangan berdasarkan rasio keuangan PT PLN (Persero) khususnya *return on investment* yaitu sebagai berikut.

Tahun 2017 PT PLN (Persero) memperoleh *return on investment* sebesar 2,82%. Dari hasil rasio ini, dapat ditunjukkan bahwa setiap Rp 1,00 modal yang ditanam dalam aktiva akan menghasilkan keuntungan sebesar Rp 0,0282. Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 hasil rasio tersebut termasuk dalam kriteria kurang sehat.

Return on investment di tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 0,57% dengan hasil sebesar 3,39%. Hal ini disebabkan karena EBIT meningkat. Dari hasil rasio ini, dapat ditunjukkan bahwa setiap Rp 1,00 modal yang ditanam dalam

aktiva akan menghasilkan keuntungan sebesar Rp 0,0339. Walaupun *return on investment* di tahun 2018 mengalami kenaikan, namun berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 hasil rasio tersebut termasuk dalam kriteria kurang sehat.

Tahun 2019 *return on investment* mengalami peningkatan kembali sebesar 0,48% dengan hasil sebesar 3,88%. Hal ini disebabkan karena EBIT mengalami peningkatan. Dari hasil rasio ini, dapat ditunjukkan bahwa setiap Rp 1,00 modal yang ditanam dalam aktiva akan menghasilkan keuntungan sebesar Rp 0,0388. Walaupun *return on investment* di tahun 2019 mengalami kenaikan, namun berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 hasil rasio tersebut termasuk dalam kriteria kurang sehat.

Tahun 2020 *return on investment* mengalami penurunan sebesar 0,61% dengan hasil sebesar 3,26%. Hal ini disebabkan karena EBIT menurun. Dari hasil rasio ini, menunjukkan bahwa setiap Rp 1,00 modal yang ditanam dalam aktiva akan menghasilkan keuntungan sebesar Rp 0,0326. Hasil rasio tersebut termasuk dalam kriteria kurang sehat.

Tahun 2021 *return on investment* yang diperoleh PT PLN (Persero) mengalami peningkatan sebesar 0,79% dengan hasil sebesar 4,06%. Hal ini disebabkan karena EBIT meningkat. Dari

hasil rasio ini, dapat ditunjukkan bahwa setiap Rp 1,00 modal yang ditanam dalam aktiva akan menghasilkan keuntungan sebesar Rp 0,0406. Walaupun terjadi kenaikan di tahun 2021, namun berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 hasil rasio tersebut termasuk dalam kriteria kurang sehat.

5. Predikat Kesehatan Kinerja Keuangan PT PLN (Persero)

a. Tahun 2017

Tabel 4. 9

Predikat Kesehatan Kinerja Keuangan PT PLN (Persero)

Tahun 2017

Rasio	Hasil	Skor	Bobot
Rasio Likuiditas			
Rasio kas	30,41%	2,5	3
Rasio lancar	67,44%	0	4
Rasio Solvabilitas			
TMS terhadap TA	65,13%	4,5	6
Rasio Aktivitas			
<i>Collection periods</i>	32,12 hari	4	4
Perputaran persediaan	18,34 hari	4	4
Perputaran total aset	19,42%	1	4
Rasio Rentabilitas			
<i>Return on Equity</i>	0,51%	1,5	10
<i>Return on Investment</i>	2,82%	2,5	15
Total skor		19,5	50
Ekuivalen BUMN Infra		50%	
Total skor penilaian tingkat kesehatan (Total skor : ekuivalen)		39	

Sumber: Lampiran 14

Setelah seluruh analisis dilakukan, diperoleh hasil kinerja keuangan PT PLN (Persero) tahun 2017 dengan total skor penilaian tingkat kesehatan sebesar 39. Total skor ini didapatkan dari pembagian total skor aspek keuangan sebesar 19,5 dengan ekuivalen sebesar 50%. Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002, skor tersebut mendapat predikat B yaitu kurang sehat ($30 < TS \leq 40$).

b. Tahun 2018

Tabel 4. 10
Predikat Kesehatan Kinerja Keuangan PT PLN (Persero)
Tahun 2018

Rasio	Hasil	Skor	Bobot
Rasio Likuiditas			
Rasio kas	21,09%	2	3
Rasio lancar	71,83%	0	4
Rasio Solvabilitas			
TMS terhadap TA	62,14%	4,5	6
Rasio Aktivitas			
<i>Collection periods</i>	31,84 hari	4	4
Perputaran persediaan	20,74 hari	4	4
Perputaran total aset	19,04%	0,5	4
Rasio Rentabilitas			
<i>Return on Equity</i>	1,25%	3	10
<i>Return on Investment</i>	3,39%	3	15
Total skor		21	50
Ekuivalen BUMN Infra		50%	
Total skor penilaian tingkat kesehatan (Total skor : ekuivalen)		42	

Sumber: Lampiran 15

Setelah seluruh analisis dilakukan, diperoleh hasil kinerja keuangan PT PLN (Persero) tahun 2018 dengan total skor penilaian tingkat kesehatan sebesar 42. Total skor penilaian tingkat kesehatan ini didapatkan dari pembagian total skor aspek keuangan sebesar 21 dengan ekuivalen sebesar 50%. Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/200, skor tersebut mendapat predikat BB, kurang sehat ($40 < TS \leq 50$).

c. Tahun 2019

Tabel 4. 11
Predikat Kesehatan Kinerja Keuangan PT PLN (Persero)
Tahun 2019

Rasio	Hasil	Skor	Bobot
Rasio Likuiditas			
Rasio kas	29,25%	2,5	3
Rasio lancar	95,02%	1	4
Rasio Solvabilitas			
TMS terhadap TA	58,63%	5	6
Rasio Aktivitas			
<i>Collection periods</i>	32,11 hari	4	4
Perputaran persediaan	16,53 hari	4	4
Perputaran total aset	18,22%	0,5	4
Rasio Rentabilitas			
<i>Return on Equity</i>	0,47%	1,5	10
<i>Return on Investment</i>	3,88%	3	15
Total skor		21,5	50
Ekuivalen BUMN Infra		50%	
Total skor penilaian tingkat kesehatan (Total skor : ekuivalen)		43	

Sumber: Lampiran 16

Setelah seluruh analisis dilakukan, diperoleh hasil kinerja keuangan PT PLN (Persero) tahun 2019 dengan total skor penilaian tingkat kesehatan sebesar 43. Total skor penilaian tingkat kesehatan ini didapatkan dari pembagian total skor aspek keuangan 21,5 dengan ekuivalen sebesar 50%. Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002, skor tersebut mendapat predikat BB, kurang sehat ($40 < TS \leq 50$).

d. Tahun 2020

Tabel 4. 12
Predikat Kesehatan Kinerja Keuangan PT PLN (Persero)
Tahun 2020

Rasio	Hasil	Skor	Bobot
Rasio Likuiditas			
Rasio kas	36,57%	3	3
Rasio lancar	64,92%	0	4
Rasio Solvabilitas			
TMS terhadap TA	59,14%	5	6
Rasio Aktivitas			
<i>Collection periods</i>	22,48 hari	4	4
Perputaran persediaan	10,86 hari	4	4
Perputaran total aset	22,03%	1	4
Rasio Rentabilitas			
<i>Return on Equity</i>	0,64%	1,5	10
<i>Return on Investment</i>	3,26%	3	15
Total skor		21,5	50
Ekuivalen BUMN Infra		50%	
Total skor penilaian tingkat kesehatan (Total skor : ekuivalen)		43	

Sumber: Lampiran 17

Setelah seluruh analisis dilakukan, diperoleh hasil kinerja keuangan PT PLN (Persero) tahun 2020 dengan perolehan total skor sebesar 43. Total skor penilaian tingkat kesehatan tersebut didapatkan dari pembagian total skor aspek keuangan sebesar 21,5 dengan ekuivalen sebesar 50%. Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002, skor tersebut mendapat predikat BB yaitu kurang sehat ($40 < TS \leq 50$).

e. Tahun 2021

Tabel 4. 13
Predikat Kesehatan Kinerja Keuangan PT PLN (Persero)
Tahun 2021

Rasio	Hasil	Skor	Bobot
Rasio Likuiditas			
Rasio kas	25,91%	2,5	3
Rasio lancar	58,63%	0	4
Rasio Solvabilitas			
TMS terhadap TA	60,85%	4,5	6
Rasio Aktivitas			
<i>Collection periods</i>	23,60 hari	4	4
Perputaran persediaan	10,30 hari	4	4
Perputaran total aset	23,13%	1	4
Rasio Rentabilitas			
<i>Return on Equity</i>	1,34%	1	10
<i>Return on Investment</i>	4,06%	2,5	15
Total skor		22	50
Ekuivalen BUMN Infra		50%	
Total skor penilaian tingkat kesehatan (Total skor : ekuivalen)		44	

Sumber: Lampiran 18

Setelah seluruh analisis dilakukan, diperoleh hasil kinerja keuangan PT PLN (Persero) pada tahun 2021 dari seluruh indikator rasio mendapatkan total skor penilaian tingkat kesehatan sebesar 44. Total skor penilaian tingkat kesehatan ini didapatkan dari total skor aspek keuangan sebesar 22 dibagi dengan ekuivalen sebesar 50%. Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002, skor tersebut mendapat predikat BB yaitu kurang sehat ($40 < TS \leq 50$).

B. Pembahasan dan Temuan

Hasil penelitian kinerja keuangan pada PT PLN (Persero) selama periode tahun 2017-2021 dari sisi likuiditas yaitu *cash ratio* mendapatkan hasil rasio 30,41%, 21,09%, 29,25%, 36,57%, dan 25,91%, dari hasil tersebut menunjukkan tren penurunan di tahun 2021 namun masih termasuk dalam kriteria sehat yang artinya bahwa PT PLN (Persero) memiliki kas dan setara kas yang cukup untuk menjamin pembayaran utang lancarnya dengan skor tingkat kesehatan berada pada 2 di tahun 2018, skor 2,5 di tahun 2017, 2019, dan 2021 serta skor 3 di tahun 2020. Tahun 2018 memiliki skor dan hasil rasio terendah, hal ini disebabkan karena tingkat kas dan setara kas menurun namun liabilitas jangka pendek meningkat. Dari sisi *current ratio* mendapatkan hasil 67,44%, 71,83%, 95,02%, 64,92%, dan 58,63% dengan skor tingkat kesehatan 0 di tahun 2017, 2018, 2020, dan 2021 serta skor 1 di tahun 2019 hasil tersebut menunjukkan tren kenaikan di tahun 2017-2019 dan penurunan di tahun 2020-2021, hasil tersebut termasuk dalam kriteria kurang sehat. Hal

ini dikarenakan nilai dari utang lancar tidak dapat diseimbangkan dengan baik oleh aset lancar. Dengan kata lain, PT PLN (Persero) perlu meningkatkan aset lancar yang dimiliki dan menekan liabilitas jangka pendek atau utang lancar. Cara meningkatkan aset lancar ini adalah dengan meningkatkan penjualan yang dapat dikonversikan menjadi kas. Maka dari itu dari kinerja keuangan PT PLN (Persero) 2017-2021 dari sisi likuiditas, dapat dikatakan kurang sehat.

Kinerja keuangan dari sisi solvabilitas yakni total modal sendiri terhadap total aset pada tahun 2017 hingga 2021 memperoleh hasil 65,13%, 62,14%, 58,63%, 59,14%, dan 60,85% dengan skor tingkat kesehatan sebesar 4,5 di tahun 2017, 2018, dan 2021 dan skor 5 di tahun 2019, 2020. Hal tersebut terjadi karena di tahun 2017 dan 2018 terdapat tambahan modal disetor yang cukup tinggi dibandingkan dengan tahun yang lainnya dan terdapat peningkatan saldo laba yang tidak ditentukan penggunaannya di tahun 2018. Dan di tahun 2021 tingkat saldo laba yang ditentukan penggunaannya dan tidak ditentukan penggunaannya mengalami peningkatan. Melalui hasil rasio tersebut menunjukkan tren kenaikan namun berada dalam kriteria kurang sehat. Untuk memperbaiki tingkat kesehatan rasio solvabilitas, PT PLN (Persero) perlu mengoptimalkan aset yang dimiliki untuk menjamin modal sendiri.

Kinerja keuangan dari rasio aktivitas yaitu *collection periods* pada tahun 2017-2021 berada pada kriteria sehat dengan hasil 32,12 hari, 31,84 hari, 32,11 hari, 22,48 hari, dan 23,60 hari dengan skor tingkat Kesehatan

sebesar 4. Hal ini menunjukkan bahwa PT PLN (Persero) cukup baik dalam melaksanakan kolektabilitas piutang usaha agar berputar produktif terhadap pendapatan usahanya. Namun di tahun 2017-2019, tingkat *collection periods* berada pada tingkat paling rendah atau dapat dikatakan lebih lama dibandingkan dengan tahun 2020-2021 karena tingkat piutang usaha yang tinggi, dan agar tidak terjadi kejadian yang sama PT PLN (Persero) perlu melakukan penegasan terhadap penagihan piutang-piutangnya. Berikutnya pada perputaran persediaan tahun 2017-2021 memperoleh hasil 18,34 hari, 20,74 hari, 16,53 hari, 10,86 hari, dan 10,30 hari dengan skor tingkat kesehatan 4 yang menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam kriteria sehat. Namun di tahun 2017-2019, tingkat perputaran persediaan berada pada tingkat paling rendah atau dapat dikatakan lebih lama dibandingkan dengan tahun 2020-2021, hal ini disebabkan karena jumlah persediaan tahun 2017-2019 yang tinggi dan tingkat pendapatan usaha yang rendah. Dari sisi perputaran total aset PT PLN (Persero) tahun 2017-2021 berada dalam kriteria kurang sehat dengan skor tingkat kesehatan sebesar 0,5 di tahun 2017-2019 dan skor 1 di tahun 2020-2021. Hal tersebut disebabkan karena tingkat aset yang dimiliki cukup tinggi tetapi tidak diseimbangi oleh pendapatan yang diterima. Hal ini mengindikasikan perusahaan belum dapat memaksimalkan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Dari hal tersebut, PT PLN (Persero) perlu mengoptimalkan penggunaan aset untuk meningkatkan jumlah pendapatan usaha maupun pendapatan non usaha.

Kinerja keuangan dari sisi rentabilitas yaitu *return on equity* (ROE) PT PLN (Persero) pada tahun 2017-2021 walaupun hasil rasio menunjukkan tren peningkatan, namun hasil rasio ini berada dalam kriteria kurang sehat. Hal ini disebabkan karena laba setelah pajak yang diperoleh lebih kecil daripada jumlah modal sendiri yang dimiliki. Artinya, PT PLN (Persero) belum mengoptimalkan modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan khususnya pada laba setelah pajak. Lalu hal yang sama juga terjadi pada *return on investment* (ROI), walaupun selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya namun berada dalam kriteria kurang sehat. Artinya, PT PLN (Persero) belum memaksimalkan aset yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan khususnya pada EBIT (*Earning Before Interest and Tax*). Dalam meningkatkan rentabilitas perusahaan, sebaiknya PT PLN (persero) harus meningkatkan pendapatan usaha melalui penjualan dan menekan biaya-biaya serta mengoptimalkan penggunaan modal sendiri.

PT PLN (Persero) pada tahun 2017-2021 berturut-turut mendapatkan kriteria kurang sehat dengan predikat tingkat kesehatan B di tahun 2017 dan predikat tingkat kesehatan BB di tahun 2018-2021. Secara keseluruhan pada tahun 2017-2021 berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 mendapatkan kriteria kurang sehat dengan perolehan skor penilaian tingkat kesehatan kinerja keuangan sebesar 39, 42, 43, 43, dan 44. Tren tersebut menunjukkan bahwa PT PLN (Persero) mengalami peningkatan kinerja keuangan.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada penilaian kinerja. Penilaian kesehatan kinerja pada penelitian ini hanya berfokus pada aspek keuangan berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 tanpa mempertimbangkan aspek yang lain seperti aspek operasional dan aspek administrasi di perusahaan BUMN.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Hasil analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa penilaian kinerja keuangan yang diperoleh pada PT PLN (Persero) tahun 2017-2021 tidak mengalami perubahan yang sangat tinggi. Skor yang diperoleh pada tahun 2017 yaitu 39, yang artinya perusahaan berada dalam kriteria kurang sehat dengan predikat B, pada tahun 2018 yaitu 42 yang artinya perusahaan berada dalam kriteria kurang sehat dengan predikat BB, pada tahun 2019 dan 2020 memiliki skor yang sama yaitu 43 yang artinya perusahaan dalam kriteria kurang sehat dengan predikat BB, dan pada tahun 2021 yaitu 44 yang artinya perusahaan berada dalam kriteria kurang sehat dengan predikat BB. Hal tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Kinerja keuangan dari sisi rasio likuiditas menunjukkan kinerja keuangan PT PLN (Persero) dalam kriteria kurang sehat yang dimana dari sisi *cash ratio* menunjukkan tren penurunan di tahun 2021 dan hasil tersebut menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam kriteria yang sehat. Dari sisi *current ratio* menunjukkan tren penurunan namun menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam kriteria yang kurang sehat. Kinerja keuangan dari sisi rasio solvabilitas dari sisi total modal sendiri terhadap total aset menunjukkan tren kenaikan dan hasil tersebut menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam kriteria yang cukup

sehat. Rasio aktivitas dari sisi *collection periods* menunjukkan tren penurunan kinerja namun dengan demikian hasil tersebut menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam kriteria yang sehat. Dari sisi perputaran persediaan menunjukkan tren peningkatan dan hasil tersebut menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam kriteria yang sehat. Dilihat dari sisi perputaran total aset menunjukkan tren peningkatan, namun berada dalam kriteria yang kurang sehat. Rasio rentabilitas dari sisi *return on equity* (ROE) menunjukkan peningkatan namun dalam kriteria kurang sehat. Dilihat dari sisi *return on investment* (ROI) menunjukkan tren peningkatan namun berada dalam kriteria kurang sehat.

2. Dalam meningkatkan kinerja keuangan dari sisi rasio rentabilitas perusahaan perlu mengoptimalkan penggunaan aset serta mengoptimalkan penggunaan modal sendiri. Selain itu perusahaan perlu menekan biaya-biaya dan menekan tingkat utang atau liabilitas, baik liabilitas jangka pendek maupun jangka panjang untuk meningkatkan rasio likuiditas, dan rasio aktivitas perusahaan.

B. Implikasi

Penelitian ini berimplikasi pada PT PLN (Persero), dimana dengan dilakukannya analisis kinerja keuangan maka PT PLN (Persero) dapat mengetahui keadaan keuangan yang ada serta menguraikan pos-pos yang ada dalam laporan laporan posisi keuangan dan laba rugi menjadi suatu informasi yang lebih jelas dan rinci, sehingga dapat dilihat hubungan secara signifikan

atau memiliki arti antara yang satu dengan yang lain, baik antara data kualitatif maupun kuantitatif. Dengan adanya analisis laporan keuangan tersebut tentunya akan diperoleh gambaran serta informasi tentang kinerja keuangan perusahaan untuk pengambilan kebijakan dan keputusan secara ekonomi oleh manajer perusahaan.

C. Saran

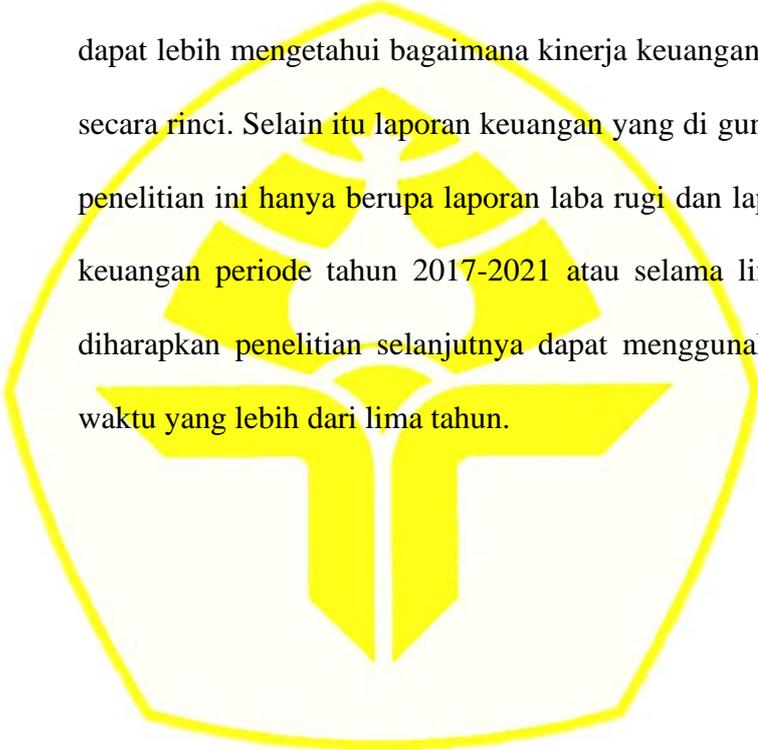
Adapun saran yang dapat diberikan adalah:

1. Bagi Perusahaan

- a. Pembayaran piutang oleh konsumen atau pihak yang berelasi dengan pemerintah dan pihak ketiga atas tagihan listrik merupakan salah satu cara yang dapat meningkatkan rasio aktivitas perusahaan. Agar terhindar dari piutang tak tertagih, solusi yang dapat diberikan yaitu dengan melakukan *monitoring*, memberikan surat teguran, dan memberikan sanksi.
- b. Perusahaan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal penyediaan tenaga listrik yang memadai di seluruh wilayah di Indonesia.
- c. Perusahaan diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan modal sendiri dan total aset.
- d. PT PLN (Persero) diharapkan dapat menekan atau mengurangi jumlah liabilitas atau utang.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat meningkatkan penelitian dengan menambahkan aspek yang diteliti seperti pada aspek operasional dan aspek administrasi serta menambah dasar penilaian seperti menggunakan *Balanced Scorecard*. Hal ini dikarenakan agar dapat lebih mengetahui bagaimana kinerja keuangan perusahaan secara rinci. Selain itu laporan keuangan yang di gunakan dalam penelitian ini hanya berupa laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan periode tahun 2017-2021 atau selama lima periode, diharapkan penelitian selanjutnya dapat menggunakan periode waktu yang lebih dari lima tahun.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia, A. (2021). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Perusahaan Dengan Standar BUMN Pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan. *Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains*, 2(2), 1-89.
- Aldira, Firda M. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Jimbaraya Tahun 2018-2020.
- Fahmi, Irham. (2017). *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Faisal, Samben, & Pattisahusiwa. (2017). *Analisis Kinerja: Kinerja Keuangan. Jurnal Ekonomi & Manajemen*, 14(1), 6-15.
- Gavinanda, A. P., Alamsyah, Z., & Nainggolan, S. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Koperasi Unit Desa di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat. *Jurnal Sosio Ekonomika Bisnis*, 20(1), 1-12. <https://doi.org/10.22437/jiseb.v20i1.5039>.
- Hanafi, M. M., & Halim, A. (2016). Analisis laporan keuangan (5th ed.). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Harahap, S. S. (2016). *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2019). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara.
- Lafera, D. (2020). Analisis Kinerja Keuangan PT PLN (Persero) Tahun 2017-2018. *Journal of Social and Economics Research*, 2(2), 61-68.
- Munawir, S. (2014). *Analisa Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty.
- Nurafni, I., & Ibrahim, M. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pada PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagut Sektor Pembangkitan Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Sosial dan Ilmu Politik*, 8(1), 1-13.
- Purba, R., Hasibuan, R., & Syam, P. A. (2021). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Periode 2013-2017. *Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 5(2), 545-555. <https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.452>.
- Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 0076.P/DIR/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN (Persero)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1972 tentang Perusahaan Umum Listrik Negara.

- Rahmayuni, S. (2017). Peranan laporan keuangan dalam menunjang peningkatan pendapatan pada UKM. *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 1(1), 93. <https://doi.org/10.32487/jshp.v1i1.239>
- Rantau, K. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Swadaya Di Desa Banyuning Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng. 1- 41.
- Suraya, A., & Meylani, S. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pada PT Gas Negara Tbk Periode 2013 – 2017. *Jurnal Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi*, 2(3), 101-115. <http://dx.doi.org/10.32493/skt.v2i3.2794>.
- Susilawati, Purwoko, A., & Falefi, R. (2020). *Impact of COVID-19's Pandemic on the Economy of Indonesia. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal) Humanities and Social Sciences*, 3(2), 1147-1156. <https://doi.org/10.33258/birci.v3i2.954>.
- Sutrisno. (2017). *Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: EKONESIA.
- Szydelko, A., & Biadacz, R. (2016). The role of financial statement in performance management. *Modern Management Review*, (December 2016). <https://doi.org/10.7862/rz.2016.mmr.55>
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Wahyuningsih, N. M., Rantau, I. K., & Sri Yudhari, I. A. (2018). Analisis Kinerja Keuangan KUD Werdhi Mendala Di Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar. *Jurnal Agribisnis dan Agrowisata (Journal of Agribusiness and Agritourism)*, 7(1), 132-140. <https://doi.org/10.24843/JAA.2018.v07.i01.p14>.
- Wardayani, Wahyuni D.S. (2016) Analisis Return on Asset, Current Ratio dan Debt Ratio dalam Menilai Kinerja Keuangan pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) cabang Belawan. *Jurnal Ilman (Jurnal Ilmu Manajemen)*, 4(1), 59-73. <http://dx.doi.org/10.35126/ilman.v4i1.32>
- Wardiyah, M. L. (2017). *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Yudiartini, D. S., & Dharmadiaksa, I. B. (2016). Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Sektor Perbankan Di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi*, 14(2), 1183-1209.
- Yusanto, Y. (2020). Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif. *Journal of Scientific Communication (Jsc)*, 1(1), 1-13. <https://doi.org/10.31506/jsc.v1i1.7764>.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

Lampiran 1. Laporan Posisi Keuangan Tahun 2017, 2018, dan 2019

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2019 Rp	2018 Rp	2017 Rp	
ASET					ASSETS
ASET TIDAK LANCAR					NON-CURRENT ASSETS
Aset tetap	6	1,400,685,118	1,336,478,233	1,204,568,429	Property, plant and equipment
Properti investasi	7	5,283,708	5,125,448	4,723,070	Investment properties
Investasi pada entitas asosiasi	8	3,868,060	3,002,685	2,432,830	Investments in associates
Investasi pada ventura bersama	8	6,432,705	5,723,674	4,445,668	Investments in joint ventures
Aset pajak tangguhan	48	2,215,963	7,578,386	9,566,473	Deferred tax assets
Piutang pihak berelasi	9	951,643	1,031,237	237,181	Receivables from related parties
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	10	5,980,703	5,688,712	7,487,709	Restricted cash in banks and time deposits
Piutang lain-lain	17	824,545	961,377	634,949	Other receivables
Aset tidak lancar lain	11	7,445,895	13,482,762	7,064,097	Other non-current assets
Jumlah Aset Tidak Lancar		1,433,688,340	1,379,072,494	1,241,160,406	Total Non-current Assets
ASET LANCAR					CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	12	46,598,783	33,294,560	42,291,959	Cash and cash equivalents
Investasi jangka pendek	13	334,153	1,216,886	286,697	Short-term investments
Piutang usaha					Trade receivables
Pihak berelasi	14	819,836	593,646	580,993	Related parties
Pihak ketiga	14	24,310,702	23,209,017	21,885,850	Third parties
Piutang subsidi listrik	15	--	--	7,588,977	Receivables on electricity subsidy
Piutang kompensasi	16	--	23,173,464	--	Compensation receivables
Piutang lain-lain	17	47,451,084	9,507,768	1,672,237	Other receivables
Persediaan	18	12,934,233	15,506,567	12,828,118	Inventories
Pajak dibayar di muka	19	17,694,137	5,894,120	4,997,393	Prepaid taxes
Biaya dibayar di muka dan uang muka	20	1,206,785	1,007,572	1,629,609	Prepaid expenses and advances
Piutang pihak berelasi	9	4,719	5,954	5,294	Receivables from related parties
Aset lancar lain	56	72,241	5,697	30,124	Other current assets
Jumlah Aset Lancar		151,366,673	113,415,251	93,797,251	Total Current Assets
JUMLAH ASET		1,585,055,013	1,492,487,745	1,334,957,657	TOTAL ASSETS

**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI**

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

(Lanjutan)

Lampiran 1. Laporan Posisi Keuangan Tahun 2017, 2018, dan 2019

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGERA
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
(Continued)
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2019 Rp	2018 Rp	2017 Rp	
LIABILITAS DAN EKUITAS					LIABILITIES AND EQUITY
EKUITAS					EQUITY
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk					Equity attributable to owners of the parent
Modal saham - nilai nominal Rp1 per saham					Capital stock - par value of Rp1 per share
Modal dasar - masing-masing 439.000.000 saham					Authorized - 439,000,000 shares, respectively
Modal ditempatkan dan disetor penuh - masing-masing 115.181.002 saham, 109.826.526 saham, dan 109.826.526 saham per 31 Desember 2019, 2018 dan 2017	21	115,181,002	109,826,526	109,826,526	Subscribed and paid-up 115,181,002 shares, 109,826,526 shares, and 109,826,526 shares as of December 31, 2019, 2018 and 2017, respectively
Tambahan modal disetor	22	9,919,958	20,179,333	20,871,265	Additional paid-in capital
Penyertaan modal Negara dalam proses penerbitan saham	21	10,528,230	--	--	Stock subscription from Government in issuance process
Saldo laba					Retained earnings
Ditetapkan penggunaannya	21	60,334,896	52,766,610	48,665,115	Appropriated
Tidak ditentukan penggunaannya	21	70,997,731	78,251,316	71,093,240	Unappropriated
Penghasilan komprehensif lain		661,509,952	665,849,322	618,462,276	Other comprehensive income
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		928,471,789	926,873,107	868,918,422	Equity attributable to owners of the parent
Keperingan non-pengendali		908,644	540,750	498,182	Non-controlling interests
Jumlah Ekuitas		929,380,413	927,413,857	869,416,604	Total Equity
LIABILITAS JANGKA PANJANG					NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas pajak tangguhan	48	28,121,540	13,420,136	2,066,364	Deferred tax liabilities
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun					Long-term liabilities - net of current portion
Penerusan pinjaman	24	35,251,741	36,105,279	31,485,476	Two-step loans
Utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan					Government and non-bank Government financial institution loans
Pemerintah non-bank	25	4,359,569	5,343,629	6,309,173	
Utang sewa pembiayaan	26	11,568,377	14,468,336	15,713,269	Lease liabilities
Utang bank	27	184,023,820	152,965,997	116,017,364	Bank loans
Utang obligasi dan sukuk jarak	28	174,292,298	131,681,821	100,440,360	Bonds payable and sukuk/jara
Utang listrik swasta	29	6,431,448	7,115,916	7,026,434	Electricity purchase payable
Utang KIK - EBA	28	1,354,642	2,221,167	2,907,986	KIK - EBA loans
Utang pihak berelasi	30	92	1,000	794	Payable to related parties
Liabilitas imbalan kerja	50	50,838,258	43,760,226	43,559,022	Employee benefits liabilities
Utang lain-lain	32	133,662	94,427	940,153	Other payables
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		496,376,447	407,177,934	326,466,395	Total Non-current Liabilities

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

(Lanjutan)

Lampiran 1. Laporan Posisi Keuangan Tahun 2017, 2018, 2019

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
(Continued)
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/ Notes	2019 Rp	2018 Rp	2017 Rp	
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang usaha				Trade payables
Pihak berelasi	31 11,814,735	9,044,530	11,215,239	Related parties
Pihak ketiga	31 40,188,048	39,563,144	32,496,186	Third parties
Utang pajak	33 2,383,288	2,560,128	2,387,864	Taxes payable
Biaya masih harus dibayar	34 16,754,840	14,809,018	11,477,437	Accrued expenses
Uang jaminan langganan	35 14,235,879	13,465,735	12,642,333	Customers' security deposits
Utang biaya proyek	36 150,664	315,828	723,992	Project cost payable
Pendapatan ditangguhkan	23 1,049,231	929,947	1,218,400	Deferred revenue
Utang jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun				Current maturities of long-term liabilities
Penerusan pinjaman dan lembaga keuangan	24 2,725,805	2,530,273	2,735,992	Two-step loans Government and non-bank institution loans
Pemerintah non-bank	25 1,998,476	1,860,649	1,043,793	Government financial institution loans
Utang sewa pembiayaan	26 2,540,107	2,624,629	4,871,908	Lease liabilities
Utang bank	27 21,693,338	28,145,737	26,548,747	Bank loans
Utang obligasi dan sukuk ijarah	28 6,946,478	2,120,612	914,000	Bonds payable and sukuk ijarah
Utang listrik swasta	29 399,458	394,403	349,968	Electricity purchase payable
Utang KIK - EBA	28 586,620	686,819	630,600	KIK - EBA loans
Liabilitas imbalan kerja	50 5,232,467	5,873,658	8,562,927	Employee benefits liabilities
Utang lain-lain	32 30,698,919	32,970,944	21,255,272	Other payables
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	159,298,153	157,895,954	139,074,658	Total Current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS	655,674,600	565,073,888	465,541,053	TOTAL LIABILITIES
JUMLAH EKUITAS DAN LIABILITAS	1,585,055,013	1,492,487,745	1,334,957,657	TOTAL EQUITY AND LIABILITIES

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

Lampiran 2. Laporan Posisi Keuangan Tahun 2020 dan 2021

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 1/1 Schedule

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION AS AT DECEMBER 31, 2021 AND 2020 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/ Notes	2021	2020*)		
ASET			ASSETS	
ASET TIDAK LANCAR			NON-CURRENT ASSETS	
Aset tetap	6	1,427,058,358	1,401,888,487	Property, plant and equipment
Aset hak guna	7	29,762,537	31,193,985	Right-of-use assets
Properti investasi	8	5,451,410	5,408,572	Investment properties
Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama	9	17,810,839	14,112,585	Investments in associates and joint ventures
Pajak dibayar di muka	19	17,112,377	8,898,076	Prepaid taxes
Aset pajak tangguhan	48	264,705	195,289	Deferred tax assets
Piutang pihak berelasi	10	1,160,081	1,309,326	Receivables from related parties
Rekening bank dibatasi penggunaannya	11	4,861,882	5,882,934	Restricted cash in banks
Piutang lain-lain	17	1,145,976	886,052	Other receivables
Piutang dari Pemerintah	16	18,254,891	17,275,490	Receivables from Government
Aset tidak lancar lain	12	4,422,025	4,635,419	Other non-current assets
Jumlah Aset Tidak Lancar		1,527,305,081	1,491,686,215	Total Non-current Assets
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	13	37,968,399	54,735,434	Cash and cash equivalents
Rekening bank dibatasi penggunaannya	11	206,279	-	Restricted cash in banks
Investasi jangka pendek	14	297,720	366,708	Short-term investments
Piutang usaha				Trade receivables
Pihak berelasi	15	2,142,886	1,784,056	Related parties
Pihak ketiga	15	21,659,500	19,494,360	Third parties
Piutang dari Pemerintah	16	8,300,000	819,067	Receivables from Government
Piutang lain-lain	17	1,249,618	1,746,344	Other receivables
Persediaan	18	10,393,419	10,277,289	Inventories
Pajak dibayar di muka	19	2,701,520	7,287,693	Prepaid taxes
Biaya dibayar di muka dan uang muka	20	808,968	640,881	Prepaid expenses and advances
Piutang pihak berelasi	10	183,066	76,673	Receivables from related parties
Jumlah Aset Lancar		85,911,375	97,228,505	Total Current Assets
JUMLAH ASET		1,613,216,456	1,588,914,720	TOTAL ASSETS

*) Direklasifikasikan kembali, lihat Catatan 61

*) As reclassified, see Note 61

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

(Lanjutan)

Lampiran 2. Laporan Posisi Keuangan Tahun 2020 dan 2021

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 1/2 Schedule

LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION
AS AT DECEMBER 31, 2021 AND 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2021	2020	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
EKUITAS				EQUITY
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				Equity attributable to owners of the parent
Modal saham - nilai nominal Rp1 per saham				Capital stock - par value of Rp1 per share
Modal dasar - 439.000.000 saham				Authorized - 439,000,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh 135.460.886 saham				Subscribed and paid-up 135,460,886 shares,
pada 31 Desember 2021 dan 135.342.182 saham pada 31 Desember 2020	21	135,460,886	135,342,182	as at December 31, 2021 and 135,342,182 shares, as at December 31, 2020
Penyertaan modal Negara dalam proses penerbitan saham	22	10,075,210	-	Stock subscription from Government in issuance process
Tambahan modal disetor	22	34,608	5,216,571	Additional paid-in capital
Saldo laba				Retained earnings
Ditentukan penggunaannya	21	64,657,026	64,657,026	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya	21	84,962,218	71,928,554	Unappropriated
Penghasilan komprehensif lain		685,408,045	661,734,097	Other comprehensive income
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		980,597,993	938,878,430	Equity attributable to owners of the parent
Kepentingan non-pengendali		1,009,130	934,162	Non-controlling interests
Jumlah Ekuitas		981,607,123	939,812,592	Total Equity
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas pajak tangguhan	48	45,576,375	31,746,600	Deferred tax liabilities
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun				Long-term liabilities - net of current portion
Penerusan pinjaman	24	31,778,793	35,501,803	Two-step loans
Utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan				Government and non-bank Government financial institution loans
Pemerintah non-bank	25	2,927,754	3,649,146	Bank loans
Utang sewa	26	10,471,903	14,035,913	Lease liabilities
Utang bank	27	139,045,012	154,489,751	Bank loans
Utang obligasi dan sukuk ijarah	28	187,734,643	192,850,308	Bonds payable and sukuk ijarah
Utang listrik swasta	29	5,711,211	6,097,857	Electricity purchase payables
Utang KIK - EBA	28	-	655,772	KIK - EBA loans
Utang pihak berelasi	30	-	9,432	Payable to related party
Utang lain-lain	32	466,379	182,093	Other payables
Pendapatan ditangguhkan	23	13,271,056	5,644,472	Deferred revenue
Liabilitas imbalan kerja	50	48,087,727	54,609,453	Employee benefits liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		485,070,853	499,472,600	Total Non-current Liabilities

^{*)} Direklasifikasikan kembali, lihat Catatan 61

^{*)} As reclassified, see Note 61

POLITEKNIK NEGERI BALI

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

(Lanjutan)

Lampiran 2. Laporan Posisi Keuangan Tahun 2020 dan 2021

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 1/3 Schedule

LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION
AS AT DECEMBER 31, 2021 AND 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2021	2020 ¹⁾	
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang usaha				Trade payables
Pihak berelasi	31	20,566,633	10,163,212	Related parties
Pihak ketiga	31	27,338,123	28,985,343	Third parties
Utang pajak	33	1,998,768	1,747,279	Taxes payable
Biaya masih harus dibayar	34	6,528,616	6,990,380	Accrued expenses
Liabilitas imbalan kerja				Short-term employee
jangka pendek	50	10,320,993	8,959,711	benefits liabilities
Uang jaminan langganan	35	15,584,069	14,802,396	Customer security deposits
Utang biaya proyek	36	114,546	153,983	Project cost payables
Pendapatan ditangguhkan	23	740,906	1,617,725	Deferred revenue
Liabilitas derivatif	57	107,271	327,544	Derivative liabilities
Utang jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun				Current maturities of long-term liabilities
Penerusan pinjaman	24	2,920,412	3,033,168	Two-step loans
Utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan				Government and non-bank
Pemerintah non-bank	25	1,960,686	2,416,967	Government financial
Utang sewa	26	4,570,040	4,450,390	institution loans
Utang bank	27	26,841,397	18,816,957	Lease liabilities
Utang obligasi dan sukuk ijarah	28	5,420,392	14,970,000	Bank loans
Utang listrik swasta	29	457,545	427,974	Bonds payable and sukuk ijarah
Utang KIK - EBA	28	569,578	871,177	Electricity purchase payables
Utang lain-lain	32	20,498,505	30,895,322	KIK - EBA loans
				Other payables
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		<u>146,538,480</u>	<u>149,629,528</u>	Total Current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS		<u>631,609,333</u>	<u>649,102,128</u>	TOTAL LIABILITIES
JUMLAH EKUITAS DAN LIABILITAS		<u>1,613,216,456</u>	<u>1,588,914,720</u>	TOTAL EQUITY AND LIABILITIES

¹⁾ Direklasifikasikan kembali, lihat Catatan 61

¹⁾ As reclassified, see Note 61

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

The accompanying notes to the consolidated financial statements
form an integral part of these consolidated financial statements

Lampiran 3. Laporan Laba Rugi 2017, 2018, dan 2019

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2019 Rp	2018 Rp	2017 Rp	
PENDAPATAN USAHA					REVENUES
Penjualan tenaga listrik	37	276,061,925	263,477,551	246,586,856	Sale of electricity
Penyambungan pelanggan	23	6,934,597	7,309,172	7,113,454	Customer connection fees
Lain-lain	39	2,644,067	2,111,019	1,594,933	Others
Jumlah Pendapatan Usaha		<u>285,640,589</u>	<u>272,897,742</u>	<u>255,295,243</u>	Total Revenues
BEBAN USAHA					OPERATING EXPENSES
Bahan bakar dan pelumas	40	136,084,482	137,266,678	116,947,824	Fuel and lubricants
Pembelian tenaga listrik	41	83,583,991	84,267,611	72,426,641	Purchased electricity
Sewa	42	3,617,376	4,272,082	6,592,161	Lease
Pemeliharaan	43	22,328,178	20,737,601	19,515,606	Maintenance
Kepegawaian	44	25,908,771	22,950,087	23,124,511	Personnel
Penyusutan	6	35,318,071	30,744,712	29,160,597	Depreciation
Lain-lain	45	8,620,069	7,950,118	7,706,754	Others
Jumlah Beban Usaha		<u>315,440,938</u>	<u>308,188,889</u>	<u>275,474,094</u>	Total Operating Expenses
RUGI USAHA SEBELUM SUBSIDI		(29,800,349)	(35,291,147)	(20,178,851)	OPERATING LOSS BEFORE SUBSIDY
Subsidi listrik Pemerintah	38	51,711,774	48,101,754	45,738,215	Government's electricity subsidy
Pendapatan kompensasi	16	22,253,517	23,173,464	--	Compensation income
LABA USAHA SETELAH SUBSIDI		44,164,942	35,984,071	25,559,364	OPERATING INCOME AFTER SUBSIDY
Penghasilan (beban) lain-lain - bersih	47	(3,667,666)	15,663,363	3,409,941	Other income (expense) - net
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing - bersih		9,486,328	(10,926,741)	(2,935,144)	Gain (loss) on foreign exchange - net
Penghasilan keuangan		755,103	804,321	1,068,842	Financial income
Beban keuangan	46	(24,619,495)	(21,624,176)	(18,556,931)	Financial cost
LABA SEBELUM PAJAK		26,119,210	19,900,838	8,544,072	INCOME BEFORE TAX
BEBAN PAJAK	48	(21,797,080)	(8,325,082)	(4,115,955)	TAX EXPENSES
LABA TAHUN BERJALAN		4,322,130	11,575,756	4,428,117	INCOME FOR THE YEAR

**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI**

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

(Lanjutan)

Lampiran 3. Laporan Laba Rugi 2017, 2018, dan 2019

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPRESIF LAIN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2019 Rp	2018 Rp	2017 Rp	
LABA TAHUN BERJALAN		4,322,130	11,575,756	4,428,117	INCOME FOR THE YEAR
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan					Other comprehensive income for the year
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:					<i>Items that may be reclassified subsequently to profit or loss:</i>
Bagian penghasilan (beban) komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura bersama	8	(286,917)	265,493	461,901	<i>Share of other comprehensive income (expenses) from associates and joint venture</i>
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					<i>Items that will not be reclassified to profit or loss:</i>
Perubahan surplus revaluasi aset tetap	6	(1,183,109)	48,336,627	(6,933,307)	<i>Changes in property, plant and equipment revaluation surplus</i>
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	50	(3,775,959)	4,319,690	(5,635,015)	<i>Remeasurement on defined benefit plans</i>
Manfaat pajak terkait	48	950,394	(5,524,764)	1,408,754	<i>Related income tax benefits</i>
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak		(4,295,591)	47,387,046	(10,697,667)	Other comprehensive income for the year after tax
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPRESIF TAHUN BERJALAN		26,539	58,962,802	(6,269,550)	TOTAL COMPREHENSIVE (LOSS) INCOME FOR THE YEAR
Laba tahun berjalan diatribusikan kepada:					<i>Income for the year attributable to:</i>
Pemilik entitas induk		4,270,922	11,568,286	4,410,210	<i>Owner of the parent</i>
Kepentingan non-pengendali		51,208	7,470	17,907	<i>Non-controlling interest</i>
Jumlah		4,322,130	11,575,756	4,428,117	Total
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan diatribusikan kepada:					<i>Total comprehensive income for the year attributable to:</i>
Pemilik entitas induk		(24,669)	58,955,332	(6,287,457)	<i>Owner of the parent</i>
Kepentingan non-pengendali		51,208	7,470	17,907	<i>Non-controlling interest</i>
Jumlah		26,539	58,962,802	(6,269,550)	Total
LABA PER SAHAM DASAR (Dalam Rupiah penuh)	49	37,516	105,332	50,541	BASIC EARNINGS PER SHARE (In Rupiah full amount)

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

Lampiran 4. Laporan Laba Rugi 2020 dan 2021

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAKI AND SUBSIDIARIES

Lampiran 2/1 Schedule

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPRESIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/ Notes	2021	2020*)	
PENDAPATAN USAHA			REVENUE
Penjualan tenaga listrik	37 288,862,726	274,898,464	Sales of electricity
Penyambungan pelanggan	23 493,437	312,725	Customer connection fees
Subsidi listrik Pemerintah	38 49,796,949	47,968,114	Government electricity subsidy
Pendapatan kompensasi	16 24,594,425	17,904,508	Compensation income
Lain-lain	39 4,426,733	4,311,826	Others
Jumlah Pendapatan Usaha	368,174,270	345,415,637	Total Revenue
BEBAN USAHA			OPERATING EXPENSES
Bahan bakar dan pelumas	40 118,419,490	106,014,285	Fuel and lubricants
Pembelian tenaga listrik	41 103,553,472	96,250,367	Purchased electricity
Sewa	42 4,772,014	5,502,571	Leases
Pemeliharaan	43 22,600,774	21,940,509	Maintenance
Kepegawaian	44 25,092,756	24,965,707	Personnel
Penyusutan aset tetap	6 38,327,468	36,662,917	Property, plant and equipment depreciation
Penyusutan aset hak guna	7 3,113,803	2,479,663	Right-of-use assets depreciation
Lain-lain	45 7,239,348	7,192,146	Others
Jumlah Beban Usaha	323,119,125	301,008,165	Total Operating Expenses
LABA USAHA	45,055,145	44,407,472	OPERATING PROFIT
(Beban)/penghasilan lain-lain - bersih	47 (4,921,682)	1,916,966	Other (expense)/income - net
Keuntungan/(kerugian) kurs mata uang asing - bersih	2,676,145	(7,742,152)	Gain/(loss) on foreign exchange - net
Penghasilan keuangan	787,231	1,125,519	Finance income
Beban keuangan	46 (20,375,755)	(27,415,886)	Finance costs
LABA SEBELUM PAJAK	23,221,084	12,291,919	PROFIT BEFORE TAX
BEBAN PAJAK	48 (10,046,207)	(6,298,491)	INCOME TAX EXPENSE
LABA TAHUN BERJALAN	13,174,877	5,993,428	PROFIT FOR THE YEAR

*) Direklasifikasikan kembali, lihat Catatan 61

*) As reclassified, see Note 61

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

(Lanjutan)

Lampiran 4. Laporan Laba Rugi 2020 dan 2021

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 2/2 Schedule

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/ Notes	2021	2020	
LABA TAHUN BERJALAN	13,174,877	5,993,428	PROFIT FOR THE YEAR
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan			<i>Other comprehensive income for the year</i>
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:			<i>Items that may be reclassified subsequently to profit or loss:</i>
Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura bersama	9 610,789	107,890	<i>Share of other comprehensive income from associates and joint ventures</i>
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:			<i>Items that will not be reclassified to profit or loss:</i>
Perubahan surplus revaluasi aset tetap	6 19,559,900	(1,657,836)	<i>Changes in property, plant and equipment revaluation surplus</i>
Pengukuran kembali atas program manfaat pasti	50 8,533,129	1,915,369	<i>Remeasurement of defined benefit plans</i>
Beban pajak terkait	48.b (4,696,115)	(56,657)	<i>Related income tax expense</i>
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak	<u>24,007,703</u>	<u>308,766</u>	<i>Other comprehensive income for the year after tax</i>
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	<u>37,182,580</u>	<u>6,302,194</u>	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
Laba tahun berjalan diatribusikan kepada:			<i>Profit for the year attributable to:</i>
Pemilik entitas induk	13,128,626	5,950,884	<i>Owners of the parent</i>
Kepentingan non-pengendali	46,251	42,544	<i>Non-controlling interests</i>
Jumlah	<u>13,174,877</u>	<u>5,993,428</u>	Total
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan diatribusikan kepada:			<i>Total comprehensive income for the year attributable to:</i>
Pemilik entitas induk	37,107,612	6,259,650	<i>Owners of the parent</i>
Kepentingan non-pengendali	74,968	42,544	<i>Non-controlling interests</i>
Jumlah	<u>37,182,580</u>	<u>6,302,194</u>	Total
LABA PER SAHAM DASAR/DILUSIAN (dalam Rupiah penuh)	49 <u>96,972</u>	<u>48,439</u>	EARNINGS PER SHARE BASIC/DILUTED (in Rupiah full amount)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

Lampiran 5. Kebijakan Akuntansi PT PLN (Persero)

KEBIJAKAN AKUNTANSI TAHUN 2017-2019	KEBIJAKAN AKUNTANSI TAHUN 2020-2021
<p>ASET KEUANGAN</p> <p>Pengakuan dan Pengukuran Awal Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian dan penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset keuangan dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku dan awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang awalnya diukur sebesar nilai wajar. Aset keuangan Perusahaan dan entitas anak diklasifikasikan sebagai berikut: aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, dan yang tersedia untuk dijual</p> <p>i. Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi ("FVTPL"). Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai. Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.</p> <p>ii. Pinjaman yang Diberikan dan Piutang</p> <p>Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:</p> <p>(a) pinjaman yang diberikan dan piutang yang dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat dan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;</p> <p>(b) pinjaman yang diberikan dan piutang yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual; atau</p> <p>(c) pinjaman yang diberikan dan piutang dalam hal pemilik mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman.</p> <p>Setelah pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.</p> <p>iii. Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual ("AFS")</p> <p>AFS aset keuangan adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan baik sebagai AFS atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang, dimiliki hingga jatuh tempo atau aset keuangan pada FVTPL. Setelah pengakuan awal, aset keuangan tersebut diukur sebesar nilai wajar dimana keuntungan atau kerugian diakui dalam pengisian komprehensif lain, kecuali untuk kerugian akibat penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi. Perusahaan mengukur nilai wajar instrumen ekuitas yang tidak terikat di pasar aktif dengan menggunakan teknik penilaian berdasarkan asumsi yang wajar. Dalam keadaan tertentu dimana kisaran estimasi nilai wajar yang realistis cukup signifikan dan probabilitas berbagai estimasi tidak dapat dinilai secara wajar, maka Perusahaan mengukur nilai wajar instrumen AFS tersebut pada biaya perolehan dikurangi penurunan nilai. Investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak terikat di bursa dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur</p>	<p>ASET KEUANGAN</p> <p>i. Klasifikasi, Pengakuan, dan Pengukuran</p> <p>Grup mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori pengukuran berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> aset keuangan yang diukur pada nilai wajar (baik melalui penghasilan komprehensif lain, atau melalui laba rugi), dan aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. <p>Klasifikasi tersebut tergantung pada model bisnis dimana investasi tersebut diadakan. Untuk investasi pada kontrak atau kas. Untuk aset yang diukur pada nilai wajar, keuntungan dan kerugian akan dicatat dalam laporan laba rugi atau penghasilan komprehensif lain. Untuk investasi pada instrumen utang, hal ini akan bergantung pada model bisnis dimana investasi tersebut diadakan. Untuk investasi pada instrumen ekuitas yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan, hal ini akan tergantung pada apakah Grup memiliki tidak dapat dibatalkan pada saat pengakuan awal untuk mencatat investasi ekuitas pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Grup mereklasifikasi investasi utang jika dan hanya jika model bisnis untuk mengelola aset tersebut berubah. Pada pengakuan awal, Grup mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan. Biaya transaksi dari aset keuangan yang dicatat pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan pada laba rugi. Aset keuangan dengan derivatif melekat dipertimbangkan secara keseluruhan saat menentukan apakah arus kasnya hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga.</p> <p>Instrumen utang</p> <p>Pengukuran selanjutnya instrumen utang bergantung pada model bisnis Grup dalam mengelola aset dan karakteristik arus kas dari aset tersebut. Ada tiga kategori pengukuran yang Grup mengklasifikasikan instrumen utangnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> Biaya perolehan diamortisasi: Aset yang dimiliki untuk mengumpulkan arus kas kontraktual dimana arus kas tersebut hanya mewakili pembayaran pokok dan bunga diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Keuntungan atau kerugian dari investasi utang yang selanjutnya diukur pada biaya pokok pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya atau penurunan nilainya. Pendapatan bunga dari aset keuangan tersebut dimasukkan ke dalam pendapatan keuangan dengan menggunakan metode suku bunga efektif Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain: Aset yang dimiliki untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan untuk menjual aset keuangan, di mana arus kas aset tersebut hanya atas pembiayaan pokok dan bunga, diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Perubahan nilai terikat dilakukan melalui penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk pengakuan keuntungan atau kerugian penurunan nilai, pendapatan bunga dan keuntungan dan kerugian selisih kurs yang diakui dalam laba rugi. Ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui di penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi dan diakui dalam penghasilan atau beban lain-lain. Pendapatan

Sumber: Catatan Atas Laporan Keuangan PT PLN (Persero) Tahun 2017-2021

(Lanjutan)

Lampiran 5. Kebijakan Akuntansi PT PLN (Persero)

2

<p>secara andal, serta derivatif yang terkait dengan dan harus diselesaikan melalui penyerahan instrumen ekuitas tersebut diklasifikasikan sebagai AFS, diukur pada biaya perolehan dikurangi penurunan nilai. Dividen atas instrumen ekuitas AFS, jika ada, diakui pada laba rugi pada saat hak Perusahaan dan entitas anak untuk memperoleh pembayaran dividen ditetapkan.</p> <p>Metode Suku Bunga Efektif</p> <p>Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengaitkan pendapatan bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa datang (menakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal. Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen keuangan.</p> <p>Penurunan Nilai Aset Keuangan</p> <p>Aset keuangan dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap akhir tanggal pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat distimasi secara andal. Untuk investasi ekuitas AFS yang tercatat dan tidak tercatat di bursa, penurunan yang signifikan atau jangka panjang pada nilai wajar dari investasi ekuitas di bawah biaya perolehannya dianggap sebagai bukti objektif penurunan nilai. Untuk aset keuangan lainnya, bukti objektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">• Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak pemegang atau• Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga, atau• Terdapat kemungkinan bahwa pihak pemegang akan dimutuskan paillit atau melakukan reorganisasi keuangan. <p>Terdapat data yang dapat diobservasi yang mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset, seperti memburuknya status pembayaran pihak pemegang atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan gagal bayar.</p> <p>Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, aset yang dinilai tidak akan diturunkan secara individual tetapi penurunan secara kolektif. Bukti objektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalangan Perusahaan dan entitas anak atas tagihannya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan default atas piutang. Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan. Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas aset keuangan, kecuali piutang yang nilai tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang. Penulisan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang. Perubahan nilai tercatat akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang diakui dalam laba rugi. Jika aset keuangan AFS dianggap menurun nilainya, keuntungan kumulatif yang sebelumnya telah diakui dalam ekuitas dicatat ke laba rugi. Pengecualian dari instrumen ekuitas AFS, jika, pada periode berikutnya, jumlah penurunan nilai berkurang dan penurunan dapat</p>	<p>bunga dari aset keuangan tersebut dimasukkan ke dalam pendapatan keuangan dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian selisih kurs disajikan dalam penghasilan dan beban kurs mata uang asing dan beban penurunan nilai pada beban lain-lain.</p> <p>- Nilai wajar melalui laba rugi: Aset yang tidak memenuhi kriteria untuk biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Keuntungan atau kerugian dari investasi utang yang selanjutnya diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai, diakui dalam laba rugi dan disajikan bersih dalam laba rugi.</p> <p>Instrumen ekuitas</p> <p>Grup selanjutnya mengukur semua investasi ekuitas pada nilai wajar. Jika manajemen Grup telah memilih untuk menyajikan keuntungan dan kerugian nilai wajar atas investasi ekuitas dalam penghasilan komprehensif lain, tidak ada rekalisasi keuntungan dan kerugian nilai wajar ke laba rugi setelah penghentian investasi tersebut. Dividen dari investasi semacam itu tetap diakui dalam laba rugi sebagai pendapatan lainnya ketika hak Grup untuk menerima pembayaran ditetapkan.</p> <p>Perubahan nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui dalam keuntungan/(kerugian) lain-lain dalam laporan laba rugi konsolidasi sebagaimana berlaku. Kerugian penurunan nilai (dan pemulihan kerugian penurunan nilai) atas investasi ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain tidak dilaporkan secara terpisah dari perubahan nilai wajar lainnya.</p> <p>ii. Penghentian pengakuan</p> <p>Aset keuangan dihentikan pengakuannya ketika hak untuk menerima arus kas dari investasi tersebut telah jatuh tempo atau telah ditransfer dan Grup telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset.</p> <p>iii. Saling hapus antar instrumen keuangan</p> <p>Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan konsolidasi ketika terdapat hak yang bertekanan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.</p>
---	--

Sumber: Catatan Atas Laporan Keuangan PT PLN (Persero) Tahun 2017-2021

(Lanjutan)

Lampiran 5. Kebijakan Akuntansi PT PLN (Persero)

3

	<p>dikatakan secara objektif dengan sebuah peristiwa yang terjadi, setelah penurunan nilai tersebut diakui, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dipulihkan melalui laba rugi hingga nilai tercatat investasi pada tanggal penulihan penurunan nilai tidak melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum pengakuan kerugian penurunan nilai dilakukan. Dalam hal efek ekuitas AFS, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dalam laba rugi tidak boleh dipulihkan melalui laba rugi. Setiap kenaikan nilai wajar setelah penurunan nilai diakui secara langsung ke penghasilan komprehensif lain.</p> <p>Penghentian Pengakuan Aset Keuangan</p> <p>Perusahaan dan entitas anak menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Perusahaan dan entitas anak mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Perusahaan dan entitas anak tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengandalkan aset yang ditransfer, maka Perusahaan dan entitas anak mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Perusahaan dan entitas anak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Perusahaan dan entitas anak masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima. Saat penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara jumlah tercatat aset dan jumlah pembayaran dan piutang yang diterima dan keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam pendapatan, komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas diakui dalam laba rugi. Saat penghentian pengakuan aset keuangan terhadap satu bagian saja (misalnya ketika Perusahaan dan entitas anak masih memiliki hak untuk membeli kembali bagian aset yang ditransfer), Perusahaan dan entitas anak mengatorkasikan jumlah tercatat sebelumnya dari aset keuangan tersebut pada bagian yang tetap diakui berdasarkan keterlibatan berkelanjutan dan bagian yang tidak lagi diakui berdasarkan nilai wajar relatif dari kedua bagian tersebut pada tanggal transfer. Selisih antara jumlah tercatat yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui dan jumlah dari pembayaran yang diterima untuk bagian yang tidak lagi diakui dan setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui tersebut yang sebelumnya telah diakui dalam pendapatan komprehensif lain diakui pada laba rugi. Keuntungan dan kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam pendapatan komprehensif lain dialokasikan pada bagian yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya, berdasarkan nilai wajar relatif kedua bagian tersebut.</p> <p>Reklasifikasi</p> <p>Perusahaan dan entitas anak tidak mereklasifikasi instrumen derivatif dari diukur pada nilai wajar melalui laba rugi selama derivatif tersebut dimiliki atau diterbitkan dan tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan dari diukur melalui laba rugi jika pada pengakuan awal instrumen keuangan tersebut ditetapkan oleh Perusahaan dan entitas anak sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Perusahaan dan entitas anak dapat mereklasifikasi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, jika aset keuangan tidak lagi dimiliki untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali aset keuangan tersebut dalam waktu dekat. Perusahaan dan entitas anak tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi setelah pengakuan awal, jika, karena perubahan intensi atau kemampuan Perusahaan dan entitas anak, instrumen tersebut tidak tepat lagi diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, maka investasi tersebut direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual dan diukur kembali pada nilai wajar. Jika terjadi penjualan atau reklasifikasi atas investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah lebih dari jumlah yang tidak signifikan, maka sisa investasi dimiliki hingga jatuh tempo direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual, kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali, terjadi</p>
---	--

Sumber: Catatan Atas Laporan Keuangan PT PLN (Persero), Tahun 2017-2021

(Lanjutan)

Lampiran 5. Kebijakan Akuntansi PT PLN (Persero)

4

<p>setelah seluruh jumlah pokok telah diperoleh secara substansial sesuai jadwal pembayaran atau telah diperoleh pelunasan dipercepat, atau terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar.</p> <p>Pengukuran Nilai Wajar Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pasar pada tanggal pengukuran. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengukuran dan pengakuan atau untuk keperluan pengungkapan. Nilai wajar dikategorikan dalam level yang berbeda dalam suatu hirarki nilai wajar berdasarkan pada apakah input suatu pengukuran dapat diobservasi dan signifikansi input terhadap keseluruhan tanggapan pengukuran (Level 1); (i) Harga kuotasi (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran (Level 1); (ii) Input selain harga kuotasi yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Level 2); (iii) Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Level 3).</p> <p>Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Perusahaan dan entitas anak sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, Perusahaan dan entitas anak menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi. Perpindahan antara level hirarki nilai wajar diakui oleh Perusahaan dan entitas anak pada akhir periode pelaporan dimana perpindahan terjadi.</p>	<p>Lindung nilai Hedging Dalam bisnis normal, Perusahaan dan entitas anak terkecuali risiko nilai tukar dan tingkat bunga. Untuk melindungi dari risiko ini sesuai dengan kebijakan treasury tertulis dari manajemen, Perusahaan dan entitas anak menggunakan derivatif dan instrumen lindung nilai lainnya. PSAK 55 memperbolehkan tiga jenis hubungan lindung nilai:</p> <ul style="list-style-type: none">• Lindung nilai atas nilai wajar,• Lindung nilai atas arus kas,• Lindung nilai atas investasi neto pada kegiatan usaha luar negeri. <p>Perusahaan dan entitas anak menggunakan lindung nilai hanya jika seluruh kondisi berikut ini terpenuhi pada saat dimulainya lindung nilai:</p> <ul style="list-style-type: none">• Terdapat penetapan dan pendokumentasian formal atas hubungan lindung nilai - Dokumentasi lindung nilai mencakup strategi lindung nilai dan metode yang digunakan untuk menilai efektivitas lindung nilai, dan• Efektivitas hubungan lindung nilai diperkirakan sangat tinggi di sepanjang masa dari lindung nilai. <p>Dokumentasi di atas selanjutnya dimutakhirkan pada setiap periode pelaporan untuk menilai apakah lindung nilai tetap diperkirakan akan sangat efektif di sepanjang sisa masa lindung nilai.</p> <p>Lindung Nilai atas Arus Kas Bagian dari keuntungan atau kerugian atas instrumen lindung nilai yang ditetapkan sebagai lindung nilai yang efektif diakui (setelah pajak) dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasi dalam cadangan lindung nilai, dan bagian yang tidak efektif atas keuntungan atau kerugian dari instrumen lindung nilai tersebut diakui dalam laba rugi. Tidak dilakukan penyesuaian atas item yang dilindungi nilai. Jika suatu lindung nilai atas prakiraan transaksi yang kemudian</p>
---	---

Sumber: Catatan Atas Laporan Keuangan PT PLN (Persero), Tahun 2017-2021

(Lanjutan)

Lampiran 5. Kebijakan Akuntansi PT PLN (Persero)

5

<p>memimbulkan pengakuan suatu aset keuangan atau liabilitas keuangan, maka keuntungan atau kerugian terkait yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyusunan reklasifikasi pada periode yang sama pada saat tindakan atas prakiraan arus kas mempengaruhi laba rugi. Jika suatu liabilitas pada periode yang sama pada saat tindakan arus kas non-keuntungan aset non-keuntungan atau liabilitas non-keuntungan, atau jika suatu liabilitas pada saat tindakan transaksi atas aset non-keuntungan atau liabilitas non-keuntungan menjadi komitmen pasti dimana akuntansi liabilitas atas nilai wajar diterapkan, maka Perusahaan mereklasifikasi keuntungan dan kerugian yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain ke laba rugi sebagai penyusunan reklasifikasi.</p>	<p>memimbulkan pengakuan suatu aset keuangan atau liabilitas keuangan, maka keuntungan atau kerugian terkait yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyusunan reklasifikasi pada periode yang sama pada saat tindakan atas prakiraan arus kas mempengaruhi laba rugi. Jika suatu liabilitas pada periode yang sama pada saat tindakan arus kas non-keuntungan aset non-keuntungan atau liabilitas non-keuntungan, atau jika suatu liabilitas pada saat tindakan transaksi atas aset non-keuntungan atau liabilitas non-keuntungan menjadi komitmen pasti dimana akuntansi liabilitas atas nilai wajar diterapkan, maka Perusahaan mereklasifikasi keuntungan dan kerugian yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain ke laba rugi sebagai penyusunan reklasifikasi.</p>
<p>KAS DAN SETARA KAS Untuk tujuan penyajian arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan tidak diumumkan serta tidak dibatasi penggunaannya. Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Untuk kebijakan akuntansi pinjaman yang diberikan dan piutang.</p>	<p>KAS DAN SETARA KAS Kas dan setara kas termasuk kas, kas di bank, dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang pada saat penempatan yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya. Laporan arus kas konsolidasian disusun menggunakan metode langsung dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.</p>
<p>PERSEDIAAN Persediaan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata bergerak. Di dalam penentuan nilai realisasi bersih, Perusahaan dan entitas anak tidak menurukan nilai persediaan yang digunakan untuk produksi tenaga listrik apabila Perusahaan dan entitas anak mampu memperoleh pendapatan penjualan tenaga listrik di atas biaya perolehan persediaan tersebut.</p>	<p>PERSEDIAAN Persediaan suku cadang, bahan bakar, minyak pelumas, perlengkapan dan bahan pendukung dinilai dengan harga perolehan dikurangi dengan provisi persediaan usang dan bergerak lambat. Harga perolehan ditentukan dengan metode rata-rata bergerak. Provisi persediaan usang dan bergerak lambat ditentukan berdasarkan estimasi penggunaan jenis persediaan pada masa mendatang.</p>
<p>PENGAKUAN PENDAPATAN DAN BEBAN Pendapatan Tenaga Listrik Pendapatan penjualan listrik diakui berdasarkan pemakaian energi listrik (kWh). Beban diakui pada saat terjadinya (dasar akrual).</p>	<p>PENGAKUAN PENDAPATAN DAN BEBAN Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan pengakuan pendapatan harus memenuhi 5 (lima) langkah penilaian sebagai berikut:</p>
<p>Subsidi Listrik Pemerintah Subsidi Listrik Pemerintah yang diberikan melalui Perusahaan diakui sebagai pendapatan atas dasar akrual yang dihitung berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.44/PMK.02/2017 yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.174/PMK.02/2019 dan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral ("ESDM") No.28 Tahun 2016 tentang tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero) yang terakhir diperbaharui dengan Peraturan Menteri ESDM No.19 Tahun 2019.</p>	<p>i. identifikasi kontrak dengan pelanggan; ii. identifikasi kewajiban menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan; iii. penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas penyerahannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Grup membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas penyerahannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak; iv. alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diuraikan secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditimbah margin; dan v. pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).</p>
<p>Pendapatan dari Pemerintah Biaya Toksik Penyediaan ("BTPP") tenaga listrik beberapa golongan pelanggan yang tarif penjualannya lebih rendah dibandingkan BPP, dan belum diperhitungkan dalam subsidi diakui sebagai pendapatan atas dasar akrual. Biaya Penyambungan Pelanggan Perusahaan mencatat biaya penyambungan yang diterima dari pelanggan untuk memperoleh atau tetap yang digunakan untuk menghubungkan pelanggan ke jaringan listrik Perusahaan sebagai pendapatan pada saat Perusahaan menyelesaikan kewajiban atas jasa koneksi tersebut.</p>	<p>Keuntungan pelaksanaan dapat dipenuhi dengan cara sebagai berikut: - Suatu titik waktu (umumnya jaji untuk menyerahkan barang ke pelanggan), atau - Suatu periode waktu (umumnya jaji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam suatu periode waktu, Grup memilih ukuran penyelesaian yang sesuai</p>

Sumber: Catatan Atas Laporan Keuangan PT PLN (Persero) Tahun 2017-2021

(Lanjutan)

Lampiran 5. Kebijakan Akuntansi PT PLN (Persero)

6

<p>Pendapatan usaha lainnya merupakan pendapatan yang berasal dari pelayanan jaringan dan jasa telekomunikasi, sewa trafo dan jasa-jasa administratif lainnya. Pendapatan lainnya diakui dengan mengacu pada tingkat penyelesaian transaksi tersebut pada tanggal pelaporan.</p> <p>Pendapatan Bunga Pendapatan bunga diakui pada saat terjadinya dengan dasar akrual, dengan acuan jumlah pokok terutang dan tingkat bunga yang berlaku.</p> <p>Beban Beban diakui pada saat terjadinya dengan dasar akrual.</p>	<p>untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.</p> <p>Penjualan tenaga listrik Pendapatan penjualan listrik diakui berdasarkan pemakaian energi listrik (kWh). Umumnya, pelanggan dapat membeli token mereka sendiri ("prabayar") atau ditagih setiap bulan ("pascabayar"). Untuk pelanggan pascabayar, pendapatan dari penjualan listrik diakui setiap bulan berdasarkan hasil baca meter atas pemakaian pelanggan. Untuk pelanggan prabayar, Grup mengakui pendapatan berdasarkan estimasi jumlah penggunaan token pelanggan pada periode tertentu.</p> <p>Subsidi Listrik Pemerintah Pendapatan subsidi merupakan pendapatan dari Pemerintah Indonesia atas selisih antara biaya yang diperbolehkan ditambah margin 7% dengan harga jual aktual per masing-masing golongan tarif (kecuali untuk golongan tarif yang dilaksanakan penyusutan tarif menurut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Mineral ("ESDM") No.28 Tahun 2016 tentang tarif tenaga listrik yang ditetapkan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri ESDM No. 3 Tahun 2020. Subsidi listrik Pemerintah diakui sebagai pendapatan berdasarkan berita acara verifikasi tahunan dimana diterima berupa jumlah subsidi yang akan dibayarkan oleh Pemerintah dan telah diakui sebagai kewajiban oleh Pemerintah Indonesia. Nilai subsidi listrik Pemerintah pada akhir tahun perlu diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan ("BPK").</p> <p>Pendapatan kompensasi Pendapatan kompensasi merupakan pendapatan dari Pemerintah Indonesia atas tarif golongan non-subsidi yang sejak tahun 2017 tidak mengalami perubahan, kenaikan tarif. Kompensasi dari Pemerintah diakui sebagai pendapatan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan ("LHP") Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ("BPKP") dan/atau BPK Republik Indonesia dan jumlahnya telah diakui sebagai kewajiban oleh Pemerintah Indonesia. Nilai kompensasi merupakan estimasi manajemen yang pada akhir tahun akan direvisi oleh BPKP dan atau BPK.</p> <p>Biaya penyambungan pelanggan Grup menanggung biaya penyambungan yang diterima dari pelanggan yang digunakan untuk membangun atau mengaktifkan aset tetap untuk menghubungkan pelanggan secara tidak langsung berkaitan erat dengan pasokan listrik kepada pelanggan. Pasokan listrik dan biaya penyambungan merupakan satu kesatuan karena pelanggan tidak dapat memperoleh manfaat dari kedua layanan ini sendiri. Infrastruktur penyambungan berfungsi untuk memenuhi kewajiban penyediaan tenaga listrik kepada pelanggan. Pasokan listrik dan biaya penyambungan pada dasarnya sama, dan memiliki pola transfer yang sama ke pelanggan. Oleh karena itu, biaya penyambungan dan pasokan tenaga listrik merupakan satu kewajiban pelaksanaan. Dengan demikian, biaya penyambungan diakui sebagai pendapatan ditanggulangi dan diamortisasi dengan tarif 5% per tahun terhitung sejak tanggal koneksi.</p> <p>Penjualan batubara</p>
---	--

Sumber: Catatan Atas Laporan Keuangan PT PLN (Persero) Tahun 2017-2021

(Lanjutan)

Lampiran 5. Kebijakan Akuntansi PT PLN (Persero)

7

<p>LIABILITAS KEUANGAN DAN INSTRUMEN KEUANGAN Klasifikasi Sebagai Liabilitas atau Ekuitas Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan dan entitas anak diklasifikasikan sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas. Instrumen Ekuitas Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Perusahaan dan entitas anak setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas diletakkan sebesar hasil penerimaan bersih setelah dikurangi biaya penerbitan langsung. Liabilitas Keuangan Penerusan pinjaman, utang kepada Pemerintah dan Lembaga Keuangan Pemerintah non-bank, utang bank dan surat utang jangka menengah, utang obligasi (tidak termasuk sukuk hijau), utang listrik swasta dan pinjaman lainnya pada awalnya</p>	<p>Pendapatan penjualan diakui pada setiap penjualan individu ketika mengontrol transfer ke pelanggan. Kontrol beralih ke pelanggan dan pendapatan penjualan diakui ketika batu bara dimuat ke kapal dimana batubara akan dikirim ke pelabuhan tujuan atau tempat pelanggan. Grup menjual batubara dengan syarat Free on Board ("FOB") dimana grup tidak memiliki tanggung jawab untuk pengangkutan atau asuransi setelah kontrol barang telah beralih di pelabuhan muat. Untuk jangka waktu ini hanya ada satu kewajiban pelaksanaan, yaitu untuk penyediaan produk pada titik di mana kontrol lewat. Selain itu juga, Grup menjual batubara dengan syarat Cost, Insurance and Freight ("CIF"), tetapi berdasarkan perjanjian penjualan kepemilikan dan risiko kerugian atas batubara akan tetap berada pada Grup sampai batubara melewati pelabuhan bongkar. Oleh karena itu, Grup menganggap bahwa biaya asuransi dan pengangkutan bukan merupakan kewajiban pelaksanaan terpisah melainkan satu kesatuan dengan kewajiban pelaksanaan dengan penjualan batubara dikarekakan kontrol atas persediaan batubara berpindah ke pembeli pada saat batubara tersebut sudah sampai di lokasi pembeli. Oleh karena itu, Grup tidak memiliki kewajiban pelaksanaan terpisah untuk jasa pengangkutan dan asuransi yang disediakan.</p> <p>Pendapatan usaha lainnya Pendapatan usaha lainnya merupakan pendapatan yang berasal dari pelayanan, jaringan dan jasa telekomunikasi, sewa trafo dan jasa-jasa administratif lainnya. Pendapatan dari pemberian jasa diakui pada periode akuntansi saat jasa tersebut telah diberikan. Untuk kontrak harga tetap, pendapatan diakui berdasarkan servis aktual yang diberikan hingga akhir periode pelaporan sebagai proporsi dari total servis yang akan diberikan karena pelanggan telah menerima dan menggunakan manfaat secara simultan.</p> <p>Komponen pembayaraan Grup tidak memperkirakan adanya kontrak di mana jangka waktu antara pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dan pembayaran oleh pelanggan melebihi satu tahun. Akibatnya, Grup tidak menyesuaikan harga transaksi apa pun dengan nilai waktu uang.</p> <p>Beban Beban diakui pada saat terjadinya dengan dasar akrual.</p>
---	--

Sumber: Catatan Atas Laporan Keuangan PT PLN (Persero) Tahun 2017-2021

(Lanjutan)

Lampiran 5. Kebijakan Akuntansi PT PLN (Persero)

8

<p>diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dengan beban bunga diakui berdasarkan metode suku bunga efektif. Selisih antara hasil emisi (setelah dikurangi biaya transaksi) dan penyelesaian atau pelunasan pinjaman diakui selama jangka waktu pinjaman menggunakan metode suku bunga efektif.</p> <p>Sukuk Ijarah</p> <p>Sukuk ijarah diakui pada saat entitas menjadi pihak yang terlibat dengan ketentuan pemberian sukuk ijarah. Sukuk ijarah diakui sebesar nilai nominal disesuaikan dengan premium atau diskonto dan biaya transaksi terkait dengan peret biayanya. Setelah pengakuan awal, jika jumlah tercatat berbeda dengan nilai nominal disebabkan penyesuaian premium atau diskonto, maka perbedaan tersebut diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk ijarah.</p> <p>Penhentian Pengakuan Liabilitas Keuangan</p> <p>Perusahaan dan entitas anak menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Perusahaan dan entitas anak telah dilupuskan, dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.</p>	<p>PENURUNAN NILAI ASSET KEUANGAN</p> <p>Pada setiap tahun pelaporan, Grup menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Grup menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Grup membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat tahun pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal. Grup menerapkan "pendekatan yang dipersempit" untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan cadangan kerugian kredit ekspektasian seumur hidup untuk seluruh saldo piutang usaha, dan piutang lain-lain dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan dan "pendekatan umum" lainnya. Pendekatan umum termasuk penelaahan perubahan signifikan risiko kredit sejak pengakuan awal. Penelaahan kerugian kredit ekspektasian termasuk asumsi mengenai risiko gagal bayar dan tingkat kerugian ekspektasian. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang usaha telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan jatuh tempo yang serupa, terkecuali kepada piutang-piutang yang dapat dinilai sendiri kerugian kredit ekspektasiannya.</p>
<p>ASET TETAP - PEMILIKAN LANGSUNG</p> <p>Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi harga perolehan dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai intensi manajemen. Apabila relevan, biaya perolehan juga dapat mencakup estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap. Kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk memproduksi persediaan selama periode tersebut. Pada tanggal 31 Desember 2015, Perusahaan dan entitas anak melakukan perubahan kebijakan akuntansi atas kelas/klasifikasi aset berikut ini dari model biaya menjadi model revaluasi:</p> <ul style="list-style-type: none">• Tanah.	<p>ASET TETAP</p> <p>Pada tanggal akuisisi, Grup menganalisis fakta dan keadaan untuk masing-masing jenis tanah dan hak atas tanah dalam menentukan akuntansi untuk masing-masing tanah dan hak atas tanah tersebut sehingga dapat merepresentasikan dengan tepat suatu kejadian atau transaksi ekonomis yang mendasarinya. Jika tanah dan hak atas tanah tersebut tidak mengalami pengendalian atas aset pendasar kepada Grup, melainkan mengalihkan hak untuk menggunakan aset pendasar, Grup menerapkan perlakuan akuntansi atas transaksi tersebut sebagai sewa berdasarkan PSAK No. 73, "Sewa". Jika tanah dan hak atas tanah secara substansi menyuruh-upa pembelian tanah, maka Grup menerapkan PSAK No. 16 "Aset Tetap" yaitu tanah dan hak atas tanah diakui sebesar harga perolehan dan tidak disusutkan.</p>

Sumber: Catatan Atas Laporan Keuangan PT PLN (Persero) Tahun 2017-2021

(Lanjutan)

Lampiran 5. Kebijakan Akuntansi PT PLN (Persero)

9

<ul style="list-style-type: none">• Bangunan umum, waduk dan prasarana;• Instalasi dan mesin pembangkit;• Perlengkapan transmisi;• Perlengkapan distribusi;• Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi yang digunakan dalam penyediaan listrik; dan• Material cadangan utama. <p>Perubahan kebijakan akuntansi tersebut diterapkan secara prospektif sesuai dengan PSAK 25 (Revisi 2015). Penilaian terhadap aset-aset tersebut dilakukan oleh penilai independen eksternal yang terdaftar di OJK. Penilaian atas aset tersebut dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan nilai tercatatnya. Aset yang tidak mengalami perubahan nilai wajar secara signifikan wajib direvaluasi paling kurang setiap 3 (tiga) tahun. Akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi dieliminasi terhadap aset, dan nilai netonya disajikan kembali sebagai aset tetap. Aset tetap lainnya disajikan sebesar harga perolehan dikurangi dengan penyusutan dan kerugian penurunan nilai. Harga perolehan termasuk pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung atas perolehan aset tersebut. Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi aset tetap yang menggunakan model revaluasi dikreditkan pada "surplus revaluasi aset" sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lain. Penurunan nilai revaluasi aset "surplus revaluasi aset" sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lain, penurunan lainnya dibebankan pada laba rugi. Biaya awal untuk mendapatkan hak atas tanah diakui sebagai bagian biaya akuisisi tanah dan biaya-biaya tersebut tidak disusutkan. Aset, kecuali tanah, disusutkan hingga mencapai estimasi nilai sisa dengan menggunakan metode garis lurus.</p>	<p>Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi harga perolehannya dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai intensitas manajemennya. Apabila relevan, biaya perolehan juga dapat mencakup estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap, kewajiban timbul ketika aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama tahun tertentu untuk tujuan selain untuk memproduksi persediaan selama tahun tersebut. Kelas aset di atas, disajikan sebesar nilai wajar dikurangi penyusutan dan penurunan nilai. Tanah tidak disusutkan. Tanah dan hak atas tanah tidak didepresiasi. Penilaian terhadap aset-aset tersebut dilakukan secara otonom independen eksternal yang terdaftar di OJK. Penilaian atas aset tersebut dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan nilai tercatatnya. Aset yang tidak mengalami perubahan nilai wajar secara signifikan wajib direvaluasi paling kurang setiap 3 (tiga) tahun. Akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi dieliminasi terhadap nilai tercatat bruto aset, dan nilai netonya disajikan kembali sebagai aset tetap.</p> <p>Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi aset tetap yang menggunakan model Revaluasi dikreditkan pada "surplus revaluasi aset" sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lain. Penurunan nilai revaluasi aset "surplus revaluasi aset" sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lain termasuk aset tersebut ditransfer ke aset tidak digunakan dalam operasi, penurunan lainnya dibebankan pada laba rugi. Aset tetap disusutkan hingga mencapai estimasi nilai sisa dengan menggunakan metode garis lurus selama masa manfaatnya sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">• Bangunan umum, waduk, dan prasarana 10 - 50 tahun• Instalasi dan mesin pembangkit 12 - 40 tahun• Perlengkapan transmisi 40 tahun• Perlengkapan distribusi 10 - 40 tahun• Perlengkapan umum 5 tahun• Kendaraan bermotor 5 tahun• Material cadangan utama 10 - 40 tahun• Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi yang digunakan dalam penyediaan listrik 10 tahun• Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi lainnya 10 tahun• Kapal dan perlengkapan 10 - 25 tahun	<p>Masa manfaat ekonomis, nilai sisa, dan metode penyusutan aset tetap ditetapkan, jika diperlukan, setidaknya disusutkan, pada setiap akhir tahun buku. Dampak dari setiap revisi diakui dalam laba rugi, ketika perubahan terjadi. Nilai tercatat aset segera diturunkan sebesar jumlah yang dapat dipulihkan apabila nilai tercatat aset lebih besar daripada estimasi jumlah yang dapat dipulihkan. Beban perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap diakui sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Aset tetap yang tidak digunakan lagi atau dijual, nilai tercatatnya dikeluarkan dari kelompok aset tetap. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut diakui dalam laba rugi. Aset tidak digunakan dalam operasi terdiri dari aset tetap yang akan direlokasi/ditransfer dan sedang diperbaiki.</p>
--	---	---

Sumber: Catatan Atas Laporan Keuangan PT PLN (Persero) Tahun 2017-2021

(Lanjutan)

Lampiran 5. Kebijakan Akuntansi PT PLN (Persero)

10

<p>Aset yang tidak digunakan dalam operasi disusutkan dengan metode garis lurus dan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset tetap.</p> <p>Aset dalam pembangunan merupakan biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan pembangunan aset tetap. Aset dalam pembangunan dinyatakan sebesar biaya perolehan, termasuk biaya pinjaman selama masa pembangunan dari pinjaman yang digunakan untuk pembangunan, beban penyusutan aset tetap yang digunakan dalam pekerjaan pembangunan dan biaya pengujian ketika aset dapat berfungsi, setelah dikurangi penjualan listrik ketika masa uji coba. Aset dalam pembangunan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan. Penyusutan dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan manajemen.</p>	<p>tersebut dibukukan dalam laba rugi. Aset yang untuk sementara waktu tidak digunakan dalam operasi dicatat sebagai bagian dari aset tetap. Aset yang sementara waktu tidak digunakan dalam operasi disusutkan dengan metode dan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset tetap.</p>
<p>PENURUNAN NILAI ASET NON-KUANGAN</p> <p>Aset yang memiliki masa manfaat yang tidak terbatas, misalnya goodwill, tidak diamortisasi namun diuji penurunan nilainya setiap tahun atau lebih sering apabila terdapat peristiwa atau perubahan pada kondisi yang mengindikasikan kemungkinan penurunan nilai. Aset yang diamortisasi diuji ketika terdapat indikasi bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat dipulihkan.</p> <p>Penurunan nilai diakui jika nilai tercatat aset melebihi jumlah terpulihkan. Jumlah terpulihkan adalah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai aset. Dalam menentukan penurunan nilai, aset dikelompokkan pada tingkat yang paling rendah dimana terdapat arus kas yang dapat diidentifikasi. Aset non-keuangan selain goodwill yang mengalami penurunan nilai diuji setiap tanggal pelaporan untuk menentukan apakah terdapat kemungkinan pemulihan penurunan nilai.</p> <p>Pembalikan rugi penurunan nilai untuk aset selain goodwill, diakui jika dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali dilakukan. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui langsung dalam laba rugi. Rugi penurunan nilai yang diakui atas goodwill tidak dibalik lagi.</p>	<p>PENURUNAN NILAI ASET NON-KUANGAN</p> <p>Aset yang diamortisasi atau disusutkan dikaji untuk penurunan nilai jika terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa jumlah tercatat kemungkinan tidak dapat dipulihkan. Kerugian penurunan nilai diakui sebesar kelebihan jumlah tercatat atas jumlah terpulihkannya. Jumlah terpulihkan merupakan jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Dalam rangka menguji penurunan nilai, aset dikelompokkan hingga unit terkecil yang menghasilkan arus kas terpisah (unit penghasil kas). Aset non-keuangan yang mengalami penurunan nilai, ditelaah untuk menentukan apakah terdapat kemungkinan pembalikan penurunan nilai, pada setiap tanggal pelaporan. Pembalikan rugi penurunan nilai, diakui jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi. Pembalikan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset melebihi biaya perolehan didepresiasi sebelum adanya pengakuan penurunan nilai pada tanggal pembalikan dilakukan.</p>
<p>BIAYA PINJAMAN</p> <p>Biaya bunga dan biaya pinjaman lainnya, seperti biaya diskonto pinjaman baik yang secara langsung atau tidak langsung digunakan untuk pendanaan konstruksi aset kualifikasian, dikapitalisasi hingga aset tersebut selesai dikonstruksikan. Untuk biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung pada aset kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi ditentukan dari biaya pinjaman aktual yang terjadi selama periode berjalan, dikurangi penghasilan yang diperoleh dari investasi sementara atas dana hasil pinjaman tersebut. Untuk pinjaman yang tidak dapat diatribusikan secara langsung pada suatu aset kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi ditentukan dengan mengalihkan tingkat kapitalisasi terhadap jumlah yang dikeluarkan untuk memperoleh aset kualifikasian. Tingkat kapitalisasi dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang biaya pinjaman yang dibagi dengan jumlah pinjaman yang tersedia selama periode, selain pinjaman yang secara spesifik ditambahi untuk tujuan memperoleh suatu aset kualifikasian.</p>	<p>BIAYA PINJAMAN</p> <p>Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi atau pembuatan aset kualifikasian, merupakan aset yang dibutuhkan waktu yang cukup lama agar siap untuk digunakan atau dijual, ditambahkan pada biaya perolehan aset tersebut, sampai dengan saat selesainya aset secara substansial siap untuk digunakan atau dijual. Untuk pinjaman yang tidak dapat diatribusikan secara langsung pada suatu aset kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi ditentukan dengan mengalihkan tingkat kapitalisasi terhadap jumlah yang dikeluarkan untuk memperoleh aset kualifikasian. Tingkat kapitalisasi dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang biaya pinjaman yang dibagi dengan jumlah pinjaman yang tersedia selama periode, selain pinjaman yang secara spesifik diambil untuk tujuan memperoleh suatu aset kualifikasian. Biaya pinjaman dikapitalisasi yang berasal dari rugi selisih kurs dibatasi sedemikian rupa sehingga jumlah dikapitalisasi tidak melebihi jumlah biaya pinjaman yang mungkin terjadi jika pinjaman tersebut dilakukan dengan menggunakan mata uang fungsional pada periode tersebut. Penghasilan investasi diperoleh atas investasi sementara dari pinjaman yang secara spesifik belum digunakan untuk pengeluaran aset kualifikasian dikurangi dari biaya pinjaman yang secara biaya pinjaman lainnya diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya.</p>
<p>PROPERTI INVESTASI</p> <p>Properti investasi adalah properti (tanah dari hak atas tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam</p>	<p>PROPERTI INVESTASI</p> <p>Properti investasi adalah properti (tanah dari hak atas tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam</p>

Sumber: Catatan Atas Laporan Keuangan PT PLN (Persero) Tahun 2017-2021

(Lanjutan)

Lampiran 5. Kebijakan Akuntansi PT PLN (Persero)

11

<p>kedua-duanya, dan tidak digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif, atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. Properti investasi akan mengalir ke entitas, dan biaya Perpeti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat Perpeti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan, meliputi harga pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung (biaya jasa hukum, pajak pengalihan properti, dan biaya transaksi lain). Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut. Setelah pengakuan awal tersebut, Grup menggunakan model nilai wajar dan mengukur seluruh properti investasi berdasarkan nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar properti investasi diakui dalam laba rugi pada tahun terjadinya. Nilai wajar didasarkan kepada harga pasar aktif, disesuaikan, jika perlu, dengan perbedaan dalam lokasi atau kondisi dari aset tersebut. Jika informasi tersebut tidak tersedia, Grup menggunakan metode penilaian alternatif, seperti harga terbaru di pasar yang kurang aktif atau proyeksi arus kas yang didiscountkan.</p> <p>Penentuan nilai wajar investasi dilakukan pada tanggal posisi keuangan didasarkan pada penilaian oleh penilai independen yang mempunyai kualifikasi profesional yang telah diakui dan relevan serta memiliki pengalaman yang telah diakui dan relevan dengan pengalaman terkini di lokasi dan kategori properti investasi yang ekonomis masa depan yang diperkirakan dari pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan ditentukan dari selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat laba rugi pada periode terjadinya penghentian atau pelepasan.</p>	<p>produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif, atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis masa depan yang terkait dengan properti investasi akan mengalir ke entitas, dan biaya perolehan properti investasi dapat diukur dengan andal.</p> <p>Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan, meliputi harga pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung (biaya jasa hukum, pajak pengalihan properti, dan biaya transaksi lain). Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut.</p> <p>Setelah pengakuan awal, Grup memilih menggunakan model nilai wajar dan mengukur seluruh properti investasi berdasarkan nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar properti investasi diakui dalam laba rugi pada tahun terjadinya. Nilai wajar didasarkan kepada harga pasar aktif, disesuaikan, jika perlu, dengan perbedaan dalam lokasi atau kondisi dari aset tersebut. Jika informasi tersebut tidak tersedia, Grup menggunakan metode penilaian alternatif, seperti harga terbaru di pasar yang kurang aktif atau proyeksi arus kas yang didiscountkan.</p> <p>Penentuan nilai wajar investasi dilakukan pada tanggal posisi keuangan didasarkan pada penilaian oleh penilai independen yang mempunyai kualifikasi profesional yang telah diakui dan relevan serta memiliki pengalaman yang telah diakui dan relevan dengan pengalaman terkini di lokasi dan kategori properti investasi yang ekonomis masa depan yang diperkirakan dari pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan ditentukan dari selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset dalam laba rugi pada tahun terjadinya penghentian atau pelepasan. Dalam menentukan nilai pertambahan dari pelepasan properti investasi, Grup mempertimbangkan dampak dari variabel pertambahan, adanya komponen pembiayaan yang signifikan, dan pertimbangan utang ke pembeli (jika ada).</p> <p>Pengalihan dilakukan ke (atau dari) properti investasi hanya ketika adanya perubahan pemakaian. Untuk pengalihan dari properti investasi menjadi properti yang dimiliki pemilik, biaya yang dianggap untuk akuntansi selanjutnya adalah nilai wajar pada tanggal perubahan pemakaian tersebut. Jika properti yang dimiliki pembeli menjadi properti investasi, Grup mengakui properti tersebut sesuai dengan kebijakan yang tertancup pada aset tetap sampai tanggal perubahan pemakaian.</p>
<p>INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA</p> <p><u>Investasi pada Entitas Asosiasi</u></p> <p>Entitas asosiasi adalah seluruh entitas dimana Perusahaan dan entitas anak memiliki pengaruh signifikan namun bukan pengendalian. Investasi entitas asosiasi dicatat dengan metode ekuitas. Sesuai metode ekuitas, investasi pada awalnya dicatat pada biaya, dan nilai tercatat akan menurun untuk mengakui bagian investor atas laba rugi. Di dalam investasi Perusahaan dan entitas anak atas entitas asosiasi termasuk goodwill yang diidentifikasi ketika akuisisi. Penghasilan dan aset dan liabilitas dari entitas asosiasi digabungkan dalam laporan keuangan konsolidasian dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, kecuali ketika investasi diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, sesuai PSAK 58 (Revisi 2009). Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan. Dalam menerapkan metode ekuitas, bagian Perusahaan dan entitas anak atas laba rugi entitas asosiasi setelah perolehan diakui dalam laba rugi, dan bagian Perusahaan atas penghasilan komprehensif lainnya setelah tanggal perolehan diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya. Perubahan dan penerimaan distribusi dari entitas asosiasi setelah tanggal perolehan disesuaikan terhadap nilai tercatat investasi. Bagian Perusahaan dan entitas anak atas kerugian entitas asosiasi yang melebihi nilai</p>	

Sumber: Catatan Atas Laporan Keuangan PT PLN (Persero) Tahun 2017-2021

(Lanjutan)

Lampiran 5. Kebijakan Akuntansi PT PLN (Persero)

12

	<p>tercatat dari investasi (yang mencakup semua kepentingan jangka panjang, secara substansi, merupakan bagian dari nilai investasi bersih Perusahaan dan entitas anak dalam entitas asosiasi) diakui hanya sebatas bahwa Perusahaan dan entitas anak telah mempunyai kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif atau melakukan pembayaran atas kewajiban entitas asosiasi. Keuntungan yang belum direalisasi atas transaksi antara Perusahaan dan entitas anak dengan entitas asosiasi dieliminasi sebesar bagian Perusahaan dan entitas anak dalam entitas asosiasi. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi kecuali transaksi tersebut memberikan bukti penurunan nilai atas aset yang ditransfer. Kebijakan akuntansi entitas asosiasi akan disesuaikan, apabila diperlukan, agar konsisten dengan kebijakan akuntansi Perusahaan dan entitas anak. Pada setiap tanggal pelaporan Perusahaan dan entitas anak menentukan apakah ada bukti objektif bahwa terdapat indikasi penurunan nilai untuk menentukan apakah perlu untuk mengakui penurunan nilai sehubungan dengan investasi pada entitas asosiasi Perusahaan dan entitas anak. Jika terdapat indikasi penurunan nilai, jumlah tercatat investasi yang tersisa (termasuk goodwill) diuji penurunan nilai sesuai dengan PSAK 48 (Revisi 2014), Penurunan Nilai Aset, sebagai suatu aset tunggal dengan membandingkan antara jumlah tercantum (mana yang lebih tinggi antara nilai pakai dan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual) dengan jumlah tercatatnya. Rugi penurunan nilai yang diakui pada keadaan tersebut tidak dialokasikan pada setiap aset yang membentuk bagian dari nilai tercatat investasi pada entitas asosiasi. Setiap pembalikan dari penurunan nilai diakui sesuai dengan PSAK 48 sepanjang jumlah terpolihkan dari investasi tersebut kemudian meningkat. Perusahaan dan entitas anak menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal ketika investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi sebagai berikut:</p> <p>(b) Jika sisa kepentingan dalam entitas asosiasi merupakan aset keuangan, maka Perusahaan dan entitas anak mengukur sisa kepentingan tersebut pada nilai wajar, dan</p> <p>(c) Ketika Perusahaan dan entitas anak menghentikan penggunaan metode ekuitas, Perusahaan dan entitas anak mencatat seluruh jumlah yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan investasi tersebut menggunakan dasar perlakuan yang sama dengan yang disarankan jika investee telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas terkait. Ketika Perusahaan dan entitas anak melakukan transaksi dengan entitas asosiasi, keuntungan dan kerugian dieliminasi sebesar kepentingan mereka dalam entitas asosiasi. Bagian partisipasi dalam ventura bersama Menurut PSAK 66 (Revisi 2015), pengaturan bersama diklasifikasikan sebagai operasi bersama atau ventura bersama bergantung pada hak dan kewajiban kontraktual para investor. Perusahaan dan entitas anak telah menilai sifat dari pengaturan bersama dan menentukan pengaturan tersebut sebagai ventura bersama. Hasil operasi, aset dan liabilitas dari ventura bersama disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian menggunakan metode ekuitas. Dalam menerapkan metode ekuitas, bagian Perusahaan dan entitas anak atas laba rugi ventura bersama setelah perolehan diakui dalam laba rugi, dan bagian Perusahaan atas penghasilan komprehensif lain setelah tanggal perolehan diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Perubahan dan penerimaan distribusi dari ventura bersama setelah tanggal perolehan disesuaikan terhadap nilai tercatat investasi. Jika bagian Perusahaan dan entitas anak atas rugi ventura bersama sama dengan atau melebihi kepentingannya pada ventura bersama, termasuk piutang tidak lancar tanpa jaminan, maka perusahaan menghentikan pengakuan bagiannya atas rugi lebih lanjut. Keuali Perusahaan dan entitas anak memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atau telah melakukan pembayaran atas nama ventura bersama.</p> <p>Penyesuaian dibentuk terhadap laporan keuangan konsolidasian untuk mengeliminasi bagian Perusahaan dan entitas anak atas keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi atas transaksi antara Perusahaan dan entitas anak dan ventura bersama. Ventura bersama dicatat dengan menggunakan metode ekuitas sampai dengan tanggal dimana Perusahaan dan entitas anak kehilangan pengaturan bersama atas entitas yang diatur bersama. Kebijakan akuntansi ventura bersama telah diubah jika diperlukan untuk memastikan konsistensi dari kebijakan yang diterapkan oleh Perusahaan dan entitas anak. Perusahaan dan entitas anak mengukur dan mengakui sisa investasi pada nilai wajar setelah hilangnya pengendalian dan</p>
---	--

Sumber: Catatan Atas Laporan Keuangan PT PLN (Persero) Tahun 2017-2021

(Lanjutan)

Lampiran 5. Kebijakan Akuntansi PT PLN (Persero)

<p>ventura bersama tidak menjadi anak atau entitas asosiasi. Selisih antara nilai tercatat atas hilangnya ventura bersama dengan agregat nilai wajar sisa investasi dan hasil pelipasan diakui pada laba rugi. Ketika sisa investasi mempunyai pengaruh yang signifikan, investasi tersebut ditatat sebagai investasi pada entitas asosiasi.</p> <p>BIAYA DIBAYAR DIMUKA Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.</p> <p>PAJAK PENGHASILAN Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan dan dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba rugi. Kecuali sepanjang pajak penghasilan yang berasal dari transaksi atau kejadian yang diakui, diluar laba rugi (baik dalam pendapatan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut pajak juga diakui di luar laporan laba rugi atau yang timbul dari akuntansi awal atau kombinasi bisnis.</p> <p>Dalam kasus kombinasi bisnis, pengaruh pajak termasuk dalam akuntansi kombinasi bisnis. Untuk pendapatan yang menjadi subjek pajak penghasilan final, beban pajak diakui secara proporsional dengan jumlah pendapatan akuntansi yang diakui dan disajikan dalam bagian dari akun beban operasional pada tahun berjalan dikurangkan pajak tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai pajak penghasilan. Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang tertunggak untuk periode tersebut, maka kelebihan diakui sebagai aset. Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada (ditasistasi dari) otoritas perpajakan yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang telah berlaku atau secara substansial telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dari kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan. Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari:</p> <ul style="list-style-type: none">a) pengakuan awal goodwill; ataub) pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak). <p>Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan konsolidasian dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diantisipasi akan berlaku dalam periode ketika liabilitas disetelkan atau aset dipulihkan dengan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substansial telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Perusahaan dan entitas anak ekspektasikan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya. Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus, jika dan hanya jika, ketika entitas memiliki hak yang dapat dipraktikkan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan</p>	<p>BIAYA DIBAYAR DIMUKA Biaya dibayar di muka diamortisasi selama periode manfaat dengan menggunakan metode garis lurus.</p> <p>PAJAK PENGHASILAN Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laba rugi, kecuali jika pajak itu terkait dengan kejadian atau transaksi yang diakui di penghasilan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, beban pajak tersebut masing-masing diakui pada penghasilan komprehensif lain atau secara langsung diakui ke ekuitas. Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan, di negara dimana Grup beroperasi dan menghasilkan penghasilan kena pajak. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang diambil dalam Surat Pernyataan Tahunan sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi atas peraturan pajak yang berlaku. Jika perlu, manajemen menentukan provisi dibentuk berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar pada otoritas pajak. Untuk pendapatan yang menjadi subjek pajak penghasilan final, beban pajak diakui secara proporsional dengan jumlah pendapatan akuntansi yang diakui dan disajikan dalam bagian dari akun beban operasional pada tahun berjalan dikurangkan pajak tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai pajak penghasilan. Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang tertunggak untuk periode tersebut, maka kelebihan diakui sebagai aset. Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada (ditasistasi dari) otoritas perpajakan yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang telah berlaku atau secara substansial telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dari kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan. Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari:</p> <ul style="list-style-type: none">a) pengakuan awal goodwill; ataub) pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak). <p>Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan konsolidasian dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diantisipasi akan berlaku dalam periode ketika liabilitas disetelkan atau aset dipulihkan dengan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substansial telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Perusahaan dan entitas anak ekspektasikan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya. Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus, jika dan hanya jika, ketika entitas memiliki hak yang dapat dipraktikkan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan</p>
--	---

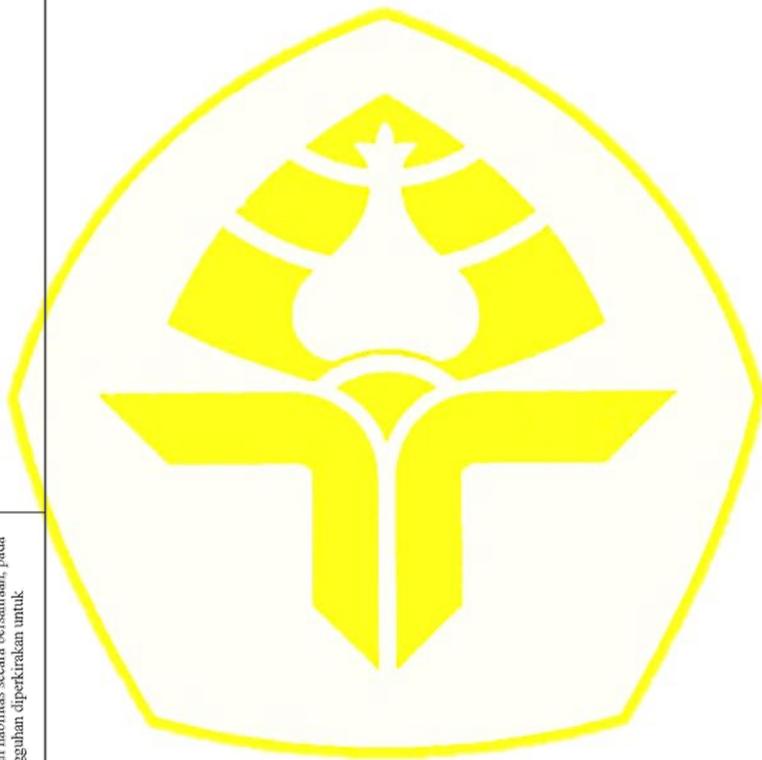
Sumber: Catatan Atas Laporan Keuangan PT PLN (Persero) Tahun 2017-2021

(Lanjutan)

Lampiran 5. Kebijakan Akuntansi PT PLN (Persero)

14

ketika aset pajak tangguhan dan ketika liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama serta Perusahaan dan entitas anak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diperkirakan untuk diselesaikan atau dipulihkan.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

Sumber: Catatan Atas Laporan Keuangan PT PLN (Persero) Tahun 2017-2021

Lampiran 6. Perhitungan Rasio Kas

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2017} &= \frac{\text{Kas+Bank+Surat Berharga Jangka Pendek}}{\text{Utang Lancar}} \times 100\% \\ &= \frac{42.291.959.000.000}{139.074.658.000.000} \times 100\% \\ &= 30,41\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2018} &= \frac{\text{Kas+Bank+Surat Berharga Jangka Pendek}}{\text{Utang Lancar}} \times 100\% \\ &= \frac{33.294.560.000.000}{157.895.954.000.000} \times 100\% \\ &= 21,09\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2019} &= \frac{\text{Kas+Bank+Surat Berharga Jangka Pendek}}{\text{Utang Lancar}} \times 100\% \\ &= \frac{46.598.783.000.000}{159.298.153.000.000} \times 100\% \\ &= 29,25\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2020} &= \frac{\text{Kas+Bank+Surat Berharga Jangka Pendek}}{\text{Utang Lancar}} \times 100\% \\ &= \frac{54.735.434.000.000}{149.659.239.000.000} \times 100\% \\ &= 36,57\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2021} &= \frac{\text{Kas+Bank+Surat Berharga Jangka Pendek}}{\text{Utang Lancar}} \times 100\% \\ &= \frac{37.968.399.000.000}{146.538.480.000.000} \times 100\% \\ &= 25,91\%\end{aligned}$$



Lampiran 7. Perhitungan Rasio Lancar

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2017} &= \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Utang Lancar}} \times 100\% \\ &= \frac{93.797.251.000.000}{139.074.658.000.000} \times 100\% \\ &= 67,44\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2018} &= \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Utang Lancar}} \times 100\% \\ &= \frac{113.415.251.000.000}{157.895.954.000.000} \times 100\% \\ &= 71,83\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2019} &= \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Utang Lancar}} \times 100\% \\ &= \frac{151.366.673.000.000}{159.298.153.000.000} \times 100\% \\ &= 95,02\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2020} &= \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Utang Lancar}} \times 100\% \\ &= \frac{97.153.318.000.000}{149.659.239.000.000} \times 100\% \\ &= 64,92\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2021} &= \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Utang Lancar}} \times 100\% \\ &= \frac{85.911.375.000.000}{146.538.480.000.000} \times 100\% \\ &= 58,63\%\end{aligned}$$

Lampiran 8. Perhitungan Rasio Total Modal Sendiri Terhadap Total Aset

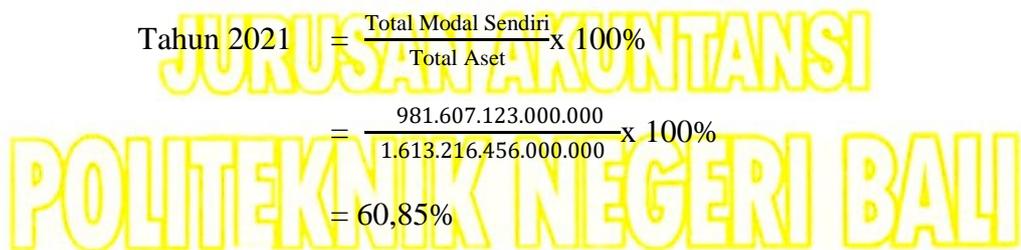
$$\begin{aligned} \text{Tahun 2017} &= \frac{\text{Total Modal Sendiri}}{\text{Total Aset}} \times 100\% \\ &= \frac{869.416.604.000.000}{1.334.957.657.000.000} \times 100\% \\ &= 65,13\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2018} &= \frac{\text{Total Modal Sendiri}}{\text{Total Aset}} \times 100\% \\ &= \frac{927.413.857.000.000}{1.492.487.745.000.000} \times 100\% \\ &= 62,14\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2019} &= \frac{\text{Total Modal Sendiri}}{\text{Total Aset}} \times 100\% \\ &= \frac{929.380.413.000.000}{1.585.055.013.000.000} \times 100\% \\ &= 58,63\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2020} &= \frac{\text{Total Modal Sendiri}}{\text{Total Aset}} \times 100\% \\ &= \frac{939.812.592.000.000}{1.589.059.781.000.000} \times 100\% \\ &= 59,14\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2021} &= \frac{\text{Total Modal Sendiri}}{\text{Total Aset}} \times 100\% \\ &= \frac{981.607.123.000.000}{1.613.216.456.000.000} \times 100\% \\ &= 60,85\% \end{aligned}$$



Lampiran 9. Perhitungan *Collection Periods*

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2017} &= \frac{\text{Piutang Usaha}}{\text{Pendapatan Usaha}} \times 365 \text{ hari} \\ &= \frac{22.466.843.000.000}{255.295.243.000.000} \times 365 \text{ hari} \\ &= 32,12 \text{ hari}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2018} &= \frac{\text{Piutang Usaha}}{\text{Pendapatan Usaha}} \times 365 \text{ hari} \\ &= \frac{23.802.663.000.000}{272.897.742.000.000} \times 365 \text{ hari} \\ &= 31,84 \text{ hari}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2019} &= \frac{\text{Piutang Usaha}}{\text{Pendapatan Usaha}} \times 365 \text{ hari} \\ &= \frac{25.130.538.000.000}{285.640.589.000.000} \times 365 \text{ hari} \\ &= 32,11 \text{ hari}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2020} &= \frac{\text{Piutang Usaha}}{\text{Pendapatan Usaha}} \times 365 \text{ hari} \\ &= \frac{21.278.416.000.000}{345.415.637.000.000} \times 365 \text{ hari} \\ &= 22,48 \text{ hari}\end{aligned}$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{\text{Piutang Usaha}}{\text{Pendapatan Usaha}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned}&= \frac{23.802.386.000.000}{368.174.270.000.000} \times 100\% \\ &= 23,60 \text{ hari}\end{aligned}$$

JURUSAN AKUNTANSI

POLITEKNIK NEGERI BALI

Lampiran 10. Perhitungan Rasio Perputaran Persediaan

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2017} &= \frac{\text{Persediaan}}{\text{Pendapatan Usaha}} \times 365 \text{ hari} \\ &= \frac{12.828.118.000.000}{255.295.243.000.000} \times 365 \text{ hari} \\ &= 18,34 \text{ hari}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2018} &= \frac{\text{Persediaan}}{\text{Pendapatan Usaha}} \times 365 \text{ hari} \\ &= \frac{15.506.567.000.000}{272.897.742.000.000} \times 365 \\ &= 20,74 \text{ hari}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2019} &= \frac{\text{Persediaan}}{\text{Pendapatan Usaha}} \times 365 \text{ hari} \\ &= \frac{12.934.233.000.000}{285.640.589.000.000} \times 365 \text{ hari} \\ &= 16,53 \text{ hari}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2020} &= \frac{\text{Persediaan}}{\text{Pendapatan Usaha}} \times 365 \text{ hari} \\ &= \frac{10.277.289.000.000}{345.415.637.000.000} \times 365 \text{ hari} \\ &= 10,86 \text{ hari}\end{aligned}$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{\text{Persediaan}}{\text{Pendapatan Usaha}} \times 365 \text{ hari}$$

$$\begin{aligned}&= \frac{10.393.419.000.000}{368.174.270.000.000} \times 365 \text{ hari} \\ &= 10,30 \text{ hari}\end{aligned}$$

JURUSAN AKUNTANSI

POLITEKNIK NEGERI BALI

Lampiran 10. Perhitungan Rasio Perputaran Total Aset

a. Perputaran Total Aset

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2017} &= \frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Total Aset}} \times 100\% \\ &= \frac{259.289.542.000.000}{1.334.957.657.000.000} \times 100\% \\ &= 19,42\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2018} &= \frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Total Aset}} \times 100\% \\ &= \frac{284.123.096.000.000}{1.492.487.745.000.000} \times 100\% \\ &= 19,04\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2019} &= \frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Total Aset}} \times 100\% \\ &= \frac{288.801.935.000.000}{1.585.055.013.000.000} \times 100\% \\ &= 18,22\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2020} &= \frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Total Aset}} \times 100\% \\ &= \frac{350.117.731.000.000}{1.589.059.781.000.000} \times 100\% \\ &= 22,03\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2021} &= \frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Total Aset}} \times 100\% \\ &= \frac{373.167.858.000.000}{1.613.216.456.000.000} \times 100\% \\ &= 23,13\%\end{aligned}$$

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

Lampiran 5. Perhitungan *Return on Equity*

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2017} &= \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\% \\ &= \frac{4.428.117.000.000}{869.416.604.000.000} \times 100\% \\ &= 0,51\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2018} &= \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\% \\ &= \frac{11.575.756.000.000}{927.413.857.000.000} \times 100\% \\ &= 1,25\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2019} &= \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\% \\ &= \frac{4.322.130.000.000}{929.380.413.000.000} \times 100\% \\ &= 0,47\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2020} &= \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\% \\ &= \frac{5.993.428.000.000}{939.812.592.000.000} \times 100\% \\ &= 0,64\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2021} &= \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\% \\ &= \frac{13.174.877.000.000}{981.607.123.000.000} \times 100\% \\ &= 1,34\%\end{aligned}$$

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

Lampiran 13. Perhitungan *Return on Investment*

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2017} &= \frac{\text{EBIT} + \text{Penyusutan}}{\text{Total Aset}} \times 100\% \\ &= \frac{8.544.072.000.000 + 29.160.597.000.000}{1.334.957.657.000.000} \times 100\% \\ &= 2,82\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2018} &= \frac{\text{EBIT} + \text{Penyusutan}}{\text{Total Aset}} \times 100\% \\ &= \frac{19.900.838.000.000 + 30.744.712.000.000}{1.492.487.745.000.000} \times 100\% \\ &= 3,39\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2019} &= \frac{\text{EBIT} + \text{Penyusutan}}{\text{Total Aset}} \times 100\% \\ &= \frac{26.119.210.000.000 + 35.318.071.000.000}{1.585.055.013.000.000} \times 100\% \\ &= 3,88\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2020} &= \frac{\text{EBIT} + \text{Penyusutan}}{\text{Total Aset}} \times 100\% \\ &= \frac{12.291.919.000.000 + 39.578.293.000.000}{1.589.059.781.000.000} \times 100\% \\ &= 3,26\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2021} &= \frac{\text{EBIT} + \text{Penyusutan}}{\text{Total Aset}} \times 100\% \\ &= \frac{23.221.084.000.000 + 42.226.789.000.000}{1.613.216.456.000.000} \times 100\% \\ &= 4,06\% \end{aligned}$$

Lampiran 14. Perhitungan Kesehatan Kinerja Keuangan Tahun 2017

Rasio kas (*cash ratio*), hasil 30,41% skor 2,5

Rasio lancar (*current ratio*), hasil 67,44% skor 0

Rasio total modal sendiri terhadap total aset, hasil 65,13% skor 4,5

Collection periods, hasil 32,12 hari skor 4

Perputaran Persediaan, hasil 18,34 hari skor 4

Perputaran total aset, hasil 19,42 skor 0,5

Return on equity, hasil 0,51% skor 1,5

Return on investment, hasil 2,82% skor 2,5

Kesehatan kinerja keuangan = (skor rasio kas + skor rasio lancar + skor rasio total modal sendiri terhadap total aset + skor *collection periods* + skor Perputaran Persediaan + skor perputaran total aset + skor *Return on equity* + skor *return on investment*) / 50%

$$= (2,5 + 0 + 4,5 + 4 + 4 + 0,5 + 1,5 + 2,5) / 50\%$$

$$= 19,5 / 50\%$$

$$= 39$$

Lampiran 15. Perhitungan Kesehatan Kinerja Keuangan Tahun 2018

Rasio kas (*cash ratio*), hasil 21,09% skor 2

Rasio lancar (*current ratio*), hasil 71,83% skor 0

Rasio total modal sendiri terhadap total aset, hasil 62,14% skor 4,5

Collection periods, hasil 31,84 hari skor 4

Perputaran Persediaan, hasil 20,74 hari skor 4

Perputaran total aset, hasil 19,04% skor 0,5

Return on equity, hasil 1,25% skor 3

Return on investment, hasil 3,39% skor 3

Kesehatan kinerja keuangan = (skor rasio kas + skor rasio lancar + skor rasio total modal sendiri terhadap total aset + skor *collection periods* + skor perputaran persediaan + skor perputaran total aset + skor *Return on equity* + skor *Return on investment*) / 50%

$$= (2 + 0 + 4,5 + 4 + 4 + 0,5 + 3 + 3) / 50\%$$

$$= 21 / 50\%$$

$$= 42$$

Lampiran 16. Perhitungan Kesehatan Kinerja Keuangan Tahun 2019

Rasio kas (*cash ratio*), hasil 29,25% skor 2,5

Rasio lancar (*current ratio*), hasil 95,02% skor 1

Rasio total modal sendiri terhadap total aset, hasil 58,63% skor 5

Collection periods, hasil 32,12 hari skor 4

Perputaran Persediaan, hasil 16,53 hari skor 4

Perputaran total aset, hasil 18,22 skor 0,5

Return on equity, hasil 0,47% skor 1,5

Return on investment, hasil 3,88% skor 3

Kesehatan kinerja keuangan = (skor rasio kas + skor rasio lancar + skor rasio total modal sendiri terhadap total aset + skor *collection periods* + skor perputaran persediaan + skor perputaran total aset + skor *return on equity* + skor *return on investment*) / 50%

$$= (2,5 + 1 + 5 + 4 + 4 + 0,5 + 1,5 + 3) / 50\%$$
$$= 21,5 / 50\%$$

$$= 43$$

JURUSAN AKUNTANSI

POLITEKNIK NEGERI BALI

Lampiran 17. Perhitungan Kesehatan Kinerja Keuangan Tahun 2020

Rasio kas (*cash ratio*), hasil 36,57% skor 3

Rasio lancar (*current ratio*), hasil 64,92% skor 0

Rasio total modal sendiri terhadap total aset, hasil 59,14% skor 5

Collection periods, hasil 22,48 hari skor 4

Perputaran persediaan, hasil 10,86 hari skor 4

Perputaran total aset, hasil 22,03% skor 1

Return on equity, hasil 0,64% skor 1,5

Return on investment, hasil 3,26% skor 3

Kesehatan kinerja keuangan = (skor rasio kas + skor rasio lancar + skor rasio total modal sendiri terhadap total aset + skor *collection periods* + skor Perputaran Persediaan + skor perputaran total aset + skor *Return on equity* + skor *return on investment*) / 50%

$$= (3 + 0 + 5 + 4 + 4 + 1 + 1,5 + 3) / 50\%$$
$$= 21,5 / 50\%$$

$$= 39$$

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

Lampiran 18. Perhitungan Kesehatan Kinerja Keuangan Tahun 2021

Rasio kas (*cash ratio*), hasil 25,91% skor 2,5

Rasio lancar (*current ratio*), hasil 58,63% skor 0

Rasio total modal sendiri terhadap total aset, hasil 60,85% skor 4,5

Collection periods, hasil 23,60 hari skor 4

Perputaran Persediaan, hasil 10,30 hari skor 4

Perputaran total aset, hasil 23,13% skor 1

Return on equity, hasil 1,34% skor 3

Return on investment, hasil 4,06% skor 3

Kesehatan kinerja keuangan = (skor rasio kas + skor rasio lancar + skor rasio total modal sendiri terhadap total aset + skor *collection periods* + skor Perputaran Persediaan + skor Perputaran total aset + skor *Return on equity* + skor *Return on investment*) / 50%

$$= (2,5 + 0 + 4,5 + 4 + 4 + 1 + 3 + 3) / 50\%$$

$$= 22 / 50\%$$

$$= 44$$

Lampiran 19. Daftar dan Hasil Wawancara, Dokumentasi

Daftar dan Hasil Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Laporan keuangan PT PLN (Persero) ini apakah gabungan dari seluruh unit di Indonesia dan bagikan kepada seluruh unit?	Iya betul, ini merupakan gabungan dari seluruh unit yang sudah di rekonsiliasi dan di audit, <i>terus</i> di bagikan ke seluruh unit. Laporan keuangannya juga sudah di <i>publish</i> di website resmi PLN dan di BEI, jadi bisa di akses masyarakat umum. Yang dibagikan di BEI dan website resmi PLN tidak berbeda dengan yang dibagikan ke seluruh unit.
2	Yang dimaksud persediaan di PT PLN (Persero) ini apa saja pak?	Kalau berdasarkan laporan keuangan PLN yang merupakan gabungan dari seluruh unit di Indonesia, persediaannya itu batubara, bahan bakar dan pelumas, <i>switchgear</i> dan jaringan, alat ukur, pembatas, dan kontrol, kabel, transformator perlengkapan dan bahan pendukung
3	Pendapatan dari PLN ini apa saja pak?	Di PLN ada 2 jenis pendapatan, pendapatan usaha dan non usaha. Detailnya juga sudah ada di catatan atas laporan keuangan.
4	Bisnis yang di jalankan PLN saat ini apa saja pak?	Yang dijalankan sekarang tuh masih Pembangkitan, Transmisi, dan Distribusi. Kalo sekarang PLN juga fokus ke pengembangan penjualan bahan bakar untuk alat transportasi listrik, jadi pendapatannya juga sekarang dari sana. <i>Trus</i> juga kompor induksi yang kita jual ke industri-industri.
4	Pada PLN apakah masih menjalankan fungsi pembangkitan pak? mengingat sudah ada anak perusahaannya dengan nama Indonesia Power	Masih, tapi memang sudah tidak sebanyak dulu sebelum Indonesia Power. Biasanya yang masih dikelola oleh pemerintah daerah, seperti di daerah Sumatera dan Kalimantan.



POLITEKNIK NEGERI BALI

Lampiran 20. Keputusan Menteri BUMN KEP-100/MBU/2002



KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR : KEP-100/MBU/2002

TENTANG
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

- Menimbang : a. bahwa perkembangan dunia usaha dalam situasi perekonomian yang semakin terbuka perlu dilandasi dengan sarana dan sistem penilaian kerja yang dapat mendorong perusahaan ke arah peningkatan efisiensi dan daya saing;
- b. bahwa dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198/KMK.016/1998 dan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara/Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep.215/M- BUMN/1999 telah ditetapkan ketentuan tentang penilaian tingkat kesehatan/penilaian tingkat kinerja Badan Usaha Milik Negara;
- c. bahwa dengan dialihkannya kedudukan, tugas dan wewenang Menteri BUMN pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara, maka dipandang perlu meninjau kembali keputusan sebagaimana tersebut pada huruf b, khususnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198/KMK.016/1998.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4101);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (PERUM) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3732);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan (PERJAN) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3928);

6. Peraturan/2

(Lanjutan)

Lampiran 20. Keputusan Menteri BUMN KEP-100/MBU/2002



Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-100/MBU/2002
Tanggal : 4 Juni 2002

KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-2-

6. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2001 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4137);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/ Tahun 2001.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BADAN USAHA MILIK NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya dalam Keputusan ini disingkat BUMN, adalah Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 dan Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998.
2. Anak Perusahaan BUMN adalah Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang sekurang-kurangnya 51% sahamnya dimiliki oleh BUMN.

Pasal 2

- 1) Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN berlaku bagi seluruh BUMN non jasa keuangan maupun BUMN jasa keuangan kecuali Persero Terbuka dan BUMN yang dibentuk dengan Undang-undang tersendiri.
- 2) BUMN non jasa keuangan adalah BUMN yang bergerak dibidang infrastruktur dan non infrastruktur sebagaimana pada lampiran I.
- 3) BUMN jasa keuangan adalah BUMN yang bergerak dalam bidang usaha perbankan, asuransi, jasa pembiayaan dan jasa penjaminan.

BAB II/3

(Lanjutan)

Lampiran 20. Keputusan Menteri BUMN KEP-100/MBU/2002



Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-100/MBU/2002
Tanggal : 4 Juni 2002

KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-3-

BAB II
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN

Pasal 3

- (1) Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN digolongkan menjadi :
 - a. SEHAT, yang terdiri dari :
 - AAA apabila total (TS) lebih besar dari 95
 - AA apabila $80 < TS \leq 95$
 - A apabila $65 < TS \leq 80$
 - b. KURANG SEHAT, yang terdiri dari :
 - BBB apabila $50 < TS \leq 65$
 - BB apabila $40 < TS \leq 50$
 - B apabila $30 < TS \leq 40$
 - c. TIDAK SEHAT, yang terdiri dari :
 - CCC apabila $20 < TS \leq 30$
 - CC apabila $10 < TS \leq 20$
 - C apabila $TS \leq 10$
- (2) Tingkat Kesehatan BUMN ditetapkan berdasarkan penilaian terhadap kinerja Perusahaan untuk tahun buku yang bersangkutan yang meliputi penilaian :
 - a. Aspek Keuangan.
 - b. Aspek Operasional.
 - c. Aspek Administrasi.
- (3) Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN sesuai keputusan ini hanya diterapkan bagi BUMN apabila hasil pemeriksaan akuntan terhadap perhitungan keuangan tahunan perusahaan yang bersangkutan dinyatakan dengan kualifikasi "Wajar Tanpa Pengecualian" atau kualifikasi "Wajar Dengan Pengecualian" dari akuntan publik atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
- (4) Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN ditetapkan setiap tahun dalam pengesahan laporan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau Menteri BUMN untuk Perusahaan Umum (PERUM).

BAB III
BADAN USAHA MILIK NEGARA NON JASA KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN yang bergerak dibidang non jasa keuangan dibedakan antara BUMN yang bergerak dalam bidang infrastruktur selanjutnya disebut BUMN INFRASTRUKTUR dan BUMN yang bergerak dalam bidang non infrastruktur yang selanjutnya disebut BUMN NON INFRASTRUKTUR dengan pengelompokan sebagaimana pada lampiran I.

2. Perubahan/4

(Lanjutan)

Lampiran 20. Keputusan Menteri BUMN KEP-100/MBU/2002



Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-100/MBU/2002
Tanggal : 4 Juni 2002

KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-4-

- (2) Perubahan pengelompokan BUMN dalam kategori BUMN INFRASTRUKTUR dan BUMN NON INFRASTRUKTUR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 5

- (1) BUMN INFRASTRUKTUR adalah BUMN yang kegiatannya menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan masyarakat luas, yang bidang usahanya meliputi :
- Pembangkitan, transmisi atau pendistribusian tenaga listrik.
 - Pengadaan dan atau pengoperasian sarana pendukung pelayanan angkutan barang atau penumpang baik laut, udara atau kereta api.
 - Jalan dan jembatan tol, dermaga, pelabuhan laut atau sungai atau danau, lapangan terbang dan bandara.
 - Bendungan dan irigrasi.
- (2) Penambahan atau pengurangan bidang-bidang atau jenis-jenis kegiatan untuk menentukan kriteria BUMN INFRASTRUKTUR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara.
- (3) BUMN NON INFRASTRUKTUR adalah BUMN yang bidang usahanya diluar bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6

Indikator Penilaian Aspek Keuangan, Aspek Operasional, Aspek Administrasi BUMN yang bergerak di bidang usaha non jasa keuangan sebagaimana terdapat dalam Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN non jasa keuangan (Lampiran II).

BAB IV
BADAN USAHA MILIK NEGARA JASA KEUANGAN

Pasal 7

Penilaian tingkat kesehatan BUMN jasa keuangan dibedakan antara BUMN yang bergerak dalam bidang usaha perbankan, asuransi, jasa pembiayaan dan jasa penjaminan.

Pasal 8

Pengelompokan BUMN yang bergerak dalam bidang usaha jasa keuangan dan indikator penilaian Hasil penilaian Aspek Keuangan, Aspek Operasional, Aspek Administrasi ditetapkan dengan Keputusan Menteri BUMN tersendiri.

BAB V/5

(Lanjutan)

Lampiran 20. Keputusan Menteri BUMN KEP-100/MBU/2002



Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-100/MBU/2002
Tanggal : 4 Juni 2002

KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-5-

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

BUMN wajib menerapkan penilaian Tingkat Kesehatan BUMN berdasarkan keputusan ini kepada Anak Perusahaan BUMN sesuai dengan bidang usaha Anak Perusahaan BUMN yang bersangkutan.

Pasal 10

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka:

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198/KMK.016/1998 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara ;
2. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara/Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep.215/M- BUMN/1999 tentang Penilaian Tingkat Kinerja Badan Usaha Milik Negara, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku untuk penilaian Tingkat Kesehatan BUMN tahun buku 2002.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal: 04 Juni 2002

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

t t d

LAKSAMANA SUKARDI

ttd

Victor Hutapea
NIP 060051008

POLITEKNIK NEGERI BALI

(Lanjutan)

Lampiran 20. Keputusan Menteri BUMN KEP-100/MBU/2002



Lampiran I : 1/4
Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-100/MBU/2002
Tanggal : 4 Juni 2002

KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA

SALINAN

TABEL KELOMPOK BUMN
INFRA STRUKTUR DAN NON INFRA STRUKTUR

No.	BUMN INFRA STRUKTUR	BUMN NON INFRA STRUKTUR
I.	SEKTOR INDUSTRI DAN PERDAGANGAN	
		Bidang Industri Pupuk dan Semen
		1. PT Pupuk Sriwidjaja
		2. PT Asean Aceh Fertilizer
		3. PT Semen Baturaja
		4. PT Semen Kupang
		Bidang Niaga
		1. PT Dharma Niaga
		2. PT Pantja Niaga
		3. PT Cipta Niaga
		4. PT Sarinah
		Bidang Industri Farmasi dan Aneka Industri
		1. PT Bhanda Ghara Reksa
		2. PT Berdikari
		3. PT Indo Farma
		4. PT Kimia Farma
		5. PT Bio Farma
		6. PT Rajawali Nusantara Indonesia
		7. PT Garam
		8. PT Industri Gelas
		9. PT Industri Soda Indonesia
		10. PT Sandang Nusantaara
		11. PT Cambriks Primisima
		Bidang Pertambangan dan Energi
		1. PT Sarana karya
		2. PT Batubara Bukit Asam
		3. PT Konservasi Energi Abadi
		4. PT Batan Tehnologi
		5. PT Perusahaan Gas Negara
		Bidang Kertas, Percetakan dan Penerbitan
		1. PT Kertas Lece
		2. PT Kertas Kraft Aceh
		3. PT Pradnya Paramita
		4. PT Balai Pustaka

(Lanjutan)

Lampiran 20. Keputusan Menteri BUMN KEP-100/MBU/2002



Lampiran I : 2/4
Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-100/MBU/2002
Tanggal : 4 Juni 2002

KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA

TABEL KELOMPOK BUMN
INFRA STRUKTUR DAN NON INFRA STRUKTUR

No.	BUMN INFRA STRUKTUR	BUMN NON INFRA STRUKTUR
		Bidang Industri Strategis
		1. PT Dirgantara Indonesia
		2. PT DAHANA
		3. PT Barata Indonesia
		4. PT Borna Bisma Indra
		5. PT Krakatau Steel
		6. PT Industri Kereta Api
		7. PT Industri Telekomunikasi Indonesia
		8. PT Len Industri
II.	SEKTOR KAWASAN INDUSTRI JASA KONSTRUKSI DAN KONSULTAN KONSTRUKSI	
		Bidang Kawasan Industri
		1. PT Kawasan Berikat Nusantara
		2. PT Kawasan Industri Makasar
		3. PT kawasan Industri Medan
		4. PT Kawasan Industri Wijaya
		5. PT PDI Batam
		Bidang Konstruksi Bangunan
		1. PT Nindya Karya
		2. PT Wijaya Karya
		3. PT Waskita Karya
		4. PT Adhi Karya
		5. PT Brantas Abipraya
		6. PT Hutama Karya
		7. PT Istaka Karya
		8. PT Pembangunan Perumahan
		Bidang Konsultan Konstruksi
		1. PT Bina Karya
		2. PT Indah Karya
		3. PT Indra Karya
		4. PT Virama Karya
		5. PT Yodya Karya
		Bidang Penunjang Konstruksi dan Jalan Tol
		1. PT Amarta Karya
		2. PT Dok Perkapalan Kodja Bahari
		3. PT Dok dan Perkapalan Surabaya
		4. PT Industri Kapal Indonesia
		5. PT Jasa Marga

(Lanjutan)

Lampiran 20. Keputusan Menteri BUMN KEP-100/MBU/2002



Lampiran I : 3/4
Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-100/MBU/2002
Tanggal : 4 Juni 2002

KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA

TABEL KELOMPOK BUMN
INFRA STRUKTUR DAN NON INFRA STRUKTUR

No.	BUMN INFRA STRUKTUR	BUMN NON INFRA STRUKTUR
III.	SEKTOR PERHUBUNGAN, TELEKOMUNIKASI DAN PARIWISATA	
	Bidang Prasarana Perhubungan Laut	
	1. PT Pelabuhan Indonesia I	
	2. PT Pelabuhan Indonesia II	
	3. PT Pelabuhan Indonesia III	
	4. PT Pelabuhan Indonesia IV	
	5. PT Rukindo	
	6. PT Varuna Tirta Prakasya	
	Bidang Prasarana Perhubungan Udara	
	1. PT Angkasa Pura I	
	2. PT Angkasa Pura II	
	Bidang Sarana Perhubungan	
	1. PT Pelayaran Djakarta Lloyd	1. PT Pelayaran Nasional Indonesia
	2. PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	2. PT Garuda Indonesia
	3. PT Pelayaran Bahtera Adiguna	3. PT Merpati Airlines
	4. PT Kereta Api Indonesia	
		Bidang Pos
		1. PT Pos Indonesia
		Bidang Pariwisata
		1. PT Hotel Indonesia dan Natour
		2. PT Pengembangan Pariwisata Bali
		3. PT TWC Borobudur, Prambanan & Ratu Boko
		Bidang Penyiaran
		1. PT Televisi Republik Indonesia
IV.	SEKTOR PERTANIAN, PERKEBUNAN KEHUTANAN PERDAGANGAN	
		Bidang Perkebunan
		1. PT Perkebunan Nusantara I
		2. PT Perkebunan Nusantara II
		3. PT Perkebunan Nusantara III
		4. PT Perkebunan Nusantara IV
		5. PT Perkebunan Nusantara V
		6. PT Perkebunan Nusantara VI
		7. PT Perkebunan Nusantara VII
		8. PT Perkebunan Nusantara VIII
		9. PT Perkebunan Nusantara IX

(Lanjutan)

Lampiran 20. Keputusan Menteri BUMN KEP-100/MBU/2002



Lampiran I : 4/4
Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-100/MBU/2002
Tanggal : 4 Juni 2002

KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA

TABEL KELOMPOK BUMN
INFRA STRUKTUR DAN NON INFRA STRUKTUR

NO.	BUMN INFRA STRUKTUR	BUMN NON INFRA STRUKTUR
		10. PT Perkebunan Nusantara X
		11. PT Perkebunan Nusantara XI
		12. PT Perkebunan Nusantara XII
		13. PT Perkebunan Nusantara XIII
		14. PT Perkebunan Nusantara XIV
		Bidang Perikanan
		1. PT Usaha Mina
		2. PT Perikanan Samodra Besar
		3. PT Tirta Raya Mina
		4. PT Perikani
		Bidang Pertanian
		1. PT Pertani
		2. PT Sang Hyang Seri
		Bidang Kehutanan
		1. PT Inhutani I
		2. PT Inhutani II
		3. PT Inhutani III
		4. PT Inhutani IV
		5. PT Perhutani
V.	SEKTOR PELAYANAN UMUM	
	1. Perum Perumnas	
	2. Perum Jasa Tirta I	
	3. Perum Jasa Tirta II	
	4. Perum Prasarana Perikanan Samodra Besar	
	5. Perum PPD	
	6. Perum Damri	
		1. Perum Percetakan Negara RI
		2. Perum Sarana Pengembangan Usaha
		3. Perum Peruri
		4. Perum Pegadaian
		5. Perum PFN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum

ttd

Victor Hutapea
NIP 060051008

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

t t d

LAKSAMANA SUKARDI

(Lanjutan)

Lampiran 20. Keputusan Menteri BUMN KEP-100/MBU/2002



Lampiran II : 1/18
Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-100/MBU/2002
Tanggal : 4 Juni 2002

KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA

SALINAN

TATA CARA PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN
BUMN NON JASA KEUANGAN

I. ASPEK KEUANGAN

1. Total bobot
 - BUMN INFRA STRUKTUR (Infra) 50
 - BUMN NON INFRA STRUKTUR (Non infra) 70
2. Indikator yang dinilai dan masing-masing bobotnya.
Dalam penilaian aspek keuangan ini, indikator yang dinilai dan masing-masing bobotnya adalah seperti pada tabel 1 dibawah ini :

Tabel 1 : Daftar indikator dan bobot aspek keuangan

Indikator	Bobot	
	Infra	Non Infra
1. Imbalan kepada pemegang saham (ROE)	15	20
2. Imbalan Investasi (ROI)	10	15
3. Rasio Kas	3	5
4. Rasio Lancar	4	5
5. Colection Periods	4	5
6. Perputaran persediaan	4	5
7. Perputaran total asset	4	5
8. Rasio modal sendiri terhadap total aktiva	6	10
Total Bobot	50	70

3. Metode Penilaian
 - a. Imbalan kepada pemegang saham/Return On Equity (ROE)

Rumus:

$$ROE : \frac{\text{Laba setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

Definisi :

- Laba setelah Pajak adalah Laba setelah Pajak dikurangi dengan laba hasil penjualan dari :
 - Aktiva tetap
 - Aktiva Non Produktif
 - Aktiva Lain-lain
 - Saham Penyertaan Langsung

(Lanjutan)

Lampiran 20. Keputusan Menteri BUMN KEP-100/MBU/2002



Lampiran II : 2/18
Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-100/MBU/2002
Tanggal : 4 Juni 2002

KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA

- Modal Sendiri adalah seluruh komponen Modal Sendiri dalam neraca perusahaan pada posisi akhir tahun buku dikurangi dengan komponen Modal sendiri yang digunakan untuk membiayai Aktiva Tetap dalam Pelaksanaan, dan laba tahun berjalan. Dalam Modal sendiri tersebut di atas termasuk komponen kewajiban yang belum ditetapkan statusnya.
- Aktiva Tetap dalam pelaksanaan adalah posisi pada akhir tahun buku Aktiva Tetap yang sedang dalam tahap pembangunan.

Tabel 2: Daftar skor penilatan ROE

ROE (%)	Skor	
	Infra	Non Infra
15 < ROE	15	20
13 < ROE ≤ 15	13,5	18
11 < ROE ≤ 13	12	16
9 < ROE ≤ 11	10,5	14
7,9 < ROE ≤ 9	9	12
6,6 < ROE ≤ 7,9	7,5	10
5,3 < ROE ≤ 6,6	6	8,5
4 < ROE ≤ 5,3	5	7
2,5 < ROE ≤ 4	4	5,5
1 < ROE ≤ 2,5	3	4
0 < ROE ≤ 1	1,5	2
ROE < 0	1	0

Contoh perhitungan :

PT "A" (BUMN Non Infra) mempunyai ROE 10 %, maka sesuai tabel 2 skor untuk indikator ROE adalah 14.

b. Imbalan Investasi Return On Investment (ROI)

Rumus :

$$\text{ROI} = \frac{\text{EBIT} + \text{Penyusutan}}{\text{Capital Employed}} \times 100\%$$

Definisi :

- EBIT adalah laba sebelum bunga dan pajak dikurangi laba dari hasil penjualan dari :
 - Aktiva Tetap
 - Aktiva lain-lain
 - Aktiva Non Produktif
 - Saham penyertaan langsung
- Penyusutan adalah Depresiasi, Amortisasi dan Deplesi
- Capital Employed adalah posisi pada akhir tahun buku Total Aktiva dikurangi Aktiva Tetap dalam pelaksanaan.

(Lanjutan)

Lampiran 20. Keputusan Menteri BUMN KEP-100/MBU/2002



Lampiran II : 3/18
Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-100/MBU/2002
Tanggal : 4 Juni 2002

KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA

Tabel 3 : Daftar Skor penilaian ROI

ROI (%)	Skor	
	Infra	Non Infra
18 < ROI	10	15
15 < ROI ≤ 18	9	13,5
13 < ROI ≤ 15	8	12
12 < ROI ≤ 13	7	10,5
10,5 < ROI ≤ 12	6	9
9 < ROI ≤ 10,5	5	7,5
7 < ROI ≤ 9	4	6
5 < ROI ≤ 7	3,5	5
3 < ROI ≤ 5	3	4
1 < ROI ≤ 3	2,5	3
0 < ROI ≤ 1	2	2
ROI < 0	0	1

Contoh perhitungan :

PT "A" (BUMN Infra) memiliki ROI 14 %, maka sesuai tabel 3 skor untuk indikator ROI adalah 8

c. Rasio Kas/Cash Ratio

Rumus:

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Kas} + \text{Bank} + \text{Surat Berharga Jangka pendek}}{\text{Current Liabilities}} \times 100 \%$$

Definisi :

- Kas, Bank dan surat Berharga Jangka Pendek adalah posisi masing-masing pada akhir tahun buku.
- Current Liabilities adalah posisi seluruh kewajiban Lancar pada akhir tahun buku.

Tabel 4 : Daftar skor penilaian cash ratio

Cash Ratio = x (%)	Skor	
	Infra	Non Infra
x ≥ 35	3	5
25 ≤ x < 35	2,5	4
15 ≤ x < 25	2	3
10 ≤ x < 15	1,5	2
5 ≤ x < 10	1	1
0 ≤ x < 5	0	0

Contoh perhitungan :

PT "A" (BUMN Infra) memiliki cash ratio sebesar 32%, maka sesuai tabel 4 skor untuk indikator cash ratio adalah 2,5

(Lanjutan)

Lampiran 20. Keputusan Menteri BUMN KEP-100/MBU/2002



Lampiran II : 4/18
Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-100/MBU/2002
Tanggal : 4 Juni 2002

KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA

d. Rasio Lancar/Current Ratio

Rumus :

$$\text{Current ratio} : \frac{\text{Current Asset}}{\text{Current Liabilities}} \times 100 \%$$

Definisi :

- Current Asset adalah posisi Total Aktiva Lancar pada akhir tahun buku
- Current Liabilities adalah posisi Total Kewajiban Lancar pada akhir tahun buku .

Tabel 5 : Daftar skor penilaian current ratio

Current Ratio = x (%)	Skor	
	Infra	Non Infra
125 <= x	3	5
110 <= x < 125	2,5	4
100 <= x < 110	2	3
95 <= x < 100	1,5	2
90 <= x < 95	1	1
x < 90	0	0

Contoh perhitungan :

PT "A" (BUMN Non Infra) memiliki current ratio sebesar 115 %, maka sesuai tabel 5 skor untuk Indikator Current Ratio adalah 4

e. Collection Periods (CP)

Rumus :

$$\text{CP} = \frac{\text{Total Piutang Usaha}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 365 \text{ hari}$$

Definisi :

- Total Piutang Usaha adalah posisi Piutang Usaha setelah dikurangi Cadangan Penyisihan Piutang pada akhir tahun buku.
- Total Pendapatan Usaha adalah jumlah Pendapatan Usaha selama tahun buku.

Tabel 6 : Daftar skor penilaian collection periods

CP = x (hari)	Perbaikan = x (hari)	Skor	
		Infra	Non Infra
x <= 60	x > 35	4	5
60 < x <= 90	30 < x <= 35	3,5	4,5
90 < x <= 120	25 < x <= 30	3	4
120 < x <= 150	20 < x <= 25	2,5	3,5
150 < x <= 180	15 < x <= 20	2	3
180 < x <= 210	10 < x <= 15	1,6	2,4
210 < x <= 240	6 < x <= 10	1,2	1,8
240 < x <= 270	3 < x <= 6	0,8	1,2
270 < x <= 300	1 < x <= 3	0,4	0,6
300 < x	0 < x <= 1	0	0

Skor yang digunakan dipilih yang terbaik dari kedua skor menurut tabel 6 diatas.

(Lanjutan)

Lampiran 20. Keputusan Menteri BUMN KEP-100/MBU/2002



Lampiran II: 5/18
Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-100/MBU/2002
Tanggal : 4 Juni 2002

KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA

Contoh perhitungan :

Contoh 1 :

PT "A" (BUMN Non Infra) pada tahun 1999 memiliki Collection Periods 120 hari dan pada tahun 1998 sebesar 127 hari.

Sesuai tabel 6 di atas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Collection Periods : 4
- Perbaikan Collection periods (7 hari) : 1,8

Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 4

Contoh 2 :

PT "B" (BUMN Infrastruktur) pada tahun 1999 memiliki Collection Periods 240 hari dan pada tahun 1998 sebesar 272 hari.

Sesuai tabel 6 diatas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Collection periods : 1,2
- Perbaikan Collection periods (32 hari) : 3,5

Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3,5

f. Perputaran Persediaan (PP)

Rumus :

$$PP = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 365$$

Definisi :

- Total Persediaan adalah seluruh persediaan yang digunakan untuk proses produksi pada akhir tahun buku yang terdiri dari persediaan bahan baku, persediaan barang setengah jadi dan persediaan barang jadi ditambah persediaan peralatan dan suku cadang.
- Total Pendapatan Usaha adalah Total Pendapatan Usaha dalam tahun buku yang bersangkutan.

Tabel 7 : Daftar skor penilaian perputaran persediaan

PP = x (hari)	Perbaikan (hari)	Skor	
		Infra	Non Infra
$x \leq 60$	$35 < x$	4	5
$60 < x \leq 90$	$30 < x \leq 35$	3,5	4,5
$90 < x \leq 120$	$25 < x \leq 30$	3	4
$120 < x \leq 150$	$20 < x \leq 25$	2,5	3,5
$150 < x \leq 180$	$15 < x \leq 20$	2	3
$180 < x \leq 210$	$10 < x \leq 15$	1,6	2,4
$210 < x \leq 240$	$6 < x \leq 10$	1,2	1,8
$240 < x \leq 270$	$3 < x \leq 6$	0,8	1,2
$270 < x \leq 300$	$1 < x \leq 3$	0,4	0,6
$300 < x$	$0 < x \leq 1$	0	0

Skor yang digunakan dipilih yang terbaik dari kedua skor menurut tabel 7 di atas.

(Lanjutan)

Lampiran 20. Keputusan Menteri BUMN KEP-100/MBU/2002



Lampiran II: 6/18
Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-100/MBU/2002
Tanggal : 4 Juni 2002

KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA

Contoh Perhitungan :

Contoh 1 :

PT "A" (BUMN Non Infra) pada tahun 1999 memiliki Perputaran Persediaan 180 hari dan pada tahun 1998 sebesar 195 hari.

Sesuai tabel 7 diatas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Perputaran Persediaan : 3
 - Perbaikan Perputaran Persediaan (15 hari) : 2,4
- Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3

Contoh 2 :

PT "B" (BUMN Infra struktur) pada tahun 1999 memiliki Perputaran Persediaan 240 hari dan pada tahun 1998 sebesar 272 hari.

Sesuai dengan tabel 7 diatas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Perputaran Persediaan : 1,2
 - Perbaikan Perputaran Persediaan (32 hari) : 3,5
- Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3,5

g. Perputaran Total Asset/Total Asset Turn Over (TATO)

Rumus :

$$\text{TATO} = \frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Capital Employed}} \times 100 \%$$

Definisi :

- Total Pendapatan adalah Total Pendapatan Usaha dan Non Usaha tidak termasuk pendapatan hasil penjualan Aktiva Tetap
- Capital Employed adalah posisi pada akhir tahun buku total Aktiva dikurangi Aktiva Tetap Dalam Pelaksanaan.

Tabel 8 : Daftar skor penilaian perputaran total asset

TATO = x (%)	Perbaikan = x (%)	Skor	
		Infra	Non Infra
120 < x	20 < x	4	5
105 < x <= 120	15 < x <= 20	3,5	4,5
90 < x <= 105	10 < x <= 15	3	4
75 < x <= 90	5 < x <= 10	2,5	3,5
60 < x <= 75	0 < x <= 5	2	3
40 < x <= 60	x <= 0	1,5	2,5
20 < x <= 40	x < 0	1	2
x <= 20	x < 0	0,5	1,5

Skor yang digunakan dipilih yang terbaik dari kedua skor menurut tabel 8 diatas.

Contoh perhitungan :

Contoh 1 :

PT "A" (BUMN Non Infrastruktur) pada tahun 1999 memiliki Perputaran Total Asset sebesar 70 % dan pada tahun 1998 sebesar 60% hari.

(Lanjutan)

Lampiran 20. Keputusan Menteri BUMN KEP-100/MBU/2002



Lampiran II : 7/18
Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-100/MBU/2002
Tanggal : 4 Juni 2002

KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA

Sesuai tabel 8 di atas, maka skor tahun 1999 menurut :
- Tingkat Perputaran Total Asset : 3
- Perbaikan Perputaran Total Asset (10%) : 3,5
Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3,5

Contoh 2:
PT "B" (BUMN Infrastruktur) pada tahun 1999 memiliki Perputaran Total Asset sebesar 108 % dan pada tahun 1998 sebesar 98%.

Sesuai tabel 8 di atas, maka skor tahun 1999 menurut :
- Tingkat Perputaran Total Asset : 3,5
- Perbaikan Perputaran Total Asset (10%) : 2,5
Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3,5

h. Rasio Total Modal Sendiri Terhadap Total Asset (TMS terhadap TA)

Rumus:

$$\text{TMS terhadap TA} = \frac{\text{Total Modal Sendiri}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Definisi :

- Total Modal Sendiri adalah seluruh komponen Modal Sendiri pada akhir tahun buku diluar dana-dana yang belum ditetapkan statusnya.
- Total Asset adalah Total Asset dikurangi dengan dana-dana yang belum ditetapkan statusnya pada poisisi akhir tahun buku yang bersangkutan.

Tabel 9 : Daftar skor penilaian Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset

TMS thd TA (%) = x	Skor	
	Infra	Non Infra
$x < 0$	0	0
$0 \leq x < 10$	2	4
$10 \leq x < 20$	3	6
$20 \leq x < 30$	4	7,25
$30 \leq x < 40$	6	10
$40 \leq x < 50$	5,5	9
$50 \leq x < 60$	5	8,5
$60 \leq x < 70$	4,5	8
$70 \leq x < 80$	4,25	7,5
$80 \leq x < 90$	4	7
$90 \leq x < 100$	3,5	6,5

Contoh perhitungan:

PT "B" (BUMN Non Infra) memiliki rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset sebesar 35 %, maka sesuai tabel 9 skor untuk indikator rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Asset adalah 10.

(Lanjutan)

Lampiran 20. Keputusan Menteri BUMN KEP-100/MBU/2002



Lampiran II : 8/18
Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-100/MBU/2002
Tanggal : 4 Juni 2002

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

II. ASPEK OPERASIONAL

1. Total Bobot.

-BUMN INFRASTRUKTUR	35
-BUMN NON INFRASTRUKTUR	15
2. Indikator yang dinilai
Indikator yang dinilai meliputi unsur-unsur kegiatan yang dianggap paling dominan dalam rangka menunjang keberhasilan operasi sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Beberapa indikator penilaian yang dapat digunakan adalah sebagaimana dalam "*Contoh Indikator Aspek Operasional*".
3. Jumlah Indikator
Jumlah indikator aspek operasional yang digunakan untuk penilaian tingkat kesehatan setiap tahunnya minimal 2 (dua) indikator dan maksimal 5 (lima) indikator, dimana apabila dipandang perlu indikator-indikator yang digunakan untuk penilaian dari suatu tahun ke tahun berikutnya dapat berubah. Misalnya, suatu indikator yang pada tahun sebelumnya selalu digunakan, dalam tahun ini tidak lagi digunakan karena dianggap bahwa untuk kegiatan yang berkaitan dengan indikator tersebut perusahaan telah mencapai tingkatan/standar yang sangat baik, atau karena ada indikator lain yang dipandang lebih dominan pada tahun yang bersangkutan.
4. Sifat penilaian dan kategori penilaian:

Penilaian terhadap masing-masing indikator dilakukan secara kualitatif dengan kategori penilaian dan penetapan skornya sebagai berikut :
 - Baik sekali (BS) : skor = 100% x Bobot indikator yang bersangkutan
 - Baik (B) : skor = 80% x Bobot indikator yang bersangkutan
 - Cukup (C) : skor = 50% x Bobot indikator yang bersangkutan
 - Kurang (K) : skor = 20% x Bobot indikator yang bersangkutanDefinisi untuk masing-masing kategori penilaian secara umum adalah sebagai berikut :
 - Baik sekali : Sekurang-kurangnya mencapai standar normal atau diatas normal baik diukur dari segi kualitas (waktu, mutu dan sebagainya) dan kuantitas (produktivitas, rendemen dan sebagainya).
 - Baik : Mendekati standar normal atau sedikit dibawah standar normal namun telah menunjukkan perbaikan baik dari segi kuantitas (produktivitas, rendemen dan sebagainya) maupun kualitas (waktu, mutu dan sebagainya).
 - Cukup : Masih jauh dari standar normal baik diukur dari segi kualitas (waktu, mutu dan sebagainya) namun kuantitas (produktivitas, rendemen dan sebagainya) dan mengalami perbaikan dari segi kualitas dan kuantitas.
 - Kurang : Tidak tumbuh dan cukup jauh dari standar normal

(Lanjutan)

Lampiran 20. Keputusan Menteri BUMN KEP-100/MBU/2002



Lampiran II : 9/18
Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-100/MBU/2002
Tanggal : 4 Juni 2002

KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA

5. Mekanisme Penilaian

a. Penetapan indikator dan penilaian masing-masing bobot

- Indikator aspek operasional yang digunakan untuk penilaian setiap tahunnya ditetapkan oleh RUPS untuk PERSERO atau Menteri Badan Usaha Milik Negara untuk PERUM pada pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahunan perusahaan.
- Sebelum pengesahan RKAP tahunan oleh RUPS untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM, Komisaris/Dewan Pengawas wajib menyampaikan usulan tentang indikator aspek operasional yang digunakan untuk penilaian tahun buku yang bersangkutan dan besar bobot masing-masing indikator tersebut kepada Pemegang Saham untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM.
- Dalam menyampaikan usulan indikator dan besaran bobot tersebut, Komisaris/Dewan Pengawas wajib memberikan justifikasi mengenai masing-masing indikator aspek operasional yang diusulkan untuk digunakan dan dasar pembobotannya.
- Dalam pengesahan RKAP tahun yang bersangkutan, RUPS untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM sekaligus menetapkan indikator operasional yang digunakan untuk tahun yang bersangkutan dan masing-masing bobotnya dengan antara lain mempertimbangkan usul Komisaris/Dewan Pengawas tersebut di atas.
- Khusus untuk penilaian tingkat kesehatan tahun buku 2002, Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN yang penilaian tingkat kesehatannya diatur dengan Surat Keputusan ini wajib menyampaikan usul tentang indikator-indikator aspek operasional yang akan digunakan berikut masing-masing bobotnya kepada Kementerian BUMN selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tanggal Surat Keputusan ini diterbitkan.

b. Mekanisme penetapan nilai

- Sebelum diselenggarakan RUPS untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM pengesahan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, Komisaris/Dewan Pengawas wajib menyampaikan kepada Pemegang Saham untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM penilaian kinerja perusahaan berdasarkan indikator-indikator aspek operasional dan bobot yang telah ditetapkan oleh RUPS untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM dalam pengesahan RKAP tahun yang bersangkutan.
- Dalam menyampaikan usulan penilaian tersebut Komisaris/Dewan Pengawas diharuskan memberikan justifikasi atas penilaian masing-masing indikator aspek operasional yang digunakan.
- RUPS untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM dalam pengesahan laporan keuangan menetapkan penilaian terhadap aspek operasional yang antara lain memperhatikan usulan Komisaris/Dewan Pengawas.

(Lanjutan)

Lampiran 20. Keputusan Menteri BUMN KEP-100/MBU/2002



Lampiran II: 10/18
Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-100/MBU/2002
Tanggal : 4 Juni 2002

KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA

6. Contoh Perhitungan

BUMN Pelabuhan (infrastruktur)

Indikator yang digunakan	Bobot	Nilai	Skor	Unsur-unsur yang dipertimbangkan
1. Pelayanan kepada pelanggan/ masyarakat.	15	B	12	Turn Round Time (TRT), Waiting Time (WT), dsb.
2. Peningkatan kualitas SDM	10	C	5	Peningkatan Kesejahteraan, Kaderisasi pimpinan, dsb.
3. Research & Development	10	D	8	Kepedulian manajemen terhadap R&D, dsb.
Total	25		35	

III. ASPEK ADMINISTRASI

1. Total Bobot

- BUMN INFRASTRUKTUR (Infra) 15
- BUMN NON INFRASTRUKTUR (Non infra) 15

2. Indikator yang dinilai dan masing-masing bobotnya

Dalam penilaian aspek administrasi, indikator yang dinilai dan masing-masing bobotnya adalah seperti pada tabel 10 di bawah ini.

Tabel 10 : Daftar indikator dan bobot aspek Administrasi.

Indikator	Bobot	
	Infra	Non Infra
1. Laporan Perhitungan Tahunan	3	3
2. Rancangan RKAP	3	3
3. Laporan Periodik	3	3
4. Kinerja PUKK	6	6
TOTAL	15	15

3. Metode Penilaian

a. Laporan Perhitungan Tahunan

- Standar waktu penyampaian perhitungan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan harus sudah diterima oleh Pemegang Saham untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM paling lambat akhir bulan kelima sejak tanggal tutup buku tahun yang bersangkutan.

(Lanjutan)

Lampiran 20. Keputusan Menteri BUMN KEP-100/MBU/2002



Lampiran II : 11/18
Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-100/MBU/2002
Tanggal : 4 Juni 2002

KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA

- Penentuan nilai

Tabel 11 : Daftar penilaian waktu penyampaian Laporan Audit

Jangka Waktu Laporan Audit Diterima	Skor
- sampai dengan akhir bulan keempat sejak tahun buku perhitungan tahunan ditutup	3
- sampai dengan akhir bulan kelima sejak tahun buku perhitungan tahunan ditutup	2
- lebih dari akhir bulan kelima sejak tahun buku perhitungan tahunan ditutup	0

- Contoh Perhitungan :

Laporan audit terhadap laporan perhitungan tahunan BUMN PT "A" (periode tahun buku 1/1/1997 sampai dg 31/12/1997) diterima oleh Pemegang Saham (sesuai tanggal agenda diterima) pada tanggal 2 Mei 1998. Sesuai tabel 11 di atas, nilai PT "A" untuk ketepatan waktu penyampaian laporan perhitungan tahunan adalah 2.

- b. Rancangan RKAP

- Sesuai ketentuan pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1998, pasal 27 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1998, RUPS untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM dalam pengesahan rancangan RKAP tahunan harus sudah diterima 60 hari sebelum memasuki tahun anggaran yang bersangkutan.
- Penentuan Nilai

Tabel 12 : Daftar penilaian waktu penyampaian rancangan RKAP

Jangka waktu surat diterima sampai dengan memasuki tahun anggaran yang bersangkutan	Skor
- 2 bulan atau lebih cepat	3
- kurang dari 2 bulan	0

- Contoh 1:

Tahun anggaran BUMN PT "A" dimulai 1/1/1999. Rancangan RKAP BUMN PT "A" diterima oleh Pemegang Saham (sesuai tanggal agenda diterima) tanggal 29 Oktober 1998. Sesuai tabel 12 di atas pada butir pertama di atas, nilai PT "A" untuk ketepatan waktu penyampaian rancangan RKAP adalah 3.

- Contoh 2

Tahun anggaran BUMN PT "A" diterima oleh Pemegang Saham (sesuai tanggal agenda diterima) tanggal 5 Desember 1998. Sesuai tabel 12 di atas pada butir kedua di atas, nilai PT "A" untuk ketepatan waktu penyampaian rancangan RKAP adalah 0.

(Lanjutan)

Lampiran 20. Keputusan Menteri BUMN KEP-100/MBU/2002



Lampiran II: 12/18
Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-100/MBU/2002
Tanggal : 4 Juni 2002

KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA

c. Laporan Periodik

- Waktu penyampaian laporan.

Laporan periodik Triwulanan harus diterima oleh Komisaris/Dewan Pengawas dan Pemegang Saham untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode laporan.

- Penentuan nilai

Tabel 13 : Daftar penilaian waktu penyampaian Laporan Periodik

Jumlah keterlambatan dalam 1 tahun	Skor
lebih kecil atau sama dengan 0 hari	3
$0 < x \leq 30$ hari	2
$0 < x \leq 60$ hari	1
< 60 hari	0

- Contoh Perhitungan

Laporan periodik Triwulanan PT "S" periode anggaran 1 Januari sampai dengan 31 Desember untuk tahun penilaian diterima Pemegang Saham untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM masing-masing sebagai berikut:

Triwulanan	Berakhir Periode	Tanggal diterima
I	31/3 199x	5/5 199x
II	30/6 199x	15/7 199x
III	30/9 199x	31/10 199x.
IV	31/12 199x	10/2 199x+1

- Perhitungan jumlah hari keterlambatan

- Triwulan I 4
- Triwulan II 0
- Triwulan III 0
- Triwulan IV 9

Jumlah hari keterlambatan 13 sehingga mendapatkan nilai 2.

Catatan:

Laporan periodik sekurang-kurangnya terdiri dari:

- 1) Laporan pelaksanaan RKAP
- 2) Laporan pelaksanaan Proyek Pengembangan
- 3) Laporan pelaksanaan Anak Perusahaan
- 4) Laporan pelaksanaan penugasan (jika ada)
- 5) Laporan pelaksanaan PUKK

(Lanjutan)

Lampiran 20. Keputusan Menteri BUMN KEP-100/MBU/2002



Lampiran II: 13/18
Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-100/MBU/2002
Tanggal : 4 Juni 2002

KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA

- d. Kinerja Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK)
- Indikator yang dinilai

Indikator	Bobot	
	Infra	Non Infra
1. Efektivitas penyaluran	3	3
2. Tingkat kolektibilitas pengembalian Pinjaman	3	3
TOTAL	6	6

- Metode penilaian masing-masing indikator.
d.1. Efektivitas penyaluran dana.

$$\text{Rumus : } \frac{\text{Jumlah dana yang disalurkan}}{\text{Jumlah dana yang tersedia}} \times 100\%$$

Definisi :

- Jumlah dana tersedia adalah seluruh dana pembinaan yang tersedia dalam tahun yang bersangkutan yang terdiri atas:
 - Saldo awal
 - Pengembalian pinjaman
 - Setoran eks pembagian laba yang diterima dalam tahun yang bersangkutan (termasuk alokasi dari dana PUKK BUMN lain, jika ada)
 - Pendapatan bunga dari pinjaman PUKK
- Jumlah dana yang disalurkan adalah seluruh dana yang disalurkan kepada usaha kecil dan koperasi dalam tahun yang bersangkutan yang terdiri dari hibah dan bantuan pinjaman, termasuk dana penjaminan (dana yang dialokasikan untuk menjamin pinjaman usaha kecil dan koperasi kepada Lembaga Keuangan).

Tabel 14 : Daftar penilaian tingkat penyerapan dana PUKK

Penyerapan (%)	> 90	85 s.d. 90	80 s.d. 85	<80
Skor	3	2	1	0

Contoh perhitungan :

Jumlah dana yang tersedia pada BUMN PT "A" dalam tahun 1999 adalah sebesar Rp.10.000 terdiri dari:

- Saldo awal tahun 1999 Rp. 500
- Pengembalian pinjaman Rp. 5.000
- Setoran eks pembagian laba selama tahun yang bersangkutan Rp. 4.000
- Pendapatan bunga dari pinjaman PUKK Rp. 500

Jumlah

Rp.10.000

(Lanjutan)

Lampiran 20. Keputusan Menteri BUMN KEP-100/MBU/2002



Lampiran II: 14/18
Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-100/MBU/2002
Tanggal : 4 Juni 2002

KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA

Jumlah dana yang disalurkan oleh BUMN PT "A" tahun 1999 Rp. 9.500 terdiri dari :

- Pinjaman Rp. 8.500
- Hibah Rp. 1.000

Efektivitas penyaluran dana = $9.500/10.000 \times 100\%$

Sesuai dengan tabel 14 di atas, maka skor untuk indikator yang bersangkutan adalah 3.

d.2. Tingkat kolektibilitas penyaluran pinjaman.

Rumus : $\frac{\text{Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PUKK}}{\text{Jumlah pinjaman yang disalurkan}} \times 100\%$

Definisi :

- Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PUKK adalah perkalian antara bobot kolektibilitas (%) dengan saldo pinjaman untuk masing-masing kategori kolektibilitas sampai dengan periode akhir tahun buku yang bersangkutan. Bobot masing-masing tingkat kolektibilitas adalah sebagai berikut:

- Lancar 100 %
- Kurang lancar 75 %
- Ragu-ragu 25 %
- Macet 0 %

- Jumlah pinjaman yang disalurkan adalah seluruh pinjaman kepada Usaha Kecil dan Koperasi sampai dengan periode akhir tahun buku yang bersangkutan.

Tabel 15 : Daftar penilaian tingkat pengembalian dana PUKK.

Tingkat pengembalian (%)	> 70	40 s.d. 70	10 s.d. 40	<10
Skor	3	2	1	0

Contoh Perhitungan:

Posisi pinjaman kepada usaha kecil dan koperasi BUMN PT "A" s.d. akhir tahun buku 1999 adalah Rp. 3.000 juta, terdiri dari (Rp.juta)

- Lancar = 1.500
- Kurang lancar = 500
- Ragu-ragu = 900
- Macet = 100

Jumlah 3.000

(Lanjutan)

Lampiran 20. Keputusan Menteri BUMN KEP-100/MBU/2002



Lampiran II: 15/18
Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-100/MBU/2002
Tanggal : 4 Juni 2002

KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA

Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PUKK adalah sebagai berikut:

- Lancar	1.500	x	100 %	=	1.500
- Kurang lancar	500	x	75 %	=	375
- Ragu-ragu	800	x	25 %	=	225
- Macet	100	x	0 %	=	0

Jumlah rata-rata tertimbang **2.100**

Tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman adalah $\frac{2.100}{3000} \times 100 \% = 70 \%$

Sesuai dengan tabel 15 di atas maka skor untuk indikator tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman adalah 2.

IV. LAIN-LAIN

1. Dalam penilaian tingkat kesehatan BUMN, Direksi diberikan opsi untuk tidak memperhitungkan proyek/investasi pengembangan yang sudah dinyatakan operasi komersial menurut standar Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau standar umum yang berlaku untuk BUMN tersebut selama 2 (dua) tahun apabila:
 - a. Dalam 2 tahun sejak operasi komersial, proyek/investasi pengembangan dimaksud, belum mencapai utilisasi sebesar 60 %, atau;
 - b. Periode operasi komersial dengan utilisasi di atas 60 % dalam satu tahun penilaian kurang dari 9 bulan.
2. Dalam hal proyek/investasi pengembangan tersebut tidak diperhitungkan dalam penilaian tingkat kesehatan, maka Direksi harus memisahkan secara tegas laporan keuangan yang meliputi Neraca, Laba/Rugi dan Aliran Kas untuk proyek/investasi pengembangan dimaksud dari laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya perhitungan tingkat kesehatan hanya didasarkan laporan keuangan perusahaan di luar laporan keuangan proyek/investasi pengembangan.

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

(Lanjutan)

Lampiran 20. Keputusan Menteri BUMN KEP-100/MBU/2002



Lampiran II: 16/18
Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-100/MBU/2002
Tanggal : 4 Juni 2002

KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA

CONTOH INDIKATOR ASPEK OPERASIONAL

INDIKATOR	UNSUR-UNSUR YANG DIJADIKAN PERTIMBANGAN	CONTOH APLIKASI TERHADAP UNSUR-UNSUR YANG DIPERTIMBANGKAN	
		BUMN/SEKTOR	UNSUR-UNSUR YANG DAPAT DIPERTIMBANGKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pelayanan kepada Pelanggan/ Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Perbaikan kualitas sarana & prasarana untuk kepentingan/kepuasan pelanggan. ✓ Ketersediaan pelayanan purna jual (after sales service) ✓ Perbaikan mutu produk. ✓ Pengembangan jalur distribusi. ✓ Pelayanan gangguan/troubles. ✓ Penyederhanaan birokrasi yang menguntungkan bagi pelanggan. ✓ Kecepatan pelayanan. ✓ Guidance yang jelas bagi pelanggan. ✓ Peningkatan fasilitas keselamatan bagi pelanggan /pemakai jasa. 	<p>Pelabuhan</p> <p>Pengairan (PERUM Otorita Jatiluhur dan PERUM Jasa Tirta)</p> <p>PLN</p> <p>Jalan Tol</p> <p>Garuda/MNA Bandara</p>	<p>Tum Round Time (TRT), Berthing Time (BT), Waiting Time (WT), dsb</p> <p>Pemenuhan supply air kepada PDAM/industri pengendalian banjir, pengendalian daerah serapan sungai.</p> <p>Frekuensi pemadaman, lama rata-rata pemadaman, kecepatan pelayanan gangguan.</p> <p>Kualitas jalan, indikator traffic sign.</p> <p>On time performance.</p> <p>Kebersihan terminal Bandara.</p>
2. Efisiensi produksi dan produktivitas	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Peningkatan utilisasi faktor-faktor produksi/assets idle. ✓ Peningkatan rendemen. ✓ Peningkatan produktivitas per satuan faktor produksi. ✓ Pengurangan susut/loses, baik susut teknis, susut distribusi, maupun susut karena faktor lainnya. ✓ Peningkatan nilai men-hour. ✓ Peningkatan jam jalan rata-rata mesin (dalam batas-batas toleransi). 	<p>Perkebunan</p> <p>Kereta Api/pelayaran /penerbangan</p> <p>PLN</p> <p>Pengairan (PERUM Otorita Jatiluhur dan PERUM Jasa Tirta)</p> <p>Konsultansi</p> <p>Pertambangan</p>	<p>Rendemen, produksi per hektar, dsb.</p> <p>Load factor penumpang dan barang, penumpang-kui-ton, dsb.</p> <p>Susut teknis, susut distribusi, dsb.</p> <p>Pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan (O & P)</p> <p>Men-hour terjual, dsb.</p> <p>Jam jalan kapal keruk, excavator, dsb.</p>

(Lanjutan)

Lampiran 20. Keputusan Menteri BUMN KEP-100/MBU/2002



Lampiran II : 17/18
Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-100/MBU/2002
Tanggal : 4 Juni 2002

KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA

(1)	(2)	(3)	(4)
3. Pemeliharaan kontinuitas produksi.	<ul style="list-style-type: none">✓ Kewajiban melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi sesuai persyaratan standar.✓ Eksplorasi SDA dengan orientasi jangka panjang.✓ Pelaksanaan checking rutin terhadap fasilitas-fasilitas umum.✓ Kepatuhan pengoperasian peralatan sesuai dengan batas kapasitas yang direkomendasikan.✓ Replacement sarana dan prasarana yang sudah tidak produktif.	Perkebunan Pelabuhan Transportasi	Kepatuhan terhadap aturan penyadapan karet, regenerasi tanaman tidak produktif. Pemeliharaan fasilitas demaga, pengerukan alur /kolam, dsb. Pemeliharaan sarana transportasi Bus, kereta api, kapal atau pesawat.
4. Inovasi produk baru	<ul style="list-style-type: none">✓ Kreativitas dalam meningkatkan kualitas produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan.✓ Penciptaan produk-produk baru✓ Peningkatan penguasaan teknologi.	Kontraktor Industri kimia dasar	Hak patent, hak cipta, temuan metode konstruksi baru, dsb. Konservasi energi, produk-produk baru yang prospektif, dsb.
5. Peningkatan kualitas SDM	<ul style="list-style-type: none">✓ Mutu diklat.✓ Penyelenggaraan pendidikan formal dan informal sesuai kebutuhan (dalam negeri dan luar negeri)	Berlaku umum untuk semua sektor	Penyelenggaraan diklat sesuai kebutuhan. Kaderisasi pimpinan. Peningkatan kesejahteraan Kepedulian manajemen terhadap R & D.
6. Research & Development (R & D).	<ul style="list-style-type: none">✓ Pengembangan metode baru yang prospektif.✓ Hasil riset yang bermanfaat.✓ Perhatian perusahaan terhadap R & D.	Berlaku umum untuk semua sektor	Kepedulian manajemen terhadap R & D.
7. Hasil pelaksanaan penugasan Pemerintah.	<ul style="list-style-type: none">✓ Pencapaian sasaran.✓ Efisiensi dalam mencapai sasaran.✓ Perhatian manajemen terhadap keberhasilan penugasan.	Berlaku umum untuk semua sektor	Pencapaian sasaran, efisiensi dalam pencapaian sasaran.

(Lanjutan)

Lampiran 20. Keputusan Menteri BUMN KEP-100/MBU/2002



Lampiran II: 18/18
Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-100/MBU/2002
Tanggal : 4 Juni 2002

KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA

(1)	(2)	(3)	(4)
8. Kepedulian terhadap lingkungan.	<ul style="list-style-type: none">✓ Kebersihan lingkungan.✓ Pelaksanaan AMDAL.✓ Reklamasi.✓ Estate regulation.	Berlaku umum untuk semua sektor Kehutanan Pertambangan Industri manufaktur Kawasan Industri	Kebersihan lingkungan kerja. Reboisasi, AMDAL. Reklamasi daerah eks tambang, AMDAL. AMDAL. Estate regulation, AMDAL.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum

ttd

Victor Hutapea
NIP 060051008

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

t t d

LAKSAMANA SUKARDI

**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI**